

EVOLUSI EKONOMI KOTA SOLO

Buku ini akan menganalisis evolusi ekonomi Kota Surakarta sejak masa Kerajaan sampai pada era reformasi dewasa ini. Setidaknya ada dua alasan pokok mengapa studi tentang evolusi ekonomi Kota Surakarta perlu dilakukan. Pertama, Kota Surakarta mempunyai kekhasan sebagai pusat kekuasaan Jawa tempo dulu. Surakarta merupakan ibu kota Kerajaan Mataram Islam –sebuah kerajaan besar di Nusantara- di mana hingga saat ini tetap menjadi salah satu pusat kebudayaan bangsa Indonesia dan pusat perdagangan kawasan. Maka sudah pada galibnya jika rekonstruksi sejarah perkembangan ekonomi Kota Surakarta ini menjadi sangat penting baik bagi komunitas epistemik maupun masyarakat luas. Kedua, studi evolusi ekonomi Kota Surakarta merupakan cara untuk melacak akar-akar sejarah perkembangan kota dari formasi awal yang telah bertransformasi dalam bentuk yang sekarang ini, dan untuk memproyeksikan perkembangan pada masa yang akan datang.

Meminjam analisis Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (2000) bahwa sesungguhnya sejarah tidak berjalan ke belakang, melainkan ke depan. Maka, tidak ada gunanya bernostagia tentang masa lalu yang seolah-olah merupakan “Zaman Keemasan” ataupun menyesali masa lalu sebagai “Zaman Kegelapan” sehingga menghantui masa kini. Sikap yang benar dari sebuah kajian sejarah adalah berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat harus selalu siap menghadapi masa depan dengan jalan meningkatkan kemampuan mengantisipasi perkembangan mendatang. Pada konteks inilah, pembahasan evolusi ekonomi Kota Surakarta akan dilakukan. Yaitu mengkaji evolusi sejak pembentukan Kota Surakarta pada masa Kerajaan Mataram Islam, Masa Kolonial, Era Kemerdekaan hingga Era Reformasi dewasa ini dan proyeksinya pada tahun-tahun yang akan datang.



FE UNS

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Email: lukkim@gmail.com

ISBN 978-979-17320-1-7



EVOLUSI EKONOMI KOTA SOLO

Lukman Hakim. Heri Sulistyono JNS. Mulyanto
Soejatno Kartodirdjo. dkk



EVOLUSI EKONOMI KOTA SOLO



FE UNS

EVOLUSI EKONOMI KOTA SOLO

*Evolusi Ekonomi Kota Solo/Lukman Hakim, Hery Sulistyio JNS, Mulyanto, et. al - Cet.2--
Surakarta: PJEP, 2024.*

x + 166 Hal; 14.5 × 21 cm

EVOLUSI EKONOMI KOTA SOLO.

Hak Cipta @ Lukman Hakim, dkk.

Penulis

Lukman Hakim
Hery Sulistyio JNS
Mulyanto
Soejatno Kartodirdjo
Akhmad Daerobi
Bambang Sarosa
Bhimo Rizky Samudro
BRM Bambang Irawan
Nunung Sri Mulyani

Editor

Eko Wiratno

Ilustrasi Sampul

Lestude

Penerbit & Percetakan

Penerbit Jurusan Ekonomi Pembangunan (PJEP) FE UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta 57136
Telp/Fax +62271-668607, 668609

Cetakan II Oktober 2024
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved

ISBN: 978-979-17320-1-7

KATA PENGANTAR

Buku ini menganalisis evolusi ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya sejak masa Kerajaan sampai pada era reformasi dewasa ini. Setidaknya ada dua alasan pokok mengapa studi tentang evolusi ekonomi Kota Surakarta perlu dilakukan. Pertama, Kota Surakarta mempunyai kekhasan sebagai pusat kekuasaan Jawa tempo dulu. Surakarta merupakan ibu kota Kerajaan Mataram Islam di mana hingga saat ini tetap menjadi salah satu pusat kebudayaan bangsa Indonesia dan pusat perdagangan kawasan. Maka sudah pada galibnya jika rekonstruksi sejarah perkembangan ekonomi Kota Surakarta ini menjadi sangat penting baik bagi komunitas epistemik maupun masyarakat luas. Kedua, studi evolusi ekonomi Kota Surakarta merupakan cara untuk melacak akar-akar sejarah perkembangan kota dari formasi awal yang telah bertransformasi dalam bentuk yang sekarang ini, dan untuk memproyeksikan perkembangan pada masa yang akan datang. Lebih spesifik studi ini akan mengeksplorasi evolusi sistem pemerintahan, perekonomian, transportasi dan sosial secara lebih komprehensif.

Meminjam analisis Kuntjoro-Jakti (2000:xiii) bahwa sesungguhnya sejarah tidak berjalan ke belakang, melainkan ke depan. Maka, tidak ada gunanya bernostalgia tentang masa lalu yang seolah-olah merupakan “Zaman Keemasan” ataupun menyesali masa lalu sebagai “Zaman Kegelapan” sehingga menghantui masa kini. Sikap yang benar dari sebuah kajian sejarah

adalah berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat harus selalu siap menghadapi masa depan dengan jalan meningkatkan kemampuan mengantisipasi perkembangan mendatang. Pada konteks inilah, pembahasan evolusi ekonomi Kota Surakarta akan dilakukan. Yaitu mengkaji evolusi sejak pembentukan Kota Surakarta pada masa Kerajaan Mataram Islam, Masa Kolonial, Era Kemerdekaan hingga Era Reformasi dewasa ini dan proyeksinya pada tahun-tahun yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo yang telah memfasilitasi penelitian ini
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS yang telah mendorong kepada tim penulis untuk membuat karya ilmiah yang berkualitas
3. Para narasumber yang telah memberikan banyak data dan informasi sehingga studi menjadi lebih komprehensif.

Terakhir kami mengucapkan, tiada gading yang tidak retak, buku ini masih banyak kekurangan, semoga akan menjadi inspirasi untuk terbitnya karya-karya yang lain.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
1. SURAKARTA PADA MASA KERAJAAN.....	1
1.1 Dinamika Politik.....	1
1.1.1 Sejarah Keraton Mataram Islam	1
1.2 Kerusuhan di Keraton Kartosura	3
1.2.1 Membangun Keraton Surakarta.....	9
1.2.2 Perpecahan Keraton.....	11
1.3 Dinamika Ekonomi.....	21
1.3.1 Tranformasi Transportasi Dari Sungai ke Kereta Api	21
1.3.2 Transformasi dari Pertanian, Perkebunan Ke Industri Gula.....	29
1.3.3 Munculnya Industri Kecil.....	40
1.3.4 Perkembangan Perbankan dan Depresi Ekonomi	43
1.3.5 Persaingan Bisnis pada Zaman Pergerakan	47
1.3.6 Masa Pendudukan Jepang	51
2. MASA KEMERDEKAAN DAN TRANSISI KE ORDE BARU	56
2.1 Dinamika Politik.....	56
2.1.1 Gerakan Anti Swapraja	56
2.1.2 Peran Partai Politik.....	59
2.1.3 G30S/PKI	60
2.2 Dinamika Ekonomi.....	62

2.2.1	Perkembangan Infrastruktur Ekonomi	62
2.2.2	Konferensi Ekonomi Solo dan Perkebunan.....	65
2.2.3	Perbankan dan Pembiayaan.....	66
2.2.4	Perkembangan Industrialisasi.....	72
2.2.5	Perkembangan Industrialisasi.....	75
2.2.6	Kondisi Eksisting Kota Surakarta Pada Awal Orde Baru	79
3.	SURAKARTA PADA MASA ORDE BARU	86
3.1	Dinamika Politik.....	86
3.1.1	Malari dan Kerusuhan Rasial 1980-an	86
3.2	Dinamika Ekonomi.....	88
3.2.1	Paradigma Pembangunan Orde Baru.....	88
3.2.2	Dari Bonanza Minyak sampai Resesi.....	97
4.	SURAKARTA PADA MASA REFORMASI	104
4.1	Dinamika Politik.....	105
4.1.1	Dari Teknokrat ke Teknolog	105
4.1.2	Pembangunan Daerah.....	114
4.1.3	Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta.....	122
4.2	Dinamika Ekonomi.....	123
4.2.1	Penduduk di Kota Surakarta.....	123
4.2.2	Ketenagakerjaan	125
4.2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	128
4.2.4	Kemiskinan.....	139
5.	SURAKARTA SEBAGAI KOTA INKLUSIF: SEBUAH EPILOG	148
5.1	Solo Kota Inklusif.....	148
5.2	Pelopor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	150
6.	KESIMPULAN.....	157
	REFERENSI	160
	BIO DATA TIM PENULIS	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Persentase Tonase Pelayaran Pantai Utara Pulau Jawa Berdasarkan Etnis.....	23
Tabel 1.2.	Transportasi Kereta Api Melalui Jalur Timur Barat dan Semarang-Vorstenlanden.....	28
Tabel 1.3.	Tanah Yang disewahkan kepada Perkebunan Eropa di Surakarta dan Yogyakarta 1875-1920 (dalam bau).....	35
Tabel 1.4.	Produksi Gula dan Tembakau di Vorstenlanden 1880-1910	36
Tabel 1.5.	Produksi Gula dan Tembakau di Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Mangkunegaran 1890-1910.....	38
Tabel 1.6.	Perkebunan Swasta Eropa di daerah Surakarta tahun 1915	39
Tabel 1.7.	Pemilik Perusahaan Batik Berdasarkan Etnis di Jawa tahun 1931	42
Tabel 1.8.	Pemilik Perusahaan Batik di Surakarta 1930.	42
Tabel 1.9.	Produksi Relatif Perusahaan Milik Bank-Bank Pertanian Dari Jumlah Produksi ^{a)} atau Jumlah Ekspor ^{b)} dari Indonesia 1933.....	46
Tabel 2.1.	Penerimaan Pemerintah Surakarta Pada Tahun 1950-1952.....	64
Tabel 2.2.	Perkembangan Badan Perkreditan Rakyat di Solo 1950-1952	71

Tabel 2.3.	Jumlah Perusahaan Koperasi di Jawa Tengah dan DIY Tahun 1958.....	78
Tabel 2.4.	Kondis Eksisting Perekonomia Surakarta 1968.....	82
Tabel 3.1.	Pengeluaran Investasi Pemerintah Pelita I	92
Tabel 4.1.	Perbandingan UU No5/1974, UU No22/1999, UU No32/2004	118
Tabel 4.2.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2004	124
Tabel 4.3.	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2003	125
Tabel 4.4.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 1993 Kota Surakarta Tahun 1999-2005 (Dalam Jutaan Rupiah dan Persen)	129
Tabel 4.5.	Status Kota Surakarta terhadap Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2003	138
Tabel 4.6.	Kelompok Keluarga Miskin Kota Surakarta Tahun 1999-2005	140
Tabel 4.7.	Data Kepala Keluarga Miskin di Kota Surakarta, Tahun 2005	140
Tabel 4.8.	Pasar-Pasar Tradisional di Kota Surakarta	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Surakarta, Tahun 2000-2003	126
Gambar 4.2	Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta, Tahun 2000 dan 2003	127
Gambar 4.3	Sebaran PDRB Harga Berlaku Menurut Kecamatan di Kota Surakarta, Tahun 2000 dan 2003 (dalam juta rupiah).....	130
Gambar 4.4	PDRB Per-kapita Harga Konstan 1993 di Kota Surakarta, Tahun 2000 dan 2003 (dalam ribuan rupiah)	131
Gambar 4.5	Distribusi PDRB Harga Konstan 2000 di Kota Surakarta, Semester-1 Tahun 2006 (dalam persen)	133
Gambar 4.6	Kontribusi Sektor-sektor Pembentuk PDRB Harga Berlaku di Kota Surakarta, Tahun 2001 dan 2004 (dalam miliar rupiah).....	133
Gambar 4.7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Berdasar Harga Brlaku dan Harga Kontan Tahun 1993, Tahun 1999-2005 (dalam persen) ...	135
Gambar 5.1	Jalur Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Pangan	155

1 SURAKARTA PADA MASA KERAJAAN

Bab ini akan menguraikan keadaan Surakarta sebelum kemerdekaan yang mencakup sejak masa sebelum pendirian Keraton Surakarta sampai dengan masa awal Kemerdekaan. Agar memudahkan analisis maka pada bab ini akan dibagi menjadi dua hal pokok. Pertama, adalah dinamika politik yang mencakup tentang sejarah awal Keraton Mataram Islam, kerusuhan di Keraton Kartosura, membangun Keraton Surakarta, dan perpecahan Keraton. Kedua, akan menganalisis dinamika ekonomi yang mencakup masalah transformasi transportasi dari sungai ke kereta api, transformasi pertanian perkebunan ke industri gula, munculnya industri kecil, perkembangan perbankan dan depresi ekonomi, persaingan bisnis pada zaman pergerakan, dan masa pendudukan Jepang.

1.1 Dinamika Politik

1.1.1 Sejarah Keraton Mataram Islam

Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo (1584-1601) dengan pusat kerajaannya adalah Kota Gede Yogyakarta. Pada masa Senopati ini telah dimulai penaklukan kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pajang dan Demak. Pengganti Panembahan Senopati adalah Panembahan Seda ing Krpyak (1601-1613). Panembahan

Krapyak meneruskan usaha penaklukan wilayah sampai ke Jawa Timur. Namun usaha ini belum berhasil, sampai beliau meninggal dunia yang digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakrokusumo (1613-1646). Sultan Agung merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Sultan Agung meneruskan penaklukan daerah sekitarnya yakni Madura (1624) dan Surabaya (1625). Sultan Agung juga berusaha untuk merebut Batavia dari tangan VOC yakni pada tahun 1628 dan 1629, namun semuanya berakhir dengan kegagalan (Ricklefs, 2005: 99-107).

Sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1646, Keraton Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I. Amangkurat I (1646-1677) memindahkan istana barunya di Plered, tepat di sebelah timur laut ibukota sebelumnya. Raja ini oleh para ahli sejarah dianggap sebagai raja yang buruk perangai. Semua kelompok yang tidak mendukungnya akan dibunuhnya. Tidak ada prestasi yang dapat diukir dalam regim pemerintahan Amangkurat I ini, yang menyebabkan kewibawaan Kerajaan Mataram Islam mulai merosot. Konspirasi untuk menggulingkan raja diprakarsai oleh putra mahkota sendiri yakni Amangkurat II yang memerintahkan Trunojoyo untuk memberontak. Pada akhirnya Amangkurat I kalah dan meninggal dunia di Tegal. Sejak itu, Amangkurat II (1677-1703) menjadi Raja Mataram. Atas bantuan VOC, pada akhirnya Amangkurat II berhasil mengalahkan Trunojoyo. Pada September 1680, Amangkurat II memindah ibu kota negara di sekitar daerah Pajang yang diberi nama Kartasura (Ricklefs, 2005: 179).

Pada tahun 1703, Amangkurat II mangkat dan digantikan oleh putranya Amangkurat III (1703-1708, w 1734). Namun tidak semua kerabat istana menyetujui pengangkatan Amangkurat III, salah satunya adalah pamannya sendiri Pangeran Puger. Konflik antara putra mahkota dengan pamannya sendiri ini memang sudah berlangsung lama sebelum Amangkurat II meninggal dunia. Ketika

itu, untuk melicinkan jalan menjadi raja, Amangkurat II berkerjasama dengan Untung Surapati yang ketika itu menjadi musuh besar VOC. Maka, setelah Amangkurat III naik tahta, Pangeran Puger menghubungi VOC di Semarang dan menceritakan konspirasi Amangkurat III dengan Surapati. Diplomasi Pangeran Puger berhasil meyakinkan VOC dan pada Juni 1704, VOC mengakuinya Pangeran Puger sebagai Raja Mataram yang baru yang bergelar Susuhunan Pakubuwono I (1704-1719). Akhirnya pada bulan September 1705, Susuhunan Pakubuwono I berhasil mengalahkan Amangkurat III yang lari bersama dengan Surapati ke Jawa Timur (Ricklefs, 2005: 179).

Pakubuwono I mangkat digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat IV (1719-1726). Pada masa ini muncul pemberontakan dari kalangan pangeran. Lagi-lagi VOC berhasil membantu dan mempertahankan raja. Pada bulan Maret 1726, Amangkurat IV jatuh sakit dan mangkat yang kemudian digantikan putranya yang bergelar Pakubuwono II (1726-1749). Pada masa Pakubuwono II terjadi kerusuhan besar yang dikenal sebagai "Geger Pecinan" yang menjadi penyebab utama kepindahan Keraton Kartosura ke Keraton Surakarta.

1.2 Kerusuhan di Keraton Kartosura

Geger Pecinan di Kartosura tidak dapat dilepaskan oleh peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa oleh VOC di Batavia (Jakarta). Pembantaian itu disebabkan oleh akumulasi konflik antara orang-orang Eropa terhadap komunitas Tionghoa di Batavia. Konflik antara orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa di Batavia adalah konflik khas perkotaan dimana para etnis yang hidup berdampingan saling bersaing dalam mencari penghidupan. Kehadiran sejumlah besar orang-orang Tionghoa dari China Daratan menyebabkan suasana Batavia menjadi semakin panas. Pada tahun 1740, jumlah Tionghoa diperkirakan telah mencapai

sekitar 15.000 jiwa atau sekitar 17% total penduduk di Batavia. Kebanyakan Tionghoa pendatang itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan sebagian dari mereka menjadi sumber kerentanan sosial dengan semakin meningkatnya aksi-aksi kejahatan di sekitar Batavia (Ricklefs, 2005: 208).

Untuk membatasi semakin meningkatnya komunitas Tionghoa, VOC membuat larangan untuk mencegah banyaknya orang-orang Tionghoa datang ke Batavia. Sementara, bagi yang telah tinggal di Batavia dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, VOC menangkap mereka dan membuangnya ke Ceylon (Srilangka) atau Kaap de Goede Hoop (Afrika). Yang dibiarkan tinggal di Batavia adalah orang-orang Tionghoa yang telah mempunyai izin tinggal. Untuk mendapatkan izin tinggal, orang-orang Tionghoa harus membayar kepada VOC. Bahkan ada beberapa pembesar VOC memeras orang-orang Tionghoa dengan meminta bayaran yang sangat mahal. Ini tentu saja meresahkan komunitas Tionghoa di Batavia. Apalagi ketika beredar isu bahwa orang-orang Tionghoa yang ditangkap dan dibawa ke Srilangka dan Afrika itu, sebenarnya di tengah jalan, mereka di lemparkan ke laut, menyebabkan keresahan semakin menjadi-jadi. Situasi ini mendorong orang-orang Tionghoa bersiap melakukan melakukan penentangan kepada VOC (Liem, 2004: 35).¹

Pada 7 Oktober 1740, gerombolan-gerombolan orang Tionghoa yang berada di luar kota melakukan penyerangan dan pembunuhan beberapa orang Eropa. Agar orang-orang Tionghoa di dalam kota tidak bergabung dalam kerusuhan itu, VOC melakukan jam malam dan pengeledahan kepemilikan senjata di rumah-rumah orang Tionghoa. Ternyata pengeledahan atas rumah-rumah Tionghoa tidak terkendali lagi, tembakan membabi buta dilakukan

¹ Buku Liem Thian Joe, "Riwayat Semarang" terbit pertama kali pada tahun 1931, yang kemudian diterbitkan lagi pada tahun 2004.

oleh VOC. Pada 9 Oktober 1740 dimulailah pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Diperkirakan orang-orang Tionghoa yang terbunuh sebanyak 10.000 orang. Perkampungan Tionghoa dirampok dan dibakar delapan (8) hari. Perampokan baru berhenti setelah VOC memberi premi kepada tentaranya untuk menghentikan penjarahan dan kembali kepada tugas rutinnnya. Sementara, orang-orang Tionghoa yang berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke timur, menyusuri sepanjang daerah pesisir bergabung dengan komunitasnya di Jawa Tengah untuk melakukan perlawanan terhadap VOC lebih lanjut (Ricklefs, 2005: 208).

Pembantaian komunitas Tionghoa di Batavia berdampak sangat besar bagi perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Jawa. Pembantaian ini memunculkan solidaritas yang luar biasa untuk melawan VOC baik kalangan etnis Tionghoa maupun etnis Jawa seperti nanti diwakili oleh Pakubuwono II. Beberapa komunitas Tionghoa di pesisir juga langsung melakukan perlawanan kepada VOC. Pada Mei 1841, komunitas Tionghoa melakukan penyerangan pos VOC di Juwana. Markas besar VOC di Semarang dan beberapa pos lain di pesisir dikepung. Pada Mei 1741, VOC terpaksa meninggalkan posnya di Demak. Sementara pada Juni 1741, pos VOC di Rembang hendak dikosongkan, tetapi usaha itu gagal, pada bulan Juli personel VOC di sana di bantai (Ricklefs, 2005: 210).

Sementara itu, respons terhadap pembantaian orang-orang Tionghoa juga ditunjukkan oleh Pakubuwono II. Banyak yang menganggap bahwa Keraton Mataram ini memanfaatkan konflik VOC dengan Tionghoa, namun jelas bahwa dalam konteks keberanian melawan penjajah respons Pakubuwono II ini merupakan langkah positif. Dan ini mungkin juga salah satu bentuk solidaritas Raja Mataram terhadap kelompok Tionghoa. Sebenarnya di kalangan istana sendiri telah berkembang dua

pendapat yang bersifat pro dan kontra terhadap rencana Pakubuwono II menyerang VOC bergabung dengan komunitas Tionghoa. Pandangan pertama seperti diutarakan kelompok Patih Natakusuma memilih melawan VOC sebagai sebuah langkah strategis dengan jalan bergabung dengan komunitas Tionghoa. Kelompok lain dipimpin oleh penguasa daerah pesisir yang berpendapat bahwa dalam peperangan VOC dan Tionghoa, pada akhirnya akan dimenangkan oleh VOC. Maka mereka menganjurkan tidak perlu tergesa-gesa, sebaiknya menunggu sampai VOC terdesak dan meminta bantuan Mataram. Dua pertimbangan ini menyebabkan Pakubuwono II sempat ragu-ragu, namun pada akhir Raja Mataram ini lebih memilih pandangan yang pertama yakni segera melakukan penyerangan kepada VOC. Pada November 1741, Pakubuwono II mengirim pasukan dan artileri ke Semarang sebanyak 20.000 orang dan 30 pucuk meriam yang bergabung 3.500 orang Tionghoa mengepung Markas Besar VOC di Semarang. Selain itu, Pakubuwono II juga menyerang pos VOC di Kartasura yang berhasil membunuh Kapten Johansen van Nelsen dan menghancurkan markas itu (Ricklefs, 2005: 211).

Dalam posisi sulit itu, akhirnya VOC mendatangkan bala tentaranya dari Batavia dan meminta bantuan Cakraningrat IV dari Madura. Mereka berhasil memukul mundur kepungan Tionghoa yang dibantu Mataram di Markas VOC Semarang. Bahkan Cakraningrat IV berhasil mengalahkan para pejuang Tionghoa di wilayah timur. Setelah kekalahannya itu, Pakubuwono II baru menyadari bahwa pilihannya untuk mendukung komunitas Tionghoa melawan VOC adalah sebuah tindakan yang keliru. Untuk itu Pakubuwono segera memohon ampun kepada VOC. VOC mengabulkan dan mengirim utusan yang dipimpin Kapten Van Hohendorff ke Kartasura untuk melakukan perundingan. Sementara, Pakubuwono II mengirim juru runding yang dipimpin oleh Patih Natakusuma ke VOC Semarang, namun VOC

menangkap Patih itu dan membuang ke luar negeri. Penangkapan dan pembuangan Patih Natakusuma atas seizin Pakubuwono II (Ricklefs, 2005: 212).

Perubahan sikap Pakubuwono II menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Para pejuang anti VOC baik dari kalangan Jawa maupun Tionghoa merasa telah dikhianati oleh Raja. Situasi ini memunculkan perlawanan pejuang yang lebih hebat baik kepada VOC maupun Pakubuwono II. Bahkan beberapa pangeran istana yang tidak puas dengan Pakubuwono II pun bergabung dalam makar ini diantaranya Pangeran Mangkubuni (kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I) dan Raden Mas Said (kelak menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara). Isu perlawanannya pun berubah dari anti VOC menjadi anti Pakubuwono, maka sasaran penyerangannya adalah Keraton Pakubuwono II di Kartasura. Pada tahun awal 1742, para pemberontak itu mengangkat salah seorang pangeran cucu laki-laki dari Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun yang bernama Mas Gerendi yang bergelar Amangkurat V atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Sunan Kuning adalah sebutan sunan yang diangkat oleh komunitas Tionghoa. Pemberontakan ini berhasil merebut Keraton Kartasura pada bulan Juli 1742, dan Pakubuwono II lari ke Panaraga (Liem, 2004: 37).

Kenaikan Mas Garendi sebagai Raja Pemberontak yang diangkat oleh Komunitas Tionghoa dan berhasil merebut Keraton Kartosuro telah mengguncangkan sendi-sendi kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Tidak saja dari sudut politik, tetapi juga dapat dipandang dari sudut budaya. Bahkan kenaikan Mas Garendi itu dihubungkan dengan keyakinan orang Jawa terhadap Ramalan Jayabaya. Jayabaya pernah meramalkan bahwa nanti “orang asing” akan memimpin Jawa “seumur Jagung”. Bahkan seorang

intelektual Indonesia yang cukup rasional pun seperti Tan Malaka percaya dengan itu (2000: 16):²

“... Jawa sesungguhnya dikungkung oleh ramalan Empu Sedah: orang asing akan memimpin.....semua perang saudara ini, besar atau kecil, untuk kepentingan bangsa asing, dalam waktu singkat berakhir dengan kemenangan Tionghoa-Jawa bernama Mas Garendi.”

Secara kebudayaan kemenangan politik Tionghoa di Kartosuro itu menorehkan luka bagi orang Jawa. Raja dan Kerajaan merupakan simbol penting masyarakat Jawa pada masa itu yang berhasil dikalahkan oleh orang Tionghoa. Kemenangan Mas Garendi merupakan pengulangan sejarah di mana muncul Raja yang didukung oleh orang-orang Tionghoa. Sebelumnya pernah ada Raja dari keturunan Tionghoa-Jawa yang bernama Raden Patah yang berhasil mendirikan Kerajaan Demak dan mengalahkan Kerajaan Majapahit (Malaka, 2000: 15).

Dalam pelariannya, Pakubuwono II meminta bantuan kepada VOC dengan memberikan konsesi, jika bisa kembali menjadi Raja, maka akan memberikan wilayah pesisir Pulau Jawa. VOC menyetujui dan meminta bantuan kepada Cakraningrat IV untuk melawan para pemberontak. Bersama dengan lasykar Madura, Cakraningrat IV berhasil mengalahkan pemberontak. Dan atas

² Pendapat masyarakat tentang penguasaan Jawa oleh orang Tionghoa yang diwakili oleh Mas Garendi seperti dalam buku Tan Malaka “Aksi Massa” yang terbit pertama kali pada tahun 1920-an, mewakili suasana kebatinan masyarakat pada masa itu. Namun pada tahun 1940-an, terjadi perubahan tafsir “Ramalan Jayabaya” itu di kalangan masyarakat, karena yang dianggap menguasai Jawa “seumur jagung” adalah Jepang selama pendudukan dari tahun 1942-1945. Buku Tan Malaka “Aksi Massa” itu diterbitkan kembali pada tahun 2000.

permintaan VOC, Cakraningrat IV menyerahkan Keraton Kartosura kepada Pakubuwono II.³

Setelah Pakubuwono II kembali berkuasa segera merealisasi konsesi-konsesi kepada VOC diantaranya adalah(1) kedaulatan penuh atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara; (2) Raja menyerahkan 5000 koyan (sekitar 8.600 metrik ton) beras setiap tahun untuk selama-lamanya; (3) Patih hanya dapat dipilih dengan persetujuan VOC; (4) ada sebuah garnisun VOC di istana; (5) orang Jawa tidak boleh berlayar ke mana pun di luar Jawa, Madura dan Bali (Ricklefs, 2005: 214).

Ketika kembali ke Kartasura, pada 21 Desember 1742 Pakubuwono II, mendapati istana dalam keadaan rusak parah. Yasadipura –Pujangga Istana- dalam Babad Giyanti menceritakan suasana memilukan ketika Raja kembali ke istananya yang telah rusak “ Raja tampak kelihatan seperti biasanya ketika istana masih kaya raya dan jaya. Tetapi dalam hati sangat bersedih memikirkan keadaan istana beserta segala isinya porak poranda, laksana hilang dibakar oleh musuh yaitu Cina...” Maka, Raja meminta kepada Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf (VOC) segera mencari tempat untuk membangun keraton baru (Sudharmono, 2006: 17).

1.2.1 Membangun Keraton Surakarta

Keinginan untuk membangun keraton baru, setelah Keraton Kartosuro rusak parah, bagi Pakubuwono II bukan perkara

³ Jasa orang-orang Madura dalam merebut kembali Keraton Kartosuro ini yang menjadi salah satu sebab berkembangnya etnis Madura di Surakarta. Bahkan nanti pada masa Pakubuwono III, orang-orang Madura banyak mengabdikan Keraton sebagai prajurit bergabung dengan Lasykar Keraton Lombok Abang. Sebagian besar dari etnis Madura ini bermukim di kampung Madura yang disebut sebagai Kampung Sampangan (Sutirto, 2000: 91-92).

mudah. Terutama sejak beliau sempat tersingkir dari Keraton Kartosura dan atas bantuan VOC bertahta kembali di Keraton Katosura. Yang jelas mulai saat itu setiap tindakan dan langkah Raja harus mendapatkan izin dari VOC. Beberapa alternatif tempat yang baru telah disampaikan Raja kepada VOC salah satunya adalah kawasan Tingkir Salatiga. Van Hohendorff melaporkan kepada Kantor Pusat VOC di Batavia tentang keinginan Raja untuk memindahkan Ibu Kotanya pada tahun 1742. Setahun kemudian ada surat dari Gubernur Jenderal Johannes Thedens yang isinya: “Raja berkehendak memindahkan istana: wilayah Tingkir di daerah Salatiga yang direncanakan Raja, sepertinya sangat sesuai dengan yang diharapkan” (De Jonge: IX:426 dalam Sudharmono, 2006: 17). Namun wacana untuk pindah ke wilayah utara Kartosura tidak terwujud, kendati pun mungkin di daerah itu juga terdapat sungai besar yang mengalir dari selatan ke utara yakni Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak.

Namun rupanya Pakubuwono II masih ragu-ragu dengan alternatif tempat di kawasan Tingkir Salatiga itu. Justru beliau pada akhirnya meminta Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf mencari tempat ke daerah selatan. Akhirnya Ketiga orang itu mencoba mencari alternatif daerah ke wilayah selatan. Ada tiga tempat yang menjadi alternatif keraton yang baru yakni Desa Kadipolo, Sonosewu dan Sala. Menurut Tumenggung Honggowongso jika karaton dibangun di Desa Kadipolo dikemudian hari akan makmur, namun karaton akan cepat rusak dan banyak perang saudara. Bahkan Tumenggung Honggowongso meramalkan, jika karaton berdiri di Kadipolo hanya akan berusia maksimal 100 tahun. Sebaliknya jika karaton didirikan di Desa Sonosewu yang berada di sebelah timur Bengawan Sala, menurut Honggowongso tempat ini kurang cocok dan diramalkan hanya akan berusia 120 tahun, banyak perang dan akan kembali ke Agama Hindu Budha. Sementara, kalau keraton didirikan di Desa

Sala, menurut Honggowongso akan menjadi keraton besar dan dapat berumur lebih dari 200 tahun (Winarti, 2004:20).

Namun di luar aspek-aspek spiritual itu, pemilihan Desa Sala juga mengandung aspek strategis geografis. Tampaknya dari pihak VOC mempunyai visi yang cukup jelas tentang sebuah ibu kota negara yang baru yakni harus dekat dengan sungai besar sebagai sarana transportasi. Seperti telah disebutkan di atas, usulan pertama untuk ibu kota baru adalah daerah Tingkir (Salatiga) yang dekat dengan Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Pilihan kedua adalah Bengawan Sala yang berhulu di Pegunungan Seribu (Wonogiri) mengalir dari selatan ke utara sampai ke Bojonegoro dan Surabaya. Maka, dibandingkan Sungai Tuntang, Bengawan Sala lebih menjangkau wilayah yang lebih luar ke arah timur. Apalagi Bengawan Sala ketika itu, sudah merupakan bandar yang relatif cukup besar yang telah menjadi persinggahan pedagang dari Gresik dan Surabaya sejak zaman Pajang. Selain itu, di sekitar Bengawan Sala sudah terdapat permukiman multi etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan VOC (Sudharmono, 2006: 10).

Pembangunan Keraton Surakarta memakan waktu sekitar 3 tahun yang selesai pada akhir tahun 1745. Penanggungjawab utama pembangunan adalah Van Hohondorff yang tentu saja menggunakan tenaga-tenaga arsitek dari Belanda. Sementara para pekerja terdiri atas Wadana, Kaliwon, Panewu, Mantri, Lurah, Bekel dan Jajar. Perpindahan resmi Raja dari Kartosura ke Surakarta terjadi pada 17 Pebruari 1746 yang merupakan dianggap berdirinya Kota Surakarta Hadiningrat (Winarti, 2004:24).

1.2.2 Perpecahan Keraton

Perpindahan Keraton dari Kartosura ke Surakarta ternyata tidak menyurutkan konflik politik di Kerajaan Mataram Islam itu. Beberapa pemberontak yang melawan Pakubuwono II masih

berjalan seperti antara lain Raden Mas Said yang bermarkas di Sokawati (Sragen). Untuk meredam pemberontakan itu, Raja mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat mengusir mereka dari Sokawati akan diberi hadiah bertupa tanah sejumlah 3.000 cacah. Pangeran Mangkubumi bersemangat menerima tawaran itu. Pada tahun 1746 dia berhasil mengusir Raden Mas Said dari Sukawati dan menuntut hadiah yang ditawarkan oleh Raja. Akan tetapi, musuh lamanya di istana, Patih Pringgalaya (1742-55) membujuk Raja untuk menahan hadiah itu. Di tengah situasi yang genting itu, datanglah Gubernur Jenderal VOC dari Batavia Van Imhoff yang semakin memperkeruh suasana (Moedjanto, 1994:12).

Kedatangan Van Imhoff sebenarnya adalah mengurus kepentingan VOC tentang hak atas pesisir Pulau Jawa sebagai bagian dari perjanjian dengan Pakubuwono II pada tahun 1743. VOC mempunyai hak atas daerah yang sempit di sepanjang wilayah pesisir dan semua sungai yang mengalir ke laut. Namun yang diinginkan oleh VOC lebih dari itu. VOC berkeinginan menguasai seluruh pelabuhan di wilayah pesisir. Akhirnya Pakubuwono II terpaksa mengabdikan keinginan VOC dengan uang sewa sebesar 20.000 real per tahun. Padahal biasanya para pejabat sjahbandar akan setor ke Kerajaan sebesar 94.176 real pertahun. Jadi jumlah yang disepakatai oleh VOC itu sangat sedikit dan merugikan Kerajaan. Ketika Pakubuwono II memberitahukan hal ini kepada para penasehat dan pangeran, sebagian besar dari mereka tidak setuju termasuk Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi beranggapan bahwa Raja terlalu lemah di bawah tekanan VOC. Ketidaksetujuan Mangkubumi itu menyebabkan ketidaksukaan Van Imhoff kepadanya. Maka, dalam kasus pemberian wilayah Sukowati kepada Mangkubumi, Van Imhoff sependapat dengan Patih Pringgalaya mendesak hal itu jangan diserahkan. Dalam suatu *paseban* di istana, Van Imhoff mengkritik secara langsung Mangkubumi yang menganggapnya terlalu

ambisius dan tidak tahu berterima kasih kepada Raja Kecamatan Van Imhoff di muka umum itu sangat menyinggung Pangeran Mangkubumi yang memicu lahirnya pemberontakan besar di Keraton Surakarta pada Mei 1746 (Ricklefs, 2005: 218-219).

Setelah peristiwa paseban itu, pada malam harinya Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya meninggalkan Surakarta menuju Sukawati bergabung dengan pasukan Raden Mas Said melancarkan pemberontakan. Alasannya karena Raja ingkar janji dan Belanda yang dianggap *murang* tata atau kurang ajar. Kolaborasi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dalam waktu yang singkat mendapatkan pengikut yang banyak. Pada tahun 1747, Mangkubumi memimpin pasukan yang diperkirakan 13.000 prajurit, termasuk diantaranya 2.500 prajurit kavaleri. Pada tahun 1748, Mangkubumi dan Raden Mas Said menyerang Surakarta, kendati pun tidak berhasil merebut kota itu. Pada saat ini pasukan VOC dan Kerajaan dalam keadaan lemah, sehingga tidak dapat mengalahkan pemberontak dan hanya dapat bertahan di Ibu Kota Negara (Ricklefs, 2005: 219).

Di tengah pemberontakan itu, pada penghujung 1749, Pakubuwono II jatuh sakit. Gubernur Jenderal VOC yang baru yakni Von Hohendorff (1748-54), utusan VOC yang membantu Pakubuwono II merebut kekuasaannya kembali di Kartsura, berangkat ke Surakarta untuk mengawasi berlangsungnya pergantian kekuasaan. Bertemu dengan kawan lama, Pakubuwono II mengusulkan agar Von Hohendorff sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan atas negara. Maka, dibuatlah perjanjian dengan VOC yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang menyerahkan kedaulatan atas seluruh kerajaan kepada VOC. Raja wafat sembilan hari kemudian. Pada 15 Desember 1749, Von Hohendorff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III (1749-88). Pada waktu bersamaan, Pangeran Mangkubumi di markasnya Yogyakarta juga dinobatkan

oleh pengikutnya sebagai Susuhunan Pakubuwono tandingan. Sementara, Raden Mas Said sebagai menjabat sebagai Patih Mangkubuminya. Dengan demikian sejak akhir 1949 itu, Jawa terbagi menjadi dua, antara seorang raja pemberontak dan seorang raja yang didukung oleh VOC. Perbedaannya sekarang ialah pemberontak sangat kuat, sedangkan raja dukungan VOC jauh lebih lemah, sehingga pemberontakan sulit dihancurkan (Ricklefs, 2005: 220).

Pada tahun 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Konflik dua pangeran pemberontak itu di satu sisi memperberat VOC namun di sisi lain merupakan peluang VOC untuk menyelesaikan perang berkepanjangan itu. Pada tahun 1754, Gubernur Jenderal Nicolaas Hartingh (1754-61) menawarkan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dijanjikan akan mendapat separoh dari Kerajaan Mataram; mendapatkan separoh dari pembayaran uang sewa 20.000 real tiap tahun; dan VOC bersedia membantu melawan Raden Mas Said. Pakubuwono III tidak dimintai pendapat tentang pembagian kerajaan ini, tetapi dia juga tidak punya pilihan lain kecuali menyetujuinya. Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Ganti ditandatangani dan VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Peristiwa ini disebut sebagai Palihan Nagari. (Ricklefs, 2005: 221).

Pada perjanjian Ganti itu ditetapkan bahwa baik Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan wilayah negara agung di sekitar wilayah Keraton masing-masing sebesar 53.100 karya (bahu atau cacah). Namun untuk daerah-daerah mancanegara atau daerah kekuasaan di luar negara agung, Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan daerah sedikit lebih luas dari pada yang diterima Sunan Pakubuwono III. Kemungkinan karena daerah yang diterima Sultan kurang subur dibandingkan

yang diterima Kasunanan. Daerah-daerah mancanegara yang masuk Kasunanan Surakarta adalah Jagaraga, Panagara, separoh Pacitan, Kediri, Blitar, Ladaya, Srengat, Pace (Nganjuk-Berbek), Wirasaba (Mojoagung) Blora, Banyumas dan Kaduwang. Sementara daerah mancanegara yang masuk Kasultanan Yogyakarta adalah Madiun, Magetan, Caruban, separoh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Kedu, Sela Warung (Kuwu Wirasari) dan Grobogan. Pembagian daerah ini disesuaikan dengan kepentingan VOC dan untuk melemahkan Kasunanan maupun Kasultanan. Dengan wilayah yang terpencar-pencar itu, kedua kerajaan itu tidak dapat mengorganisasikan kekuasaannya secara optimal dan akan selalu terjadi konflik perbatasan diantara dua kerajaan itu (Moedjanto, 1994:13).

Dengan berdirinya Kasultanan Yogyakarta, VOC tinggal menghadapi perlawanan Raden Mas Said masih mempunyai pasukan cukup kuat. Pada Oktober 1755, Mas Said berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, bahkan pada Februari 1756 hampir berhasil membakar istana baru di Yogyakarta. Namun perlawanan Raden Mas Said menjadi semakin berat karena dia melawan tiga kekuatan sekaligus yakni Surakarta, Yogyakarta dan VOC. Akhirnya pada bulan Februari 1757, Raden Mas Said menyerah kepada Pakubuwono III, dan pada bulan Maret pada perjanjian Salatiga, ia resmi mengucapkan sumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta dan VOC. Imbalannya, dia mendapatkan tanah berikut 4000 cacah dari Pakubuwono III dan bergelar menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara I (1757-1795), namun tidak mendapatkan apa-apa dari Hamengkubuwono I. Berakhirnya perlawanan Raden Mas Said, telah membawa kedamaian di Jawa untuk sementara waktu pada kurun waktu 1757-1825 atau sebelum terjadinya Perang Jawa terbesar yang diprakarsai oleh Pangeran Diponegara (Ricklefs, 2005: 223).

Selama masa yang damai itu, masyarakat Jawa mengalami pertumbuhan yang pesat. Jika pada tahun 1755 penduduk di Surakarta dan Yogyakarta hanya sekitar 690.000 jiwa, maka pada 1795 meningkat menjadi 1,4 sampai 1,6 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk di daerah pesisir Jawa dan Madura tidak lebih dari sekitar 380.000 sampai 490.000 jiwa pada tahun 1755, dan pada tahun 1795 mengalami peningkatan hingga mencapai 1,5 juta jiwa. Pada era ini, VOC mengalami kemunduran dan akan gulung tikar yang disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, secara internal VOC telah terjadi penyalahgunaan dan korupsi besar-besaran. Kedua, Belanda kalah perang dengan Perancis, sehingga Kerajaan Belanda diambil alih oleh Napoleon Bonaparte dan membentuk negara boneka di sana sejak 1795. Maka secara resmi pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dan Pemerintah Belanda mengambilalih kekuasaan di Hindia (Ricklefs, 2005: 223).

Pemerintah Belanda benar-benar memanfaatkan situasi persaingan antar tiga kekuatan kerajaan di Jawa Tengah yakni Keraton Kasunanan, Keraton Kasultanan dan Kadipaten Mangkunegaran. Sementara ketiga kerajaan itu juga mengambil posisi yang berbeda-beda terhadap Pemerintah Belanda. Ketiga keraton itu mempunyai sikap politik yang berbeda-beda tergantung kepaiawaian Raja yang memimpin pada masa itu. Secara umum sikap Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Belanda mengalami pasang naik dan surut. Ada beberapa era dimana Raja bersifat akomodatif terhadap Belanda, namun ada beberapa yang lain sangat konfrontatif. Di jajaran Raja Kasunanan Surakarta terdapat Pakubuwono IV (1788-1820) pada mulanya bersifat akomodatif terhadap Pemerintah Belanda, namun pada akhirnya berkomplot dengan Pasukan Sepoy (1814-1815) mencoba melawan Pemerintah Belanda. Namun Gubernur Jenderal Raffles tidak menurunkan Pakubuwono IV, tetapi hanya membuang seorang pangeran yang terlibat dalam gerakan perlawanan itu

(Ricklefs, 2005: 223). Sementara itu, Pakubuwono VI (1823-1830) secara tidak langsung mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro, maka beliau dibuang ke Ambon sampai wafatnya pada 1849 (Ricklefs, 2005: 257).

Dampak dari Perang Diponegoro dan rencana perlawanan Pakubuwono VI ini adalah pengurangan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta hingga hanya sebesar Eks Karesidenan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta menjadi sebesar wilayah DIY sekarang ini (Moejanto, 1994:32). Daerah dua kerajaan itu Kasunanan dan Kasultanan sejak tahun 1799 disebut sebagai *Vorstenlanden*, sementara di luar wilayah itu disebut daerah *Gubermen* (Suhartono, 1991b: 20).

Demikian pula yang terjadi pada Kasultanan Yogyakarta yakni pasang naik dan surutnya hubungan dengan Pemerintah Belanda tergantung dengan karakter Sultan yang berkuasa pada masanya. Pada masa Hamengkubuwono II (1792-1826) hubungan Kasultanan Yogyakarta terhadap Pemerintah Belanda memburuk. Beberapa kali Hamengkubuwono II melakukan perlawanan kepada Pemerintah. Puncak perlawanannya terjadi pada Juni 1812, ketika Inggris didukung oleh 1200 prajurit berkebangsaan Eropa dan Sepoy India yang didukung oleh 800 prajurit Legiun Mangkunegaran berhasil merebut istana Yogyakarta. Kemudian Istana Yogyakarta dirampok, perpustakaan dan arsipnya dirampas, sejumlah uang diambil dan Hamengkubuwono II dimakzulkan dan dibuang ke Penang. Penggantinya Hamengkubuwono III sangat akomodatif terhadap kepentingan Pemerintah Belanda. Pada era inilah muncul perlawanan terbesar dalam sejarah perang di Jawa yaitu Perang Dipanegara (1825-30). Patih Natakusuma yang juga saudara kandung sultan, karena membantu tentara Inggris melawan Hamengkubuwono II mendapatkan hadiah daerah merdeka dengan 4.000 cacah dan dianugerahi gelar Pakualaman I (1813-1829). Berdirinya Pakualaman menegaskan bahwa pemerintah kolonial

telah berhasil merekayasa pembagian Kerajaan Mataram Islam menjadi dua kerajaan senior yakni Kasunanan dan Kasultanan, dan dua kerajaan junior Mangkunegaran dan Pakualaman (Ricklefs, 2005: 250).

Kadipaten Mangkunegaran adalah kekuatan ketiga yang paling akomodatif terhadap kekuasaan Belanda. Sikap ini diambil karena pada mulanya posisi Mangkunegaran yang paling lemah dibandingkan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di mata Belanda. Ketika Raden Mas Said diangkat menjadi Mangkunegaran I terdapat ketidakpastian apakah keturunannya akan dapat meneruskan kekuasaannya. Selain itu, secara politik kekuasaan Mangkunegaran hanya sebagai Adipati jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kasunanan. Di sinilah sikap akomodatif Mangkunegaran dapat dipahami. Bahkan pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels, Mangkunegaran II membentuk "Legiun Mangkunegara" yakni 1150 orang prajurit yang terdiri atas pasukan infanteri, kavaleri dan artileri dibiayai oleh Pemerintah Belanda. Mangkunegaran II mendapatkan pangkat Kolonel dan diberi 10.000 ryksdaalders lebih setiap tahun sebagai gaji. Legiun ini nantinya akan banyak melaksanakan tugas membantu Belanda diantaranya dalam penyerangan Yogyakarta (1812), Perang Diponegoro (1825-30) dan Perang Aceh (1873-4) (Ricklefs, 2005: 244).

Keterlibatan Mangkunegaran membantu Pemerintah Belanda dalam perang-perang itu, menyebabkan posisi tawar politik Mangkunegaran menjadi semakin tinggi. Ini mengakibatkan Mangkunegaran merasa tidak lebih rendah daripada Kasunanan, kecuali dalam hal gelar. Ini yang membedakan dengan Pakualaman yang tetap dibawah kendali Kasultanan Yogyakarta. Karena luas wilayah kekuasaan Pakualaman sangatlah sempit dibandingkan dengan Kasultanan Yogyakarta yakni terdiri atas satu kecamatan dalam kota Yogyakarta dan empat kecamatan di Wilayah Kulon

Progo (Moedjanto, 1994: 32). Sementara itu Pakualaman juga tidak mempunyai pasukan prajuriti yang kuat. Memang pada mulanya Belanda akan mendesaian Pakualaman sama dengan Mangkunegaraan dengan membentuk pasukan prajurit yang bernama Korps Pakualaman yang terdiri atas 100 prajurit kavaleri yang berkembang menjadi 50 prajurit kavaleri dan 100 prajuriti infanteri. Namun tidak seperti Legiun Mangkunegaran, Korps Pakualaman ini tidak pernah mempunyai arti penting dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1892. Sehingga praktis Pakualaman tetap di bawah bayang-bayang kekuasaan Kasultanan (Ricklefs, 2005: 250).

Apalagi ketika Mangkunegaran justru mengembangkan aspek bisnisnya yang dapat memperkuat sumber keuangannya, praktis dari sudut ini Pakualaman jauh lebih maju dari pada Kasunanan. Karena Kasunanan Surakarta tidak pernah terjun dalam bidang bisnis.⁴ Mangkunegaran mengembangkan bisnis dalam bidang perkebunan dengan bantuan Belanda, terutama untuk komoditi kopi dan gula. Pada masa Mangkunegoro IV (1853-81) memperkerjakan orang-orang Eropa untuk memperkenalkan teknik-teknik Eropa dalam mengelola dan mengeksploitasi kekayaan negara, dengan tujuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan ditanamkan kembali. Pada tahun 1857 dan 1877, Mangkunegara IV gagal mendapatkan kembali perkebunan-perkebunannya yang telah disewakan kepada pengusaha Eropa. Namun dia mempunyai pemikiran cerdas, dengan mengganti

⁴ Lihat diskusi dengan BRM Bambang Irawan, Humas Keraton Kasunanan, pada 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Karaton Kesunanan tidak mengelola bisnis apapun selama berkuasa hingga kini. Sementara Mangkunegaran sejak awal berdiri telah mempunyai visi bisnis dengan mengembangkan perkebunan komoditi ekspor dan mempunyai pabrik gula Tasikmadu dan Colomdu. Yang dilakukan Keraton Kasunanan dalam bidang bisnis hanyalah menyediakan fasilitas umum seperti pasar dan tidak mempunyai badan usaha satu pun.

sistem apanage atau tanah lunggu bagi para abdi dalem dan pejabatnya dengan sistem gaji. Tanah-tanah itu tersebut kemudian dikelola Mangkunegaran menjadi perkebunan yang menanam komoditi ekspor yang menghasilkan keuntungan yang besar. Tidak hanya itu, seiring dengan perkembangan teknologi pabrik gula di dunia, Mangkunegaran juga mempunyai dua pabrik gula yakni Tasikmadu dan Colomadu (Suhartono, 1991:20) (lihat Boks 1.1).

BOKS 1.1.

BISNIS KADIPATEN MANGKUNEGARAN

Perkebunan Kopi

Pada tahun 1814, Mangkunegaran telah mulai menanam kopi. Namun dengan adanya Perang Diponegoro (1825-1830), pendapatan kopi Mangkunegaran menurun. Namun pada masa Mangkunegoro IV, bisnis kopi mengalami perkembangan yang pesat. Kalau sebelum tahun 1864 hasil kopi Mangkunegaran hanya 2.787 kwintal, tujuh tahun kemudian hasil kopi telah mencapai 10.957 kwintal. Pada tahun 1881 atau akhir Mangkunegoro IV, produksi kopi telah mencapai 20 kali lipat atau sekitar 40.575 kwintal.

Perusahaan Gula

Pada tahun 1861, Mangkunegoro IV mengusulkan kepada Belanda untuk mendirikan pabrik gula. Rencana itu disetujui, dan merupakan orang Jawa pertama yang diizinkan mendirikan pabrik gula. Pembangunan pabrik pertama dilakukan pada Desember 1891 yang diberinama Colomadu. Pembangunan pabrik berasal dari uang Mangkunegaran sendiri, dibantu dari Gubernur dan seorang mayor Tionghoa dari Semarang sebesar f.400.000. Berkat pengelolaan yang baik, pada tahun 1863, dengan tanah 93 ha menghasilkan gula 3.700 kwintal. Pada tahun 1874, Mengkunegaran mendirikan lagi pabrik gula yang diberinama Tasikmadu. Dampak kepemilikan dua pabrik gula itu, Mangkunegara memegang peranan penting dalam mengendalikan produksi gula di Jawa

Sumber: Siswokartono (2005:70-72)

Berdasarkan uraian ini jelas bahwa secara politik posisi Kasunanan lebih diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai pewaris Kerajaan Mataram paling senior. Namun dari sudut yang lain yakni dalam pengembangan bisnis, Mangkunegara jauh lebih maju. Dengan berkembangnya bisnisnya Mangkunegaran mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Surakarta dan sekitarnya. Perkebunan Mangkunegara membentang di berbagai wilayah seperti Karanganyar, Sukowati (Sragen) dan juga Wonogiri. Sementara itu, dua pabrik Gulanya Tasikmadu dan Colomadu merupakan perwujudan modernisasi pada masanya, berada di wilayah Karanganyar. Bisnis Keraton Mangkunegaran ini yang memberikan warna tersendiri dalam evolusi ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya hingga sebelum era kemerdekaan.

1.3 Dinamika Ekonomi

1.3.1 Tranformasi Transportasi Dari Sungai ke Kereta Api

Secara regional Pulau Jawa dibagi menjadi dua kawasan pesisir yakni pesisir utara yang menghadap laut Jawa dan pesisir selatan yang menghadap Samudera Hindia. Pesisir selatan yang menghadap Samudera Hindia tidak dapat didayagunakan secara produktif karena berhadapan dengan samudera yang luas dan ganas.. Ketidakberdayaan menghadapi ganasnya Samudera Hindia itu akhirnya diwujudkan oleh keyakinan orang Jawa terhadap adanya penguasa laut dari selatan yang disebut sebagai Nyai Roro Kidul. Mitologi itu sangat efektif dimanfaatkan oleh Raja-raja Mataram Islam dengan simbol perkawinan antara Raja dengan Nyai Roro Kidul dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Raja (Ricklefs, 2005: 99).

Dari sudut politik perpindahan kekuasaan Demak yang di pesisir utara Pulau Jawa ke Mataram yang berada di pesisir selatan adalah melindungi dari serangan musuh dari utara. Maka jika dilihat dari sudut politik kekuasaan, perpindahan kerajaan Islam ke

selatan ini, tidak lain hanyalah dalam rangka memperkuat pertahanan negara semata. Akan tetapi dari sudut ekonomi, perpindahan itu menghambat perkembangan bisnis, karena di pesisir selatan Pulau Jawa ini tidak memungkinkan adanya aktivitas ekonomi yang produktif. Kapal-kapal niaga tidak dapat merapat di pantai-pantai pesisir selatan, para nelayan juga sangat terbatas sekali dapat memanfaatkan sumber daya kelautannya. Maka, kekuasaan Mataram Islam sebelah selatan ini semakin menyempitkan arti sebagai bangsa bahari yang mempunyai jangkauan luas ke mancanegara seperti masa Sriwijaya, Majapahit dan Demak.

Kerajaan Demak masih mempunyai kekuatan maritim yang kuat. Armada Demak yang dikirim oleh Patih Unus dari Jepara ke Malaka pada bulan Januari 1513 merupakan armada besar yang terdiri seratus kapal, empat puluh jung dan enam puluh lancara. Kapal-kapal itu merupakan "kapal tempur" yang sangat kuat dibandingkan kapal dari daerah lain di Nusantara, karena memang dibuat dari kayu jati yang besar dan kokoh (Lombard, 2005: 94). Sebaliknya pada Mataram kekuatan bahari semakin merosot. Data yang disampaikan Lombart (2005: 96) menegaskan kesimpulan itu. Pada tahun 1820 pelayaran di pantai utara Pulau Jawa, didominasi oleh Belanda (25,6%), Inggris (22,6%), Arab (21,6%) dan Tionghoa (16,7%), sedangkan orang Jawa, Sunda, dan Madura hanya sebesar 7,3%. Namun pada tahun 1850, pelayaran di pantai utara Pulau Jawa didominasi oleh armada-armada Arab (50,7%) dan Tionghoa (28,7%), sedangkan orang Jawa, Sunda dan Madura semakin merosot hingga 3,1%. Ini menunjukkan bahwa semakin sedikit orang Jawa yang melakukan pelayaran di pesisir Pulau Jawa (tabel 1.1).

Tabel 1.1. PersentaseTonase Pelayaran Pantai Utara Pulau Jawa Berdasarkan Etnis

	1820	1830	1840	1850
Total Tonase (dalam last) 1 last= 2 ton	10.844	17.361	17.779	15.503
Indeks	100	160	164	143
Belanda	25,6%	20,9%	21,2%	9,6%
Inggris	22,6%	20,6%	15,7%	9,3%
Bangsa Eropa Lainnya	5,2%	0,5%	0,9%	-
Arab	21,8%	32,5%	31,4%	50,7%
Tionghoa	16,7%	11,6%	25,7%	28,7%
Jawa, Sunda, Madura	7,3%	10,0%	4,6%	3,1%

Sumber: Lombart, 2005: 96

Pada masa Kerajaan Mataram Islam ini semua perdagangan laut di Jawa lenyap. Pulau Jawa meskipun pulau diantara kepulauan nusantara yang lain, namun telah kehilangan kebudayaan maritimnya. Malahan Jawa menjadi lebih terasing jika dibandingkan dengan wilayah lain di Asia. Apalagi Jawa tidak mempunyai hubungan daratan dengan daerah lain, karena terkungkung oleh lautan. Karena hilangnya hubungan laut, maka Jawa kehilangan semua komunikasi dengan negara-negara Asia yang lain. Pada masa itu, Jawa mengalami isolasi yang sangat ekstrim. Pengasingan diri ini merupakan penyebab menguatnya feodalisme aristokratis dengan segala sifat-sifatnya yang negatif. Ini memunculkan tradisi kebangsawanan, sedangkan tradisi ekonomi dan niaga hampir hilang semuanya, berikut ini pendapat Burger (1984: 102) mengenai hal ini:

“Di Jawa, Mataram mengasingkan diri yakni ketika sang Raja melarang rakyat bawahannya melakukan pelayaran. Pada tahun 1700 semua perdagangan laut Jawa lenyap, maka Jawa, walaupun pulau, tidak lagi mempunyai kebudayaan kepulauan dalam arti suatu kebudayaan yang terbuka bagi pengaruh-pengaruh dari laut. Malah Jawa lebih terasing jika dibandingkan suatu bagian benua - karena setelah kehilangan perhubungan laut- benua masih mempunyai hubungan dengan dunia luar melalui daratan. Tetapi Jawa sebagai pulau tidak mempunyai hubungan daratan dengan dunia luar. Justru karena Jawa adalah suatu pulau, maka dengan hilangnya pelayaran, ia menjadi lebih “kontinental” dalam arti lebih terasing dan tertutup dari bagian benua yang lain.”

Untuk membuka akses perdagangan ke dunia luar, Kerajaan Mataram hanya mengandalkan transportasi sungai yang mengarah ke Laut Jawa. Keganansan Samudera Hindia di sebelah selatan Pulau Jawa, sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai jalur transportasi. Maka hanya Laut Jawalah di sebelah utara yang menjadi satu-satunya jalur untuk transportasi dan perdagangan ke dunia luar. Namun, pada kenyataannya sebagian besar sungai-sungai di Pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah adalah sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan dan hanya sedikit sungai yang mengalir dari selatan ke Laut Jawa. Sungai-sungai itu biasanya mengalir dari Laut Jawa ke Samudera Hindia seperti Kali Comal di Pemalang atau Kali Pemali Tegal. Di wilayah selatan sebagian besar sungai juga mengalir dari arah utara ke ke selatan seperti Kali Serayu di Banyumas dan Kali Bogowonto di Magelang. Selain itu, juga terdapat Kali Progo dan Kali Opak yang berada di Yogyakarta yang bermuara di Samudera Hindia. Hanya sedikit sungai yang mengalir dari selatan ke utara yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung transaksi perdagangan. Seperti telah disebutkan di atas, di Jawa Tengah bagian selatan hanya terdapat dua sungai besar yang mempunyai karakteristik sama yaitu mengalir dari selatan ke utara yakni Sungai Tuntang dan Bengawan Sala.

Sungai Tuntang berhulu di Rawa Pening Salatiga di Kaki Gunung Merbabu dan Telomoyo yang melalui Kedung Jati, Gubug, Demak Bintoro bermuara di Laut Jawa. Dalam sebuah cerita tentang Sultan Hadiwijaya salah seorang Raja Demak yang ketika muda dikenal dengan Joko Tingkir karena berasal dari Desa Tingkir Salatiga melakukan perjalanan menuju Demak menunggang kewan buaya melalui sebuah sungai yang besar. Sungai yang mengalir dari arah Salatiga ke Demak adalah Sungai Tuntang. Sementara itu, sungai yang lebih besar dan jangkauannya lebih luas yang mengalir dari selatan ke utara adalah Bengawan Sala. Hulu Bengawan Sala terletak di Pegunungan Seribu (Wonogiri) yang mengalir ke Laut Jawa melalui Bojonegoro hingga Surabaya. Maka, seperti telah disebutkan di atas ketika Pakubuwono II akan membangun Keraton baru terdapat dua alternatif pilihan tempat yakni di Desa Tingkir (Salatiga) yang berdekatan dengan Sungai Tuntang atau di Desa Sala yang berdekatan dengan Bengawan Sala. Dengan pertimbangan bahwa Bengawan Sala menjangkau wilayah yang lebih luas ke Jawa Timur dari pada Sungai Tuntang yang hanya sampai ke Demak, maka Pakubuwono II lebih memilih Desa Sala sebagai Keraton yang baru. Dengan kata lain, pilihan Desa Sala yang berdekatan dengan Bengawan Sala merupakan pertimbangan ekonomis dalam mendukung perkembangan ekonomi kerajaan.

Bengawan Sala sudah menjadi pelabuhan sungai sejak jaman Pajang. Bengawan Sala pada mulanya bernama Bengawan Beton, namun karena untuk menghormati sesepuh desa itu yang bernama Ki Gede Sala, maka menjadi terkenal dengan sebutan

Bengawan Sala. Ki Gede Sala padamulanya adalah abdi dalem Kerajaan Pajang yang bernama Ki Bahu Reksa. Selain sebagai bandar pelabuhan, Ki Baru Reka juga bertugas untuk menyediakan tukang-tukang yang berkerja di Karaton. Raja memanggil Ki Bahu Reksa dengan Ki Soroh, dan karena kebanyakan orang menyebut nama itu dengan salah, maka menjadi Ki Sala. Di sebelah tenggara Desa Sala terdapat Desa Nusupan yang dijadikan sebagai pelabuhan para nakhoda yang berlayar ke Gresik dan Surabaya atau sebaliknya. Hubungan bisnis inilah yang menyebabkan munculnya daerah-daerah perdagangan dan berkembangnya berbagai etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan VOC yang bermukim di sekitar Bengawan Sala ini (Sudharmono, 2006: 10). Maka, dengan ditetapkan Desa Sala sebagai Ibu Kota baru Kerajaan Mataram Islam, Bengawan Sala menjadi semakin ramai dan menjadi urat nadi perekonomian pada masa itu. Meskipun sebenarnya pemanfaatan Bengawan Solo sebagai urat nadi perekonomian hingga menjangkau perdagangan ke daerah lain di luar Jawa tidak berkembang seperti yang diharapkan. Terutama karena memang adanya ketentuan dari Pemerintah Kolonial yang melarang orang-orang Jawa berdagang ke luar Jawa sejak perjanjian Pakubuwono II dan VOC pada tahun 1745.

Dalam perkembangannya transportasi sungai itu tidak berlangsung lama, terutama setelah Pemerintah Belanda membangun jalur kereta api. Pada tahun 1870 jalur kereta api pertama dari Semarang sampai ke *Vorstenlanden* yang dikelola oleh perusahaan swasta *Nederlandsch Indische Spoorweg* (NIS) untuk mengangkut gula yang dihasilkan perkebunan tebu swasta di Surakarta dan Yogyakarta. Beberapa tahun setelah munculnya jalur kereta api itu, pengangkutan barang melalui Bengawan Sala terhenti. Ini menyebabkan pusat perdagangan berpindah dari Sangkrah dan Beton ke bagian tengah Kota Surakarta. Dalam perkembangannya

kereta api tidak hanya membawa komoditi-komoditi, melainkan juga mengangkut penumpang. Pada tahun 1875, kereta api telah mengangkut 899.000 penumpang dan 124.000 ton barang dagangan dan memperoleh penghasilan sebanyak 2 juta gulden. Pada 1875, kereta api mampu mengangkut 950.000 penumpang dan 334.000 ton barang dagangan yang menghasilkan 2,6 juta gulden. Pada tahun 1894, jalur timur yang dikelola perusahaan negara *State Railway* (SS) mencapai Surakarta yang menghubungkan *Vorstenlanden* dengan Surabaya (Shiraishi, 1997:10-11).

Berdasarkan data tersebut jelas bahwa angkutan kereta api memasuki abad ke-20 telah menggantikan transportasi sungai. Ini pertanda bahwa masyarakat Jawa telah masuk pada abad modernisasi angkutan, dimana angkutan pra moderen yang diwakili oleh transportasi sungai digantikan oleh transportasi darat menggunakan kereta api. Fungsi Bengawan Sala yang pada mulanya menjadi sangat sentral sebagai urat nadi perekonomian wilayah Surakarta, berubah drastis hanya sebagai alat pengairan sawah. Bahkan karena maraknya penebangan pohon di hutan-hutan di Pegunungan Seribu (Wonogiri), Bengawan Sala menjadi penyebab utama banjir besar yang melanda Surakarta dan sekitarnya pada tahun 1960-an yang nanti akan diuraikan pada bab berikutnya.

BOKS 1.2
PERKEMBANGAN KERETA API DARI TIMUR-BARAT DAN SEMARANG KE VORSTENLANDEN

Jalur kereta api yang melalui timur-barat dan Semarang ke *Vorstenlanden* yang dilayani oleh NIS dan SS mengalami peningkatan pesat baik dari jumlah kilometer dan jumlah penumpang (lihat tabel 3.1). Pada tahun 1895 angkutan kereta api melalui timur-barat dan Semarang-*Vorstenlanden* telah berhasil membuat jalur sepanjang 1.319 kilometer, kemudian mengalami peningkatan masing-masing menjadi 1.609 km (1900); 1.704 km (1905); 2.174 km (1910); 2.448 km (1915). Dengan peningkatan jumlah penumpang yang sangat tinggi, jika pada tahun 1895 mencapai sebesar 5,759 juta penumpang mengalami kenaikan masing-masing menjadi 9,738 juta (1900); 13,361 juta (1905); 28,420 juta (1910); 42,479 juta (1915). Penghasilan dari angkutan penumpang mencapai 3,054 juta gulden pada tahun 1895 meningkat menjadi 4,022 juta (1900); 4,979 juta (1905); 8,625 juta (1910); dan 13,685 juta (1915). Sementara penghasilan dari angkutan barang mencapai 6,588 juta gulden pada tahun 1895, dan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 9,743 juta (1900); 10,216 juta (1905); 15,738 juta (1910); 22,194 juta (1915).

Tabel 1.2. Transportasi Kereta Api Melalui Jalur Timur Barat dan Semarang-Vorstenlanden

Tahun	Kilometer	Penumpang	Penghasilan Dari (dalam juta gulden)	
			Penumpang	Barang
1895	1.319	5.759.000	3,054	6,588
1900	1.609	9.738.000	4,022	9,743
1905	1.704	13.361.000	4,979	10,216
1910	2.174	28.420.000	8,825	15,738
1915	2.448	42.579.000	13,685	22,194

Sumber: Shiraiishi, 1997:11.

1.3.2 Transformasi dari Pertanian, Perkebunan Ke Industri Gula

Evolusi ekonomi kota Solo dimulai pada akhir abad ke 16, ketika ekonomi kerajaan Pajang berkembang dengan daya dukung produksi pertanian dari daerah kerajaan Pajang sebelah selatan (B.Schrieke, Vol 1, 1960). Pajang merupakan kerajaan pedalaman yang merupakan penghalusan budaya (*refined culture*) Jawa dan bersaing dengan kerajaan Demak sebagai kerajaan pantai. Kondisi bekas kerajaan Pajang saat ini, menjadi sebuah kelurahan di pemerintahan Kota Surakarta (Pemkot Surakarta) yaitu berupa Kalurahan Pajang. Sebagian nama-nama kampung di Kalurahan Pajang masih menunjukkan bekas kerajaan. Pasar tradisional tempat jual beli produksi pertanian masa kerajaan Pajang, diperkirakan terletak di jalan pertigaan Jongke saat ini (daerah Laweyan sebelah barat). Hasil produksi pertanian utama masa Pajang adalah beras.

Pada saat kerajaan Pajang dihancurkan oleh Panembahan Senopati, seorang pendiri Kesultanan Yogyakarta dengan menjadikan alas Mentaok (hutan Mentaok) sebagai wilayah kerajaan Mataram, maka produksi pertanian daerah Pajang menjadi wilayah kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede. Setelah itu, pusat kerajaan berpindah ke Kartosuro sebagai pusat kraton yang baru. Kerajaan Kartosuro tetap berbasis pertanian sampai kerajaan itu pindah ke Surakarta pada abad ke 18. Sejak Kerajaan Surakarta berdiri, selama abad ke 18, ekonomi pertanian tetap menjadi kekuatan ekonomi kerajaan Surakarta yang pada abad ke 19 lebih tertata sistem manajemennya. Pola sistem yang tertata ini ditunjukkan dengan adanya sistem lungguh (*apanage*) yaitu suatu sistem gaji berupa tanah bagi pegawai kerajaan dan kerabat raja. Luas lungguh ini tergantung pangkat, posisi/kedudukan seorang bagsawan/priyayi.

Kebebasan menyewakan atau menjual tanah *apanage* ini, dimulai ketika sistem uang masuk ke dalam sistem ekonomi pertanian yang bersifat pengabdian feodal. Akibatnya orang Eropa dan Timur Asing, terutama orang Tionghoa ikut membuka usaha di sektor perkebunan. Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta yang masing-masing terdiri dari Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Wilayah itu oleh orang Eropa disebut *Vorstenlanden* (daerah kerajaan). Pada saat sistem tanam paksa sebagai kebijakan ekonomi kolonial di Jawa abad ke 19, daerah *Vorstenlanden* tidak dimasukkan pada wilayah sistem tanam paksa ini (Robert Van Niel, 2003). Hal ini karena sistem *apanage* dianggap akan mempersulit kolonial untuk mengurusnya dalam manajemen pemerintahannya.

Ekonomi daerah *Vorstenlanden* (Solo dan Yogyakarta) mengalami kesulitan setelah perjanjian Palihan Negari tahun 1755, dimana wilayah Kasunanan Surakarta termasuk kota Solo dan Kasultanan Yogyakarta berdiri secara terpisah. Dari segi kewilayahan administrasi, banyak pegawai diangkat oleh pemerintahan kerajaan dengan gaji sistem *apanage*. Kelemahan sistem ini adalah akan mempersulit dari sudut ekonomi pedesaan, yaitu ketika tanah-tanah *apanage* ini ada yang terletak di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini merupakan taktik Belanda untuk memecah belah kekuatan politik Kasultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta (Solo), sekaligus menghancurkan sistem ekonomi pedesaan disekitar pusat kraton Solo dan Yogyakarta.

Kehidupan ekonomi pedesaan sekitar pusat Kraton Solo dapat dilihat dari pola penghasilan dan pengeluaran petani sikep (kuli sikep), kuli kendho, kuli indung dan kuli tlosor. Para petani ini membentuk ikatan sosial yang mewujudkan solidaritas sosial agar ekonomi pedesaan dapat dipertahankan. Hasil tanah yang

digarap petani menghasilkan produksi yang rendah, karena mereka mengakui adanya konsep bahwa tanah itu milik raja (*Vorstendomein*). Sistem ini mengharuskan petani menyerahkan beberapa unsur sesuai dengan pengabdian feodal, seperti tenaga kerja wajib, tenaga kerja sewaktu raja mempunyai hajat, upeti hasil bumi, pajak (masa kolonial) dan lain-lain.

Keadaan ekonomi pedesaan daerah *Vorstenlanden* Surakarta seperti daerah Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Boyolali menjadi relatif sulit setelah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah yang memakan waktu dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Masyarakat yang tinggal di kota Solo dan daerah-daerah pedesaan sekitarnya mengalami kesulitan mencari penghasilan (uang). Sebuah "surat kabar perdagangan" yang terbit di Surabaya menyebutkan bahwa daerah Surakarta merupakan daerah miskin. Orang kebanyakan atau rakyat tidak lagi mempunyai uang untuk membeli bahan makan dan pakaian. Kajian di atas didukung dengan disertasi Suhartono tentang "apanage dan bekel" untuk melihat perubahan sosial dan gambaran ekonomi pedesaan di pedesaan Surakarta 1839-1920. Disertasi tersebut menjelaskan bahwa panen yang gagal dan kenaikan harga barang-barang menyulitkan para petani daerah Surakarta untuk hidup.

Kondisi masyarakat Jawa semakin terpuruk ketika Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Tanam paksa diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Ia mempergunakan desa-desa di Jawa untuk memproduksi komoditi-komoditi yang mudah diekspor ke luar negeri. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang dikehendaki oleh pemerintah. Beberapa komoditi yang diwajibkan untuk ditanam adalah kopi, tebu, teh, tembakau, kayu manis, kapas dan nila (indigo). Hampir semua wilayah di Jawa terkena kebijakan tanam paksa, kecuali daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta

(*Vorstenlanden*). Misalnya untuk tanaman kopi banyak terkonsentrasi di Priangan dan Cirebon. Sementara untuk tebu sebagai bahan baku gula terdapat di Banten, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Rembang, Banyumas, Mediu, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Kediri dan Banyuwangi. Dampak dari tanam paksa sangatlah buruk bagi petani di Jawa. Para petani mengalami kemiskinan bahkan di Jawa Tengah pada tahun 1849-1850 terjadi bencana kelaparan, karena berkurangnya bahan pangan sebagai akibat kegagalan panen dan merosotnya daya beli masyarakat. Maka mulai tahun 1870, tanam paksa mulai dikurangi dan baru tahun 1915 tanam paksa dihentikan sama sekali (Burger, 1984: 198-224) (lihat Boks 3).

BOKS 1.3.

TANAM PAKSA (CULTUURSTELSEL)

Dalam rangk mensukseskan sistem tanam paksa Van den Bosch mengadakan cara-cara efisien untuk mendorong para pegawai mensukseskan perkebunan-perkebunan pemerintah dan merangsang mereka untuk memperbesar jasa yaitu dengan cara yang disebut dengan sistem persentase. Memang benar, tindakan-tindakan tersebut adalah cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan, akan tetapi ini menjadi sumber perbuatan semena-mena. Sistem ini dianggap sebagai legalisasi pemerintah koloniah terhadap segala macam pemerasan. Beberapa bentuk pemerasan itu adalah mewajibkan tanaman tertentu kepada petani dengan jalan mencoba-coba; adanya kerja tambahan disamping menyelenggarakan tanaman wajib; pajak-pajak dan kerja wajib tetap dibebankan kepada masyarakat. Ini jelas bahwa penerapan tanam paksa adalah didominasi oleh motif ekonomi.

Hasil tanam paksa adalah menaikkan penghasilan Negeri Belanda. Antara tahun 1831-1877, Belanda menerima kekayaan sebesar 823 juta gulden. Ini mengembalikan kembali masa kejayaan Belanda pada masa keemasan VOC sebagai negara yang disegani dalam bidang perdagangan. Kritik terhadap sistem tanam paksa mulai muncul pada tahun 1848 baik di parlemen ataupun oleh sekelompok penulis, pegawai, menteri, sebagian besar kolonialis kawakan. Salah seorang pegawai, Douwes Dekker, menuliskan kekejaman era ini dalam bukunya yang sangat terkenal Max Havelaar. Kritik-kritik semacam ini yang mendorong adanya perubahan, hingga pada akhirnya sistem tanam paksa dibatalkan secara gradual sejak 1870.

Sumber: Kartodirdjo (1999: 16).

Di dalam wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta tidak diberlakukan tanam paksa. Sebaliknya yang berkembang di daerah ini adalah sewa lahan oleh pihak swasta. Persewaan tanah ini berhubungan erat dengan kebijakan yang digariskan oleh Keraton. Karena sebagai kerajaan agraris, Mataram mempunyai sistem pemerintahan yang relatif teratur berdasarkan pada mekanisme tanah kerajaan. Dalam konsep ini, pada dasarnya seluruh tanah kerajaan adalah milik raja. Karena status dan perannya, maka famili dan birokrat kerajaan mendapatkan *lungguh* atau sebidang tanah untuk dikelola yang dimaksudkan sebagai balas jasa telah mengabdikan kepada Kerajaan. Abdi Kerajaan yang mendapatkan *lungguh* itu disebut sebagai *patuh*. *Lungguh* ini dapat diasosiasikan sebagai upah seorang abdi kepada Kerajaan (Suhartono, 1991: 16-18).

Dalam perkembangannya mulai tahun 1816, *lungguh* itu disewakan kepada orang Belanda dan Tionghoa untuk mengembangkan perkebunan. Kendati pun pada masa ini perkebunan swasta dapat berkembang, seperti ditunjukkan dengan adanya sejumlah orang Tionghoa dan Eropa menyewa tanah dari penguasa dan para pemegang *lungguh*, akan tetapi sampai dengan tahun 1850 yang disewa masih relatif kecil. Tanah-tanah itu hanya ditanami padi, sayuran dan buah-buahan hanya untuk konsumsi lokal saja (Shiraishi, 1997: 12).

Seiring dengan semakin mengalirnya modal swasta Belanda ke Surakarta dan Yogyakarta, Pemerintah melarang orang Tionghoa menyewa tanah, namun membiarkan modal swasta Belanda membanjiri daerah ini. Maka, pada periode setelah tahun 1850, pemilik perkebunan swasta Belanda mengalami peningkatan pesat. Jika pada tahun 1855, di Surakarta, perkebunan Eropa baru sekitar 30.000 bau, maka pada tahun 1860 telah meningkat hingga 160.000 bau, dan pada tahun 1864 mencapai 200.000 bau. Sementara, di Yogyakarta, kendatipun agak lambat, tetapi

perkebunan Eropa mengalami perkembangan yang pesat. Misalnya di Surakarta pada 1870 ada 137 perkebunan, dimana 73 menanam kopi atau kombinasi dengan beberapa tanaman lain, 31 diantaranya menanam tebu, 30 indigo dan 19 tembakau. Pada tahun yang sama, hanya ada 58 perkebunan di Yogyakarta, diantaranya 46 menanam indigo, 8 tebu dan 6 tembakau. Sampai dengan tahun 1880, tanah yang disewa orang Eropa untuk perkebunan meningkat pesat hingga 301.000 bau di Surakarta dan 88.000 bau di Yogyakarta (Shiraishi, 1997: 12).

Resesi ekonomi terjadi pada pertengahan tahun 1880-an menjadi anti klimaks bagi perkebunan pengusaha Eropa di Surakarta. Ini menyebabkan penyewaan tanah di Surakarta sejak tahun 1880 mengalami penurunan. Jika pada tahun 1880 sebanyak 301.000 bau, maka mulai tahun 1890 merosot menjadi 259.000 bau. Pada tahun 1905 mengalami peningkatan sedikit yakni mencaia 273.000 bau, namun setelah itu mengalami komrosotan terus menerus yakni 246.000 (1895). 246.000 (1900) dan menjadi 214.000 (1915) serta 183.000 (1920) (lihat tabel 1.3).

Pada masa sebelum resesi tahun 1930an, sebagian besar pengusaha itu mendapatkan modal dari bank perkebunan (*Culture Bank*) yakni *Dorrepaal Co.* Pada tahun 1884, bank tersebut membiayai 21 perkebunan tebu, 38 perkebunan kopi dan 53 perkebunan komoditi lainnya. Mereka mengerjakan perkebunannya secara sendiri-sendiri atau individual, dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Sebagian dari tanaman tebu untuk menjadi gula masih diolah dengan cara yang sangat sederhana. Karena mutunya kurang bagus, akhirnya mereka lebih mengutamakan menanam indigo (nila) dari pada tebu. Ini menyebabkan produktivitas perkebunan mereka semakin merosot. Mereka juga sangat mudah dipengaruhi oleh kenaikan tingkat suku bunga dan naik turunnya harga komoditi. Maka, resesi ekonomi menyebabkan banyak perusahaan yang dikelola secara mandiri itu jatuh yang berdampak

pada pailitnya Bank Dorrepaal Co pada tahun 1884. Pemerintah mengubah bank tersebut menjadi Dorrepaalsche Bank dan direkonstruksi kembali menjadi Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden (Perusahaan Perkebunan Vorstenlanden) yang mengawasi sejumlah perkebunan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Bank-bank tersebut mulai melakukan pembenahan manajerial kepada perusahaan perkebunan Eropa itu serta melakukan pengawasan yang ketat. Sementara pengelolaan perkebunan diserahkan kepada manajer-manajer perkebunan yang berpengalaman (Shiraishi, 1997: 14).

Tabel 1.3. Tanah Yang disewahkan kepada Perkebunan Eropa di Surakarta dan Yogyakarta 1875-1920 (dalam bau)

Tahun	Surakarta	Yogyakarta
1862	-	46.000
1864	200.000	-
1875	248.000	78.000
1880	301.000	88.000
1890	259.000	93.000
1895	273.000	93.000
1900	246.000	89.000
1905	245.000	85.000
1910	235.000	95.000
1915	214.000	97.000
1920	183.000	102.000

Ket: 1 bau = 0,71 Ha

Sumber: Sumber: Shiraishi, 1997:14

Resesi ekonomi juta menyebabkan beberapa komoditi mengalami kemerosotan terutama kopi dan indigo, sementara justru tembakau dan gula mengalami peningkatan. Ini menyebabkan perkebunan berkonsentrasi untuk mengembangkan komoditi tembakau dan gula.⁵ Apalagi setelah Konvensi Brussels tahun 1902 yang membuka pasaran dunia bagi gula tebu. Oleh sebab itu, banyak lahan yang disewakan mulai dikembalikan atau diubah penggunaannya dari perkebunan indigo menjadi tembakau dan gula tebu. Ini menunjukkan bahwa resesi ekonomi telah mendorong adanya transformasi dari perkebunan barang-barang pertanian menjadi perkebunan yang mendukung sektor industri terutama industri rokok dan gula tebu.

Tabel 1.4. Produksi Gula dan Tembakau di Vorstenlanden 1880-1910

Tahun	Gula (dalam ribuan pikul)		Tembakau (dalam ton)	
	Surakarta	Yogyakarta	Surakarta	Yogyakarta
1880	198	277	805	49
1890	332	475	1053	17
1900	725	865	5717	1520
1910	1215	1687	6421	1855

Ket: 1 pikul = 61,76 kilogram

Sumber: Sumber: Shiraishi, 1997:14

⁵ Industri gula menjadi industri primadona di Pulau Jawa mulai tahun 1830. Pada mulanya sudah ada pabrik-pabrik gula yang menggunakan tenaga hewan ternak yang menggunakan batu gerinda dan bangunan pabriknya masih terbuat dari kayu. Secara umum dengan teknologi sederhana ini, hasil produksinya masih jelek dan kualitasnya tidak seragam. Mulai paruh 1830, Pemerintah Belanda memberikan subsidi pabrik-pabrik gula untuk menggunakan tenaga air. Baru pada tahun 1855, 18 pabrik gula di daerah Surabaya sekitar 60% menggunakan tenaga uap (Dick, 2000: 181-182).

Di Surakarta produksi gula meningkat dari 332.000 pikul pada tahun 1890 dari sebelumnya hanya 198.000 pikul pada tahun 1880. Pada tahun 1900, produksi gula mengalami peningkatan menjadi 725.0000 pikul dan menjadi 1215.000 pikul pada tahun 1910. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta, produksi gula di Surakarta masih kalah jauh (lihat tabel 3.3), karena pada tahun yang sama produksi gula di Yogyakarta masing-masing adalah 277.000 pikul (1880); 475.000 pikul (1890); 865.000 pikul (1900); dan 1.687.000 pikul (1910). Sementara untuk produksi tembakau, Surakarta jauh melebihi Yogyakarta. Pada tahun 1880 produksi tembakau di Surakarta telah mencapai 805 ton, sementara di Yogyakarta hanya sekitar 49 ton. Di Surakarta produksi tembakau mengalami peningkatan yang pesat yakni masing-masing 1.053 ton (1890); 5.717 ton (1900); dan 6.421 ton (1910). Sementara di Yogyakarta, pada tahun 1890 hanya sekitar 17 ton, namun setelah itu mengalami peningkatan yang pesat menjadi 1.520 ton (1900) dan 1.855 ton (1910) (lihat tabel 1.4).

Sementara itu, produksi tembakau dan gula di wilayah Eks Karesidenan Surakarta paling besar di daerah Klaten. Pada tahun 1890, produksi tembakau di daerah Klaten baru sekitar 950 ton, namun pada tahun 1900 telah meningkat menjadi hampir lima kalinya yakni mencapai 4.454 ton, kemudian pada tahun 1910 menjadi 5255 ton. Peringkat kedua sebagai produsen terbesar tembakau adalah Surakarta yakni jika pada tahun 1890 hanya sekitar 11 ton, maka pada tahun 1900 dan 1910 masing-masing menjadi 614 ton dan 839 ton. Di Sragen, pada tahun 1890 produksi sebesar 54 ton, terus mengalami peningkatan pada tahun 1900 dan 1910 masing-masing mencapai 306 ton dan 121 ton. Di Boyolali, produksi tembakau pada tahun 1890 hanya sekitar 35 ton meningkat pada tahun 1900 dan 1910 masing-masing menjadi 295 ton dan 200 ton. Yang paling kecil produksi tembakau terdapat di Wonogiri, yakni pada tahun 1890 hanya sekitar 3 ton, meningkat

menjadi 49 ton pada tahun 1900, dan menurun lagi menjadi 6 ton pada tahun 1910 (tabel 1.5).

Tabel 1.5. Produksi Gula dan Tembakau di Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Mangkunegaran 1890-1910.

	Surakarta	Boyolali	Klaten	Sragen	Wonogiri	Mangkunegaran
Gula (dalam ribuan pikul)						
1890	-	103	203	26	-	48
1900	66	41	520	98	-	102
1910	91	112	829	183	-	195
Tembakau (dalam ton)						
1890	11	35	950	54	3	
1900	614	295	4454	306	49	
1910	839	200	5255	121	6	

Sumber: Sumber: Shiraishi, 1997:14

Seperti halnya dalam produksi tembakau, produksi gula terbesar juga berada di daerah Klaten. Untuk produksi gula di Klaten pada tahun 1890 mencapai 203.000 pikul meningkat menjadi 520.000 pikul (1900) dan 829.000 pikul (1910). Urutan kedua ditempati oleh Mangkunegara yang mempunyai dua pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu yakni pada tahun 1890 baru memproduksi 48.000 pikul menjadi 102.000 pikul pada tahun 1900 dan 195.000 pikul pada tahun 1910. Urutan berikutnya di daerah Sragen yang masing-masing adalah 26.000 pikul (1890); 98.000 pikul (1900); dan 183.000 pikul (1910). Di daerah Boyolali produksi gula tebu juga cukup bagus yakni masing-masing 103.000 pikul (1890); 41.000 pikul (1900); dan 112.000 pikul (1910). Produksi gula paling rendah adalah di daerah Surakarta yakni hanya 66.000 pikul (1900) dan 91.000 pikul (1910) (lihat tabel 3.5). Hingga tahun 1915 masih terdapat sekitar 98 perkebunan di

Eks Karesidenan Surakarta yang terbagi pada daerah Surakarta (10); Klaten (35); Boyolali (18); dan Sragen (35) (lihat tabel 1.6).

Tabel 1.6. Perkebunan Swasta Eropa di daerah Surakarta tahun 1915

No	Kabupaten	Jumlah Perkebunan	Jenis Tanaman
1	Surakarta	10	tembakau, indigo, gula, kopi dan agave
2	Klaten	35	tembakau, indigo, gula, agave
3	Boyolali	18	tembakau, kopi, indigo, lada, karet, kapas
4	Sragen	35	kopi, indigo, karet, teh, gula, agave, kapas
5	Jumlah	98	

Sumber: Liyst van Particuliere Ondermeringen in Nederlandsch-Indie. Batavia, Landsdrukkerij 1915 hal:206-210

Dari uraian di atas, jelas bahwa pada era ini telah terjadi proses transformasi dari tanaman rakyat seperti beras, dan kebutuhan pokok lain menjadi tanaman perkebunan seperti indigo, kopi, tembakau dan tebu. Seiring dengan semakin besarnya peningkatan permintaan gula dan didukung dengan adanya pabrik yang moderen, maka terjadi proses transformasi dari sektor perkebunan ke sektor industri. Perubahan itu membawa konsekuensi terhadap penyerapan tenaga kerja pada masyarakat sekitar pabrik. Ini merupakan persentuhan pertama, bagi masyarakat Jawa terhadap mekanisme industri moderen. Di sini masyarakat mengenal pengertian ”buruh” atau pekerja pabrik, yang sebelumnya tidak pernah dikenalnya pada masa agraris.

1.3.3 Munculnya Industri Kecil

Sejak abad-12, pada masa Kerajaan Majapahit, masyarakat Jawa telah mengenal batik. Seni batik berasal dari India, masuk ke tanah air bersamaan dengan masuknya kebudayaan Hindu yang berhasil menurunkan silsilah Kerajaan Hindu di Nusantara. Itulah sebabnya mengapa batik pada mulanya hanya dikenal di dalam lingkungan keraton saja. Bahkan situasi ini, tidak mengalami perubahan sampai pertengahan abad 19 pada masa awal Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Ini disebabkan karena pembuatan batik masih dipandang sebagai pekerjaan individual para ahli yang membutuhkan waktu pembuatan yang relatif lama. Atau dengan kata lain, pada masa ini batik masih dianggap sebagai barang mewah (LPEM, 1958:235).

Perkembangan industri batik di Kota Solo juga dimulai dari kegiatan para istri bangsawan dan priyayi yang membatik dengan corak batik tulis tangan sebagai cara pengembangan seni batik. Hasil batik tulis ini kemudian berkembang menjadi komoditi batik yang mampu bersaing dengan batik-batik dari India, Bali, Lasem pada abad ke 19. Pada awalnya, batik tulis ini dibuat hanya untuk konsumsi keluarga priyayi saja, terutama dalam acara adat, seperti perkawinan. Batik dalam acara tersebut, memiliki corak dan jenis yang disesuaikan dengan pangkat, gelar dan lainnya dan pada masa kolonial Belanda diatur dengan *besluiten* (surat-surat keputusan). Kain batik menjadi salah satu bagian dari pakaian resmi dan perlengkapan upacara kebesaran priyayi (Sartono Kartodirdjo, 1993). Bahkan di Keraton Surakarta, seni membatik sangat dihargai sehingga kemampuan membatik dianggap bagian penting dari pendidikan perempuan di Keraton (Shiraishi, 1997: 30).

Batik baru menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat pada pertengahan 1840, ketika pedagang batik Kauman mengenal metode baru membatik yang menggunakan cap. Cap yang terbuat

dari tembaga itu mampu membuat batik dalam jumlah yang banyak dengan tenaga kerja yang sedikit. Mulai dari sinilah produksi batik yang bersifat massal terjadi di Surakarta. Dengan semakin meningkatnya penghasilan dari sektor perkebunan permintaan terhadap bati semakin meningkat. Meminjam istilah Shiraiishi (1997:32), pada era ini Surakarta merupakan pusat utama industri batik dan mendominasi pasar lokal dan nasional sampai akhir tahun 1910-an.

Sementara itu, kondisi di kota Surakarta memperlihatkan bahwa batik tulis yang semula menjadi monopoli keluarga bangsawan dan priyayi, mulai bergeser dikerjakan orang Tionghoa sejak tahun 1890-an, dan pengrajin pribumi. Pada waktu pasaran batik sudah menjangkau pasar-pasar di seluruh Jawa, orang Tionghoa menguasai perdagangan bahan-bahan batik seperti berbagai jenis sog, dan kain katun (Suhartono, 1991). Kendati pun demikian, jumlah pengusaha batik pribumi di Jawa Tengah pada umumnya dan Surakarta pada khususnya tetap mendominasi. Jumlah pengusaha batik pribumi jauh lebih banyak dari pada pengusaha entis lain. Berdasarkan data tahun 1931, jumlah pengusaha batik di Jawa yang paling banyak adalah di Jawa Tengah yakni mencapai 2,347 perusahaan, sedangkan di Jawa Barat terdapat 1,757 perusahaan, dan di Jawa Timur hanya 280 perusahaan. Dari sudut etnis, jumlah pengusaha batik pribumi di Jawa Tengah mencapai 1,804 perusahaan, sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing adalah 1,472 dan 239 perusahaan. Sementara itu, pengusaha batik Tionghoa yang terbanyak adalah di Jawa Tengah mencapai 418 perusahaan, sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing adalah 282 dan 24 perusahaan. Pengusaha batik Arab hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing adalah 113 dan 17 perusahaan. Demikian halnya pengusaha batik Eropa hanya terdapat di Jawa Tengah yakni hanya sekitar 12 perusahaan.

Tabel 1.7. Pemilik Perusahaan Batik Berdasarkan Etnis di Jawa tahun 1931

Daerah	Pribumi	Tionghoa	Arab	Eropa	Total
Jawa Barat	1,472	282	-	-	1,757
Jawa Tengah	1,804	418	113	12	2,347
Jawa Timur	239	24	17	-	280
Total	3,515	727	130	12	4,384

Sumber: Sutter (1959: 47)

Berdasarkan data tahun 1930, orang pribumi tetap mendominasi jumlah kepemilikan perusahaan batik di Surakarta mencapai 236 perusahaan. Sementara sisanya dimiliki oleh orang Arab (88); Tionghoa (60); dan Eropa (3) (lihat tabel 3.7). Selain itu, di Kota Surakarta mulai berkembang berbagai kerajinan seperti kerajinan kuningan untuk bokor, kerajinan emas dan kuningan untuk pendhok keris dan kerajinan perak. Hasil kerajinan itu dijual dipasar-pasar dan kerajaan menarik pajak penjualan. Hal itu ditunjukkan dengan pemasaran batik Surakarta telah menembus pasar-pasar di Yogyakarta dan Priangan (Jawa Barat). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerajinan batik di kota Solo sudah terkenal di pasar-pasar di luar kota Surakarta.

Tabel 1.8. Pemilik Perusahaan Batik di Surakarta 1930.

No	Pemilik Perusahaan	Jumlah
1.	Jawa (pribumi)	236
2.	Tionghoa	60
3.	Arab	88
4.	Eropa	3

Sumber: Sariyatun, 2005:140

1.3.4 Perkembangan Perbankan dan Depresi Ekonomi

Perkembangan bisnis kolonial tidak dapat dilepaskan dari peranan sektor perbankan. Inggris adalah negara yang mempunyai jumlah jajahan terbesar di dunia yang didukung oleh kekuatan sektor perbankan yang kuat. Pusat perbankan Inggris yaitu Lombard Street menjadi tumpuan pemerintah jika akan melakukan ekspansi kolonialisasi. Kennedy (1989:105) mengungkapkan bahwa keberhasilan Inggris sebagai negara penjajah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, karena dukungan sistem perbankan yang kuat. Bahkan dalam batas-batas tertentu perbankan secara tidak langsung berperan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya berhubungan dengan pembiayaan peperangan dan kolonisasi, sehingga bank-bank ini mempunyai kedudukan yang kuat, karena dapat memutuskan, apakah perang perlu dilakukan atau tidak.

Kendati pun tidak semaju Inggris, sektor perbankan di Belanda juga mendukung keuangan. Pada mulanya VOC juga berperan seperti lembaga keuangan yang membiayai proyek perkebunan dan perdagangan. Namun karena VOC juga mengurus masalah-masalah non ekonomi, seperti menaklukkan banyak kerajaan, yang justru menyebabkan VOC mengalami banyak kerugian dan akhirnya bangkrut. Maka setelah VOC dibubarkan, bank-bank Belanda mengambil alih pembiayaan investasi di Hindia. Beberapa bank Belanda yang beroperasi di Indonesia adalah Nederlandsche Handel-Mij atau NHM (1824); De Javasche Bank (1828); Nederlandsche-Indische-Escompto-Mij atau NIEM (1863); Nederlandsche-Indische Handelsbank atau NIHB (1863); dan Handels Vereeniging Amsterdam atau HVA (1863). Diantara bank-bank itu yang terpenting adalah De Javasche Bank. Karena selain sebagai bank komersial juga mempunyai hak oktrooi atau hak mengedarkan uang. Selain itu, pada awal abad 20 juga ada beberapa bank asing yang berasal dari Inggris, Hong Kong dan

Shanghai Banking Corporation, Bank of Taiwan, The Yokohama Specie Bank dan Mitsui Bank (Rahardjo, dkk, 1995: 40).

Posisi bank-bank Belanda itu memang hanya membiayai perusahaan perkebunan Belanda, sehingga sangat rentan terhadap siklus bisnis. Karena kredit untuk perkebunan yang mereka berikan hampir seluruhnya adalah jangka panjang, dan mana kalai terdapat guncangan bisnis eksternal, bank-bank tersebut akan terkena dampaknya. Seperti telah disinggung di muka pada tahun 1884 terjadi resesi ekonomi yang dipicu oleh kelebihan produksi gula dan menyebabkan harga gula jatuh. Beberapa bank-bank di Indonesia menghadapi bahaya kebangkrutan. Secara keseluruhan sistem perbankan menghadapi kerugian besar lebih dari 40 juta gulden. Tindakan penyelamatan dilakukan oleh bank-bank Belanda. Sebuah bank Belanda NIHB dilikudiasi dan asetnya dipindahkan ke NILM. Pemerintah juga memperkuat permodalan Bank Kolonial yang mengalami krisis likuiditas. Dorrepaalsche Bank yang membiayai perkebunan gula di Surakarta dan Yogyakarta juga mengalami kebangkrutan. Bank itu direkonstruksi kembali menjadi Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden (Perusahaan Perkebunan Vorstenlanden) (Van Laanen, 1986:348).

Sejak peristiwa kebangkrutan beberapa bank dalam menghadapi resesi ekonomi 1884 itu, pemerintah melakukan restrukturisasi sistem perbankan. Dari sini timbulah perbedaan yang nyata antara usaha perbankan umum dalam arti pengadaan kredit jangka pendek dan jangka sedang, dengan apa yang disebut usaha perbankan perkebunan atau yang melayani pinjaman jangka panjang. Sebagian besar bank mulai membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan perkebunan. Sedapat mungkin, semua pinjaman jangka panjang dan jaminan hipotek diperpendek waktunya atau diminta melunasinya. Bank-bank itu menukar haluan dan menjadi pemberi modal pokok atau kerja kepada perusahaan-perusahaan dagang. Karena bank-bank ini

menyediakan modalnya secara permanen untuk keperluan dan kepentingan perkebunan, maka mereka tidak dapat lagi disebut bank pemberi kredit, melainkan sebagai perusahaan-perusahaan pemegang saham perkebunan. HVA dan NILM merupakan contoh yang jelas dari perbankan bentuk ini. Sebaliknya NHM dan Internatio hampir tidak memiliki perusahaan, artinya di tetap fokus pada usaha pembiayaan jangka pendek. Sementara yang bertahan pada bidang perkebunan adalah Koloniale Bank dan Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden atau Perusahaan Perkebunan Vorstenlanden di Surakarta dan Yogyakarta (Van Laanen, 1986: 349).

Pada masa ini sudah ada bank yang telah berkembang di Jawa yaitu Bank Vereeniging Oet Tiong Ham yang dipunyai oleh konglomerat Tionghoa Oet Tiong Ham yang juga disebut sebagai "Raja Gula". Bank ini berkedudukan di Semarang bermodalkan f 15.000.000. Bank ini mirip dengan NHM yang membiayai kegiatan usahanya sendiri yang beraneka ragam (Sutter, 1959: 88). Oei Tiong Ham -generasi ketiga dari perusahaan Kian Gwan di Semarang- telah menyaingi hegemoni orang-orang Eropa, dengan menguasai 5 buah pabrik gula. Bahkan dia menguasai hampir 60% ekspor dan perdagangan gula dalam negeri. Keberhasilan Oei Tiong Ham, disusul dengan pembukaan pabrik penyulingan alkohol di Shanghai dan pabrik *remilling* karet di Palembang yang berhasil mengekspor 2000 sampai 3000 ton karet *blanket* dan *sheets* ke Amerika tiap tahun (Panglaykim dan Palmer, 1970).

Tabel 1.9. Produksi Relatif Perusahaan Milik Bank-Bank Pertanian Dari Jumlah Produksi ^{a)} atau Jumlah Ekspor ^{b)} dari Indonesia 1933.

Bank	Gula	Kopi	Teh	Karet
NHM	25	9	7	7,5
NILM	6	0,4	0,6	0,3
Internatio	4	5	2	1
HVA	12	NA	NA	NA
Koloniale Bank	6	13	4	0,4
Cultuur Maschappij de Vorstenalnden	6	-	-	-
Jumlah	61	27,4	13,6	92

Ket: a) produksi gula; b)jumlah ekspor Kopi, Teh dan Karet

Sumber: Van Laanen (1986:350).

Sementara itu, bank yang dimiliki oleh pribumi baru berdiri di Surabaya pada tahun 1928 bernama Bank Nasional Indonesia. Bermula dari kesadaran tokoh-tokoh Budi Utomo untuk memberntuk organisasi yang lebih liberal yang disebut dengan The Indonesische Studieclub yang menginisiasi kegiatan seperti sekolah pertenunan, koperasi daging, pusat kerajinan, perkumpulan dagang, majalah dan lembaga pendidikan. Selain itu, tokoh pergerakan BU diantaranya adalah dr. Soetomo, dr. Samsi dan Ir. Anwari juga mendirikan bank yang bernama NV Bank Nasional Indonesia. Sekalipun hanya bermodal kecil sebesar *f* 500.000, tetapi Bank Nasional Indonesia telah mempunyai cabang di 5 kota yaitu, Mojokerto, Malang, Yogyakarta, Magelang dan Bandung (Sutter, 1959: 89, 122).

Dua tahun kemudian, tahun 1930 di Bukittinggi, Sumatera Barat didirikan pula Bank Nasional dan Bank Abuan Saudagar pada tahun 1932. Sebenarnya pada tahun 1912 sudah berdiri badan

perkreditan rakyat oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiraatmadja dengan membentuk Centrale Kas dengan modal f 5000.000. Baru pada tahun 1934, Centrale Kas diubah menjadi Algemeene Volkscredietbank (AVB) yang berkedudukan di Jakarta dengan modal f 21.400.000. Direktur AVB diangkat oleh Gubernur Jenderal, sedangkan operasionalnya diawasi oleh Presiden De Javasche Bank sebagai Komisaris Pemerintah (Rahardjo, dkk, 1995: 41).

1.3.5 Persaingan Bisnis pada Zaman Pergerakan

Seperti telah disinggung di muka, bahwa perkembangan industri batik di Surakarta telah melahirkan pengusaha besar di kalangan pribumi dan Tionghoa. Diantara mereka saling bersaing untuk merebut pasar. Pada masa ini pengusaha pribumi agak tersudut, mana kala katun dan bahan dasar batik lainnya yang diimpor oleh firma-firma Eropa dipasarkan melalui pengusaha-pengusaha Tionghoa. Di sini praktis pengusaha Tionghoa menguasai bahan baku utama industri batik. Ini menyebabkan pengusaha pribumi tidak mempunyai akses langsung terhadap bahan-bahan dasar batik itu. Selain itu, pengusaha Tionghoa juga mempunyai solidaritas yang tinggi dalam kelompoknya. Salah satu paguyuban Tionghoa yang besar adalah Kong Sing. Kong Sing adalah perkumpulan tolong menolong para pengusaha Tionghoa di Surakarta. Pada mulanya Kong Sing hanya bergerak dalam bidang pemakaman dan pesta, namun kemudian berkembang dalam bidang perlindungan anggota dan perdagangan. Sementara, pengusaha pribumi tidak mempunyai organisasi untuk melindungi kepentingan kelompoknya. Situasi ini dapat dipahami mengingat sebagian pengusaha pribumi adalah hanyalah pengusaha batik, berpendidikan rendah, dan tidak ada yang berpengalaman organisasi (Shiraishi, 1997:51).

Kesempatan untuk bergabung organisasi bagi pengusaha pribumi terbuka ketika berdiri Budi Utomo (BU) cabang Surakarta. Budi Utomo sesuai dengan kecendungan yang terjadi pada aras nasional, banyak diminati oleh golongan priyayi Jawa. Banyak para pembesar keraton yang bergabung dengan organisasi ini. Menurut pandangan Shiraishi (1997:51) ada perbedaan persepsi antara empat keraton di Surakarta dan Yogyakarta. Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta serta Pakualaman di Yogyakarta menanggapi secara positif tumbuhnya organisasi pergerakan, sedangkan Kasultanan Yogyakarta tetap kolot. Perkembangan BU di Yogyakarta banyak disokong oleh kalangan Keraton Pakualaman, sedangkan di Surakarta didukung oleh para pembesar Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Situasi seperti ini menyebabkan BU di Surakarta pada mulanya bersifat elitis, karena bergerak hanya di lingkungan Keraton. Dalam rangka memperluas keanggotaan di luar kalangan priyayi, BU mencoba mendekati kalangan pengusaha pribumi. Tawaran dari BU ini mendapat sambutan antusias dari para pengusaha pribumi, maka beberapa pedagang batik terkemuka di Lawean yang dipimpin Haji Samanhoedi dan Haji Bakri dari Kauman bergabung ke dalam BU. Masuknya pengusaha pribumi ke BU telah meningkatkan jumlah anggota BU menjadi 800 orang (Shiraishi, 1997:51).

Bargabungnya pengusaha pribumi ke BU cukup menggusarkan para pengusaha Tionghoa. Mereka memperkirakan bahwa BU akan dapat menjadi kendaraan politik pengusaha-pengusaha pribumi. Oleh sebab itu, pengusaha Tionghoa mencoba mengajak Haji Samanhudi untuk berpindah perkumpulan mereka Kong Sing. Tujuannya jelas dengan bergabung di Kong Sing, pengusaha pribumi dapat dikontrol oleh pengusaha Tionghoa. Rupanya bagi pengusaha pribumi, tawaran untuk bergabung dengan Kong Sing juga sebuah peluang, mengingat sebenarnya tujuan utama bergabung dengan organisasi adalah mendapatkan

akses bisnis. Akhirnya, Haji Samanhudi dan pengikutnya keluar dari BU bersedia bergabung dengan Kong Sing, bahkan ia menjadi salah satu komisaris dalam perkumpulan itu. Namun di dalam perkembangannya Haji Samanhudi dan pengikutnya merasa terasing di Kong Sing. Mereka mulai merasa diperlakukan tidak adil dan mulai ada ketidakcocokan. Situasi ini mendorong Haji Samanhudi dan pengikutnya keluar dan mendirikan organisasi sendiri yang bernama Rekso Rumecko pada awal tahun 1912 (Shiraishi, 1997:51).

Rekso Rumecko sesuai dengan namanya adalah “penjaga” atau organisasi ronda yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan. Sebagai organisasi yang serupa dengan Kong Sing, tidak terelakkan sering terjadi konflik fisik antara pengikut Rekso Rumecko dan Kong Sing. Ini mengundang kecurigaan pihak Pemerintah Belanda yang kemudian memeriksa dasar hukum pembentukan Rekso Rumecko itu. Pada masa itu, setiap perkumpulan tanpa status hukum dapat dibubarkan setiap saat dengan perintah residen. Karena sebagian besar aktivis Rekso Rumecko kebanyakan para pedagang pribumi dan abdi dalem di Keraton yang buta huku, maka Samanhudi meminta tolong kepada Martodharsono seorang wartawan yang pernah menjadi redaktur Medan Priyayi untuk mencari solusi. Martodharsono meminta bantuan kepada Tirtoadisurjo yang telah mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor dan menganggap bahwa Rekso Rumecko adalah cabang dari SDI itu. Dengan alasan seperti ini, pihak berwenang ternyata bisa menerima dan sejak itu pula Rekso Rumecko berubah menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI) atau lebih populer dengan nama Sarekat Islam (SI) (Shiraishi, 1997:56-57). SI tercatat sebagai organisasi sosial pertama yang mempunyai anggota sekitar 400 ribu orang dan mempunyai cabang hampir di seluruh kota besar di Jawa dan Sumatera (Kahin, 1952:67).

Munculnya Sarekat Islam (SI) telah mendorong lahirnya berbagai aktivis politik yang mewakili berbagai aliran di Surakarta. Di dalam kelompok Islam terdapat Haji Samanhudi pendiri SI yang kemudian digantikan oleh HOS Tjokroaminoto dan memindahkan kantor pusat SI dari Surakarta ke Surabaya. Tokoh-tokoh golongan kiri juga bertaburan di Surakarta seperti Haji Misbah, Mas Marco yang nanti sangat berperan dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926. Pemberontakan ini dapat segera ditumpas oleh Pemerintah Belanda, dan tokoh-tokohnya dibuang ke Boven Digul (Shiraishi, 1997:467). Beberapa ahli sejarah menempatkan pemberontakan tahun 1926 itu -yang tidak saja terjadi di Jawa Tengah melainkan juga di Banten dan Sumatera Barat- merupakan tonggak penutup babak pertama sejarah pergerakan nasional pada periode 1908-1927 (Surjomihardjo, 1988: 14). Polarisasi politik antara kelompok itu menjadi salah satu pemicu munculnya radikalisasi masyarakat terhadap feodalisme yang nanti tercermin dalam "gerakan anti swapraja" di Surakarta. Selain itu, Pemberontakan PKI pada tahun 1926 itu juga menjadi titik balik dari para aktivis politik yang sangat diawasi oleh Pemerintah Belanda seperti "Rumah Kaca".

Setelah pemberontakan PKI 1926 yang gagal, banyak para aktivis yang dipenjara dan sebagian lain tiarap. Dalam situasi seperti ini, para pengusaha batik justru mulai bangkit membentuk organisasi semacam koperasi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha Tionghoa. Seperti telah diungkapkan di muka, bahwa pengusaha Tionghoa mempunyai akses yang luas terhadap bahan baku batik, sedangkan pengusaha pribumi tidak. Oleh sebab itu, para pengusaha batik pribumi mulai mengorganisasikan diri dengan membentuk Batik Bond pada tahun 1934. Kemudian, pada tahun 1936, para pengusaha batik mencoba untuk kembali Laweyan mendirikan koperasi pengusaha batik dengan nama "Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera (PPBBP).

Pada tahun 1937, PPBBP berubah namanya menjadi "Persatuan Perusahaan Batik Bumiputera Surakarta" (PPBBS) yang didirikan oleh Raden Wongsodinomo dan Haji Moehammad Sofwan⁶ (Sutter, 1959:46).

1.3.6 Masa Pendudukan Jepang

Masa masa pendudukan Jepang, di Surakarta pada tahun 1942-1945 masalah yang dihadapi adalah pertama perubahan administrasi pemerintahan. Masalah ini erat dengan kebijakan militer Jepang di bidang ekonomi. Untuk memperlanca arus pemerintahan pendudukan, pemerintah militer Jepang merubah sistem pemerintah feodal. Wilayah daerah Surakarta dinamakan Solo Koti yaitu Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Solo Koti (daerah Istimewa Kasunanan) dan daerah Istimewa Mangkunegaran (Mangkunegaran Koti). Baik Solo Koti dan Mangkunegaran Koti mempunyai hak istimewa seperti masa kerajaan dahulu, termasuk hak istimewa di bidang ekonomi.

Pada dasarnya perubahan administrasi pemerintahan daerah Surakarta itu hanya bersifat formalitas saja secara substansial daerah Surakarta masih merupakan daerah kerajaan yang oleh pemerintahan militer Jepang dinamakan "kochi" atau "koti" menurut tulisan Indonesia dan artinya daerah istimewa. Pelantikan kepala daerah istimewa Surakarta ini dinamakan Solo Koo, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1942 dan Mangkunegara Koo pada tanggal 14 Agustus 1942 (Kan Po, 1942).

Kedua, masalah tekanan ekonomi dan mobilitas penduduk Surakarta. Pada masa feodalisme kerajaan, ada unsur pengabdian feodal dalam menjalankan tugas ekonomi. Misalnya saja ketika para bangsawan menamkan modalnya untuk usaha perdagangan pantai abad-abad ke-13-17, pedagang-pedagang bekerja secara

⁶ Penerus Raden Wongsodinomo saat ini mempunyai perusahaan batik Danarhadi.

serius sekali, karena ada unsur pengabdian feodal. Unsur pengabdian feodal ini dimanfaatkan Belanda ketika menjajah Indonesia. Inilah sebabnya Belanda sangat menghargai para pejabat tradisional sebagai “*island besteuer*” (pemerintahan pribumi) yang membantu pemerintahan kolonial.

Dengan Pelantikan Balatentara dari Nipon dengan Susuhunan Surakarta dan Mangkunegara diatur dengan undang-undang buatan pemerintah pendudukan militer Jepang (Kan Po, 1942). Dengan undang-undang itu Kasunanan Koehi mempunyai 4 ken (Kabupaten), 18 Gun (Kawedanan) dan 66 Jon (onderdistrik, sekarang kecamatan/sedangkan Mangkunegaran seperti sebelum pendudukan mempunyai 4 ken, 9 Gun dan 41 kapanewon (onderdistrik) (Rijksblad Mangkunegaran 1929). Nama-nama kabupaten diganti ken, kewedanan diganti gun dan sistem wedono masa Belanda diganti Sonco, yang di daerah Mangkunegaran Sonco merupakan kapanewanan yang sama dengan wilayah asisten wedono di kasunanan. Di desa, kapala desa/Lurah desa dinamakan Kuco. Di bawah Kuco yang memerintah daerah Ken (kelurahan) pemerintah militer Jepang membentuk Tonarigeumi (wilayah Rukun Tetangga), di bawah pimpinan Gumico (Ketua RT).

Struktur pemerintahan inilah yang menggerakkan ekonomi pendudukan militer Jepang dan memobilisasikan penduduk untuk Perang Asia Timur Raya. Perubahan administrasi pemerintahan dimaksudkan pemerintah militer Jepang untuk memperlancar proses kebijakan militer Jepang dalam gerakan penduduk dalam arus sosial ekonomi seperti diketahui pemerintah militer Jepang di Surakarta, seperti daerah-daerah lain di Pulau Jawa, kekuarangan tenaga administrasi sehingga Jepang di Jawa/Indonesia masih tetap menggunakan orang Indonesia dalam administrasi pemerintahannya. Di Surakarta, Pemerintah Militer Jepang menginstruksikan beberapa hal yaitu pertama, pengumpulan emas dan Berlian. Kedua, penanaman tanaman Jarak secara masal di

lahan pertanian dan tepi jalan untuk kepentingan minyak persenjataan. Ketiga, penanaman tanaman kapas untuk pemintalan benang tekstil.

Untuk kepentingan produktivitas yang baik pemerintah militer Jepang membentuk sidoin jarak dan sidoin kapas untuk koordinasi proses penanamannya. Situasi ekonomi di Surakarta pada tahun 1942 tampak sangat berat bagi beban penduduk. Sebuah majalah “Panji Poestaka” yang terbit pada nopember 1942 memuat berita bahwa bulan-bulan maret, april, mei 1942 di beberapa daerah penduduk melakukan barter/pertukaran barang kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi pada bulan-bulan itu ada ekonomi barter di daerah Surakarta karena kesulitan ekonomi uang. Pada tahun 1942, masa pendudukan militer Jepang di Surakarta, rakyat kesulitan hidup. Pemerintah militer Jepang mengumumkan patokan harga beras dengan uang federal. Pada bulan Juli 1942 pemerintah militer Jepang di Surakarta mengumumkan harga beras sebagai berikut, pertama harga beras kualitas baik, per 100kg seharga f 7,70; kualitas rendah seharga f 6,50 per 100 kg. Bulan-bulan pertama pendudukan militer Jepang harga beras rata-rata naik 25 persen. Kedua, harga-harga minyak goreng, ikan asin, terigu, kenaikannya tidak sebesar beras, jadi masih jauh di bawah rata-rata harga beras yang mencapai 25 persen.

Maklumat Guen Sei Bei surakarta 8 juni 1942 tidak menetapkan harga-harga ikan asin, gandum, minyak goreng, teh dan kebutuhan pokok lainnya tidak ada kenaikan harga. Ini berarti harga barang-barang kebutuhan pokok sejak Maret 1942 hingga 8 Juni 1942 tetap stabil. Semua toko di Surakarta akan mendapat sanksi berat bila menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok (sembako). Dari bulan-bulan Juni 1942 hingga Nopember 1942 harga beras per 100 kg cenderung turun, dari f 7.70 per 100kg bulan Juni 1942 menjadi rata-rata f 7.40 selama Juli-desember 1942. Ada operasi harga-harga di toko-toko oleh pemerintah

militer Jepang, sehingga stabil harga barang-barang kebutuhan pokok.

Pada akhir tahun 1942 nampak di beberapa kota di Jawa terutama di Surakarta, Surabaya masyarakat mulai menjual pakaian bekas. Di Surakarta merupakan awal dari penjualan pakaian bekas yang disampirkan di pundak penjual sehingga terlihat “nglewer” (menggantung ke bawah) dan melahirkan pasar klewer. Jadi pasar klewer yang saat ini menjadi bursa sandang modern, masa pendudukan militer Jepang tahun 1942 merupakan tempat penjualan pakaian bekas mulai tahun 1943 keadaan ekonomi di Surakarta nampak berat bagi penduduk. Pemerintah militer Jepang memobilisasikan penduduk untuk menggerakkan ekonomi demi kepentingan militer Jepang. Penanaman kapas untuk pemintalan sebagian bahan baku tekstil digiatkan. Penduduk (petani) dipaksa menyerahkan padi untuk kepentingan militer. Bangsawan-bangsawan surakarta dipaksa menyerahkan emas dan berlian kepada Jepang. Pada akhir pengumpulan emas dan berlian, daerah Surakarta menjadi daerah terbanyak perolehannya dalam pengumpulan emas dan berlian.

Pemerintah militer Jepang di surakarta mengatur penjualan beras dan distribusinya. Jepang membentuk koperasi agar penduduk dapat diatur distribusinya dalam pembelian beras. Praktis penduduk kota yang kaya dapat dikelola kekayaan pangannya oleh Jepang di Surakarta yang merupakan peraturan dari pusat Jakarta. Keadaan ekonomi di surakarta masa pendudukan militer Jepang dari bulan ke bulan makin berat. Pengumpulan emas, berlian dan intan semakin diintensifkan. Pada tahun 1944 untuk mendapatkan jatah pakaian, pemerintah militer Jepang menggunakan sistem kupon. Akibatnya ialah tidak meratanya pembagian pakaian itu. Ada warga Surakarta yang mendapat kupon dan ada yang tidak. Suatu laporan tertulis dari Kabupaten Mangkunegara (Mangkunegaran Ken) pada 15 Oktober

1943 murid sekolah sejumlah 9707 di kota Surakarta hanya 1572 anak yang mendapat kupon pembagian kain cita pakaian. Ada sejumlah kupon seperti kupon minyak, kupon pakaian, kupon rokok dan lainnya. Tanpa kupon ini langkalah warga kota untuk memperoleh barang dengan harga murah. Di Wonogiri penduduk sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakaian dan bahan makanan. Penduduk sudah ada yang memakan bagian dari akar pisang yang disebut “ares”. Bahan akar pisang sekaligus digunakan sebagai lauk dan sayur.

2

MASA KEMERDEKAAN DAN TRANSISI KE ORDE BARU

Bab ini akan menguraikan proses evolusi Kota Surakarta dan sekitarnya dari sudut politik dan ekonomi. Tahap pertama akan dibahas dinamika politik yang terdiri atas uraian tentang gerakan anti swapraja yang menjadi titik pijak perubahan dari daerah istimewa menjadi daerah karesidenan sebagai bagian Propinsi Jawa Tengah. Selain itu juga akan dibahas dinamika politik di Kota Surakarta sejak Pemilu 1955. Tahap Kedua akan dibahas dinamika ekonomi yang terdiri atas pembahasan tentang infrastruktur, perbankan dan lembaga pembiayaan serta industrialisasi.

2.1 Dinamika Politik

2.1.1 Gerakan Anti Swapraja

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah kerajaan di Surakarta ditetapkan oleh Presiden sebagai daerah istimewa. Bahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan piagam Penetapan Presiden, Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII ditetapkan sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta. Namun dalam waktu bersamaan, Pemerintah Republik membentuk Komite Nasional Daerah (KND) sebagai badan legislatif pada September 1945 yang secara konsensus dipimpin oleh eksponen perwira Pembela Tanah Air (PETA) yakni Mr.

Sumodiningrat. Konsensus itu KND harus dipimpin oleh eksponen perwira PETA merupakan instruksi dari pemerintah pusat, karena salah satu tugas utamanya adalah melucuti senjata tentara Jepang. Sejak akhir September 1945, KND berhasil memaksa tentara Jepang menyerahkan persenjataanya. Tentu saja, kehadiran KND tidak didukung oleh kalangan keraton baik Kasunanan dan Mangkunegaran. Maka, praktis antara bulan September sampai Oktober 1945 berdiri tiga pemerintahan yakni Kasunanan, Mangkunegaran, dan KND. Bahkan sebuah Pemerintahan Direktorium yang terdiri dari unsur Kasunanan, Mangkunegaran dan KND tidak berjalan, karena Kasunanan dan Mangkunegaran berkeinginan berdiri sendiri (Kartodirdjo, 1974: 108-109).

Situasi instabilitas di Surakarta memunculkan kelompok pro dan anti swapraja. Kelompok pro swapraja membentuk organisasi Perkumpulan Kerabat Surakarta (PKS). Pendukung PKS sebagian besar adalah masyarakat yang masih setia dengan pemerintah kerajaan. Sementara itu, kelompok yang anti swapraja muncul dari berbagai kalangan diantaranya adalah kalangan keraton yang berfikir moderen, aktivis partai-partai politik seperti PKI, PNI, Murba, PSI dan organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan PKI dan Barisan Benteng Surakarta. Mereka menyatukan diri dalam Panitia Anti Swapraja (PAS). Pertikaian antara kelompok pro dan anti swapraja terjadi berlarut-larut. Pada akhirnya, Pemerintah Pusat melalui keputusan 15 Juli 1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah karesidenan dalam Propinsi Jawa Tengah. Maka, sejak itu hilanglah kesempatan menjadi Daerah Istimewa, seperti halnya Yogyakarta. Pada bulan Agustus 1946 struktur pemerintahan karesidenan terdiri atas kabupaten, kawedanan dan kelurahan. Karesidenan Surakarta terdiri atas wilayah Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah Kasunanan mencakup Boyolali, Klaten dan Sragen dan Wilayah Kasunanan yakni Wonogiri dan

Karanganyar (Kartodirdjo, 1974: 108-109). Wilayah Surakarta pada tahun 1950 mendapatkan tambahan tujuh (7) kelurahan yakni Karangasem, Kerten, Jajar, Banyuanyar yang semula masuk Kecamatan Colomadu dan Kadipiro, Mojosongo yang semula masuk Kecamatan Gondangrejo. Serah terima berdasarkan No. 7640/I-Secr/50 9, September 1950 dari Residen Surakarta Prodjohardjojo kepada Wali Kota Surakarta Soebakti Poeponoto (Mulyadi et, al, 1999).

BOKS 2.1. GERAKAN POLITIK ANTI SWAPRAJA

Pada awalnya, begitu mendengar pengumuman tentang kemerdekaan RI, pemimpin Mangkunegaran (Mangkunegara VIII dan Susuhunan Sala (Pakubuwana XII) mengirim khabar dukungan ke Presiden RI Soekarno dan menyatakan bahwa wilayah Surakarta (Mangkunegaran dan Kasunanan) adalah bagian dari RI. Sebagai reaksi atas pengakuan ini, Presiden RI Soekarno menetapkan pembentukan propinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Pada Oktober 1945, terbentuk gerakan swapraja/anti-monarki/anti-feodal di Surakarta, yang salah satu pimpinannya adalah Tan Malaka, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan gerakan ini adalah membubarkan DIS, dan menghapus Mangkunegaran dan Kasunanan. Gerakan ini di kemudian hari dikenal sebagai Pemberontakan Tan Malaka. Motif lain adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai kedua monarki untuk dibagi-bagi ke petani (landreform) oleh gerakan komunis.

Tanggal 17 Oktober 1945, wazir (penasihat raja) Susuhunan, KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Hal ini diikuti oleh pencopotan bupati-bupati di wilayah Surakarta yang merupakan kerabat Mangkunegara dan Susuhunan. Bulan Maret 1946, wazir yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh gerakan Swapraja. Pada bulan April 1946, sembilan pejabat Kepatihan juga mengalami hal yang sama.

Karena banyaknya kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan, maka tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan politik Mangkunegaran dan Kasunanan. Sejak saat itu keduanya kehilangan hak otonom menjadi suatu keluarga/trah biasa dan keraton/istana berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa. Keputusan ini juga mengawali kota Solo di bawah satu administrasi. Selanjutnya dibentuk Karesidenan Surakarta yang mencakup wilayah-wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran.

Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.

Peristiwa politik Surakarta merupakan perubahan struktur tradisional menjadi lebih demokratis dengan meruntuhkan semua status kebangsaan. Dengan ini Keraton Surakarta kehilangan sumber-sumber politik dan ekonomi untuk mendukung status sosialnya. Sementara, Keraton hanya dapat mempertahankan aspek budaya sebagai simbol sosial kultural pusat kebudayaan Jawa. Berbeda dengan Yogyakarta yang sejak awal telah kemerdekaan ditetapkan menjadi Daerah Istimewa, bahkan sejak Februari 1946 menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Sebaliknya, Surakarta justru menjadi pusat oposisi tokoh-tokoh kiri/sosialis antara lain seperti Tan Malaka menjadikan daerah ini sebagai basis oposisi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal kemerdekaan ini, Yogyakarta menjadi "kota revolusi, sedangkan Surakarta menjadi "kota oposisi" (Kartodirjo, 2002: 261).

2.1.2 Peran Partai Politik

Hasil Pemilu tahun 1955 dapat mencerminkan kekuatan riil partai politik di Surakarta. Jika secara nasional terdapat lima (4) partai besar yang memenangkan Pemilu yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka di Surakarta tidak jauh berbeda. Dari 123.653 suara yang sah, PKI memperoleh 70.808 suara atau 57,26%. Disusul dengan PNI yang mendapatkan 37,144 suara atau sekitar 30% lebih, sedangkan Masyumi mendapatkan 13.733 suara atau sekitar 11,10% dan yang terkecil NU hanya memperoleh 1.998 suara atau 1,61%. Berdasarkan hasil itu, PKI memenangkan Pemilu di seluruh kecamatan. Kemenangan PKI terbesar diraih di Kec. Laweyan yaitu 16.935 suara atau 67,48%; disusul dengan Kec. Jebres sebesar 15.802 suara atau 65,48%; Kec. Serengan sebesar 10.084 suara atau 57,26%; Kec.Pasar Kliwon sebesar 12.143 suara atau 52,18% dan yang terendah di Kec. Banjarsari sebesar 15.856 suara atau 47,05% (Mulyadi, et. al, 1999: 96).

Kemenangan PKI dalam Pemilu 1955 ini mengantarkan Oetomo Ramelan -seorang kader PKI- terpilih menjadi Kepala Daerah Kotapraja Surakarta pada 17 Februari 1958. Ini membawa konsekuensi bahwa Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Kotapraja Surakarta sebagian besar diisi oleh kader dan simpatisan PKI. Situasi seperti ini banyak menimbulkan konflik horisontal, karena bagi pihak yang tidak mau bekerjasama dengan PKI akan dilumpuhkan dengan berbagai cara. Tidak jarang situasi konflik ini juga memunculkan bentrokan fisik antara kelompok yang pro dan anti PKI di tingkat akar rumput (Mulyadi, et. al, 1999: 96).

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi terpimpin. Untuk menata kembali sistem pemerintahan dikeluarkan Penetapan Presiden No.5/1960 yang mengubah DPRD Kotapraja menjadi DPRD Gotong Royong. Jumlah anggota DPRD Kotapraja Surakarta tetap 30 orang atau jumlah yang sama dengan hasil Pemilu 1955, tetapi komposisinya berbeda. Jika hasil Pemilu 1955, anggota DPRD murni berasal dari partai politik, pada DPRD GR dibagi dalam dua kelompok yakni "Golongan Politik" dan "Golongan Karya". Untuk menyasiasi ketentuan baru itu, PKI selain mendominasi Golongan Politik, juga menempatkan kadernya di Golongan Karya, sehingga setiap melakukan pungutan suara PKI selalu menang (Mulyadi, et. al, 1999: 96).

2.1.3 G30S/PKI

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI. Gerakan ini yang didalangi oleh PKI baik dari sayap militer maupun sipil itu telah membunuh beberapa Jenderal di Jakarta pada tanggal 30 September 1965. Mereka berhasil menguasai RRI dan mengumumkan gerakan makarnya. Propinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Surakarta pada khususnya yang dikenal sebagai

basis PKI merespons gerakan ini dengan cepat. Melalui RRI baik sayap militer yang dipimpin oleh Let.Kol. Iskandar dan sayap sipil yakni Walikota Surakarta Utomo Ramelan mendukung gerakan ini. Maka, sejak itu suasana Kota Surakarta mulai panas dan terjadi konflik horisontal di dalam masyarakat.

Pada tanggal 20 Oktober 1966, Pangdam VII/Diponegoro mengumumkan pembekuan kegiatan PKI dan Baperki, maka memunculkan reaksi yang keras dari kader dan simpatisan partai ini Surakarta. Buruh-buruk Djawatan Kereta Api (DKA) yang tergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Surakarta melakukan pemogokan. Ini menyebabkan terhentinya hubungan kereta api Semarang-Solo-Jakarta-Surabaya. Selain itu, pemogokan juga dilakukan di pabrik-pabrik yang serikat kerjanya berafiliasi ke PKI menyebabkan kekacauan semakin menjadi-jadi. Pimpinan Pangdam VII Diponegoro baru dapat mengendalikan Surakarta setelah mendapatkan bantuan tentara dari unsur RPKAD pada tanggal 22 Oktober 1966 (Disjarah; 1977, 585).

Kendatipun kekuatan PKI di wilayah Surakarta sudah dapat dihancurkan, namun pergolakan sosial politik masih sering terjadi. Pada 6 Nopember 1966 terjadi demonstrasi dan berakhir pada pengrusakan toko-toko milik Tionghoa di Kawasan Nonongan dan Coyudan. Sampai sekarang tidak jelas apa dan dalang dari peristiwa ini. Diduga, gerakan ini didalangi oleh kelompok ASU dan PKI yang memprovokasi kelompok Islam untuk menyerang pengusaha Tionghoa. Selain itu, dalam rangka mendukung gerakan anti PKI, di Surakarta juga berdiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) (Mulyadi, et. al, 1999: 302).

2.2 Dinamika Ekonomi

2.2.1 Perkembangan Infrastruktur Ekonomi

Secara praktis, pada periode awal kemerdekaan itu belum terdapat agenda ekonomi yang secara sistematis dijalankan. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah ekonomi yang mendesak untuk dilakukan. Langkah pertama adalah Pemerintah segera mengambil alih fasilitas umum dari pihak Jepang seperti transportasi, listrik, perkebunan, logistik dan pertambangan. Sebagian besar fasilitas umum tersebut dalam kondisi rusak parah, maka upaya perbaikan infrastruktur ekonomi menjadi sangat penting (Sutter, 1959: 293-314).

Sejak awal kemerdekaan di Surakarta tercatat jalan yang rusak seluas 434,500 m² atau sekitar 56% dari keseluruhan jalan, hingga akhir tahun 1952 sudah dapat diperbaiki seluas 255,300 m² atau 35%. Sebagai akibat perang, sebagian besar jembatan juga mengalami kerusakahan. Maka pada tahun 1952 terdapat 11 jembatan yang diperbaiki yaitu Kleco, Bajan, Kalangan, Tanjunganom, Mijipinilihan Wetan, Mijipinilihan Kulon, Brojo, Gambiran, Gondang, Nusukan dan Belik.

Selain itu, pada masa ini juga dilakukan pembuatan beberapa los pasar yaitu Pasar Penumping, Pasar Purwosari dan Pasar Cengklik. Sementara pasar tradisional semakin ditingkatkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi. Pada masa awal kemerdekaan, Surakarta sudah mempunyai 25 pasar dengan luas total 24.617,70 m². Beberapa pasar yang besar diantaranya adalah Pasar Gede (Hardjonegoro) (6.120 m²), Pasar Legi (4.100 m²), Pasar Singosaren (2.773 m²), Pasar Gading (1.746 m²), Pasar Windudjeran (1.253 m²), Pasar Ngapeman (1.123 m²), Pasar Kabangan (674m²) Pasar Ngemplak (37m²) dan Gilingan (27m²) (Mulyadi, et. al, 1999: 61).

BOKS 2.2: SEJARAH PASAR-PASAR DI SURAKARTA

- ◁ Pasar Gede merupakan pasar besar yang berada di pusat kota. Pada tahun 1927 Pasar Gede direhabilitasi menjadi lantai dua yang kemudian diberi nama Pasar Gede Harjanagara. Pada waktu pembukaan pasar dirayakan secara besar-besaran.
- ◁ Pasar Legi berada di wilayah Mangkunegaran. Sesuai dengan namanya, pasar ini ramai pada hari pasaran Legi. Banyak pedagang berdatangan dari desa-desa. Pada tahun 1936 atau masa kekuasaan Mangkunegaran VII (1916-1944) pasar direnovasi secara moderen.
- ◁ Pasar Pon berada di wilayah Mangkunegaran. Pada zaman dulu pasar tersebut ramai pedagang setiap pasaran Pon. Sejak tahun 1929 berubah menjadi pertokoan dan kios-kios kecil berjualan kelontong dan terletak di tepi jalan depan Pura Mangkunegaran. Pasar akan lebih ramai pada waktu sore sampai malam, para pedagang kebanyakan adalah pengusaha Tionghoa.
- ◁ Pasar Kliwon pada mulanya adalah pasar hewan, khususnya jual beli kambing. Terletak di perkampungan orang-orang Arab.
- ◁ Pasar Kembang adalah pasar tempat jual beli bunga untuk sesaji, seperti bunga setaman, bunga boreh, bunga warna-warni untuk upacara tradisional dan untuk pemakaman.
- ◁ Pasar Klewer pada awalnya dinamakan pasar Slompretan. Letaknya di sebelah selatan alun-alun utara, sebelah selatan Masjid Agung. Dahulu tempat itu dipergunakan untuk menyimpan dan berhentinya kereta. Pada pendudukan Jepang, tempat itu dipergunakan untuk berdagang bagi kalangan miskin yang tidak punya tempat berjualan. Para pedagang menawarkan dagangannya dengan disampirkan di bahu, sehingga tampak berkeleweran di pinggir jalan, maka pasar ini disebut Pasar Klewer.

Sumber: Soedarmono, 2006: 50-51

Sebelum ada listrik, penerangan jalan umum dan rumah-rumah di Kota Surakarta menggunakan lampu teplok. Namun mulai 19 April 1902, di Surakarta lampu listrik menyala untuk pertama kalinya. Mesin pembangkit listrik dengan tenaga diesel dipasang dekat stasiun Kereta API (NIS) di Purwosari. Dana untuk pengadaan mesin ditanggung oleh Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran, para saudagar dan kalangan hartawan. Untuk mengelola listrik itu didirikan Solosche Electriciteist Maatschaappij (SEM) atau Perusahaan Listrik Solo. Sementara itu, mulai tahun 1926, Kota Surakarta mempunyai perusahaan air minum tekanan tinggi (NV. Hoogdruk Weterleiding) yang mengusakan air ledeng yang mengalir ke rumah tangga. Sumber air diambil dari Cakratulung, Delanggu Klaten. Pembiayaan berasal dari pinjaman Gubernur dengan Kasunanan dan Mangkunegaran. Enam tahun kemudian, perusahaan tersebut mengadakan assainering atau membuat saluran air di dalam kota dengan memasang gorong-gorong dari beton bis untuk mempercepat arus aliran air apabila musing penghujan (Sudarmono, 2006:51).

Tabel 2.1. Penerimaan Pemerintah Surakarta Pada Tahun 1950-1952

Jenis Penerimaan	1950	1952
Kantor Air Minum	643.810,71	821.583,37
Kantor Pasar	471.099,10	827.765,45
Kantor Sriwedari dan Balekambang	912.602,68	796.466,61
Pajak Gedung/Lampu dan Reklame	20.300,97	54.015,26
UP Theatre	318.277,84	573.274,3
Usaha Gedung/Lampu dan Reklame	146.656,56	157.927,45

Sumber: Mulyadi, et, al 1999: 61

Setelah memasuki masa kemerdekaan yakni antara tahun 1950-1952, Jawatan Perusahaan Balai Kota Surakarta mempunyai beberapa perusahaan Kantor Air Minum, termasuk di dalamnya adalah pemandian umum Tirtomoyo dan Balekambang. Selama tahun-tahun tersebut, pemerintah daerah juga sudah memperoleh pemasukan dana. Beberapa perusahaan daerah seperti Kantor Air Minum, Kantor Pasar, dan Kantor Sriwedari, Bioskop, memberi pemasukan yang semakin meningkat. Pajak dan retribusi juga mengalami peningkatan (Mulyadi, et, al, 1999:61).

2.2.2 Konferensi Ekonomi Solo dan Perkebunan

Konferensi Ekonomi Solo dilakukan pada 5 sampai 7 Mei 1946. Konferensi merupakan kelanjutan dari Konferensi Ekonomi Yogyakarta yang dilaksanakan pada 3 Februari 1946. Pada Konferensi Ekonomi Yogyakarta dibuka oleh Menteri Kemakmuran Darmawan yang dihadiri oleh seluruh Gubernur di Jawa, Residen dan Kepala Jawatan Kemakmuran. Konferensi Yogyakarta membahas tentang perlunya mengorganisasi kembali lembaga-lembaga ekonomi pada masa Jepang; membahas masalah produksi dan distribusi makanan, sandang dan minyak serta administrasi perkebunan. Pada konferensi ini Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan pengarahannya. Untuk membahas lebih detil topik-topik Konferensi Ekonomi Yogyakarta, maka diadakan kembali Konferensi Ekonomi Solo (Sutter, 1959: 388).

Konferensi Ekonomi Solo dibuka oleh Wakil Menteri Kemakmuran Saksono yang membahas perencanaan ekonomi, keuangan pemerintah, mengendalikan harga, distribusi komoditi dan alokasi sumber daya manusia. Namun dalam perkembangannya, konferensi justru membahas tentang masalah pergulaan. Pada saat konferensi Yogyakarta, Wakil Presiden Mohammad Hatta telah mengemukakan bahwa pada masa lalu, industri gula telah memegang peranan penting dan menjadi sumber keuangan pada

masa itu, maka sudah sepantasnya kalau industri pergulaan perlu direstrukturasikan. Namun pada masa awal kemerdekaan, pabrik gula tinggal 51 perusahaan dari 112 pada masa penjajahan. Oleh sebab itu, pabrik gula harus direhabilitasi dan diperkuat manajemennya (Sutter, 1959: 396).

Dalam rangka merehabilitasi pabrik-pabrik gula, pada 21 Mei 1946, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) yang diketuai oleh Notosoedirdjo yang didirikan di Surakarta (Sutter, 1959; 398). BPPGN secara umum berfungsi mengoperasikan pabrik gula di Jawa yang mencakup penjualan dan distribusi komoditi dan peralatan perkebunan; produksi; ekspor dan pengembangan sumber daya manusia. Hingga tahun 1948 pabrik gula di Surakarta dan sekitarnya yang telah diambilalih oleh Pemerintah adalah dua (2) pabrik gula kepunyaan Mangkunegaran yakni Tasik Madu dan Colo Madu. Sementara yang belum diambil alih adalah yakni PG Gondang Baru yang merupakan milik PT Perusahaan Perkebunan Godang Baru, PG Mojo milik NV Cultuur Mij Lawoe dan PG Ceper Baru milik CV Cultuur Mij Tjeper (Mulyadi, et, al, 1999).

Sementara itu, mengelola untuk perkebunan non gula, Pemerintah mendirikan Poesat Perkeboenan Negara (PPN) pada 7 Juli 1946 yang juga didirikan di Surakarta. PPN dipimpin oleh Sediono dari Departemen Perkebunan. PPN berfungsi mengoperasikan perkebunan non gula; menjadi pengawas perkebunan-perkebunan pemerintah dan mengontrol produksinya (Sutter, 1959; 399).

2.2.3 Perbankan dan Pembiayaan

Masalah ekonomi yang mendesak lainnya adalah penggunaan uang. Pemerintah segera mengintroduksi mata uang baru yakni Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk menggantikan mata uang Jepang dan NICA. Eksistensi ORI pada masa awal

kemerdekaan ini dapat disamakan seperti *continental money* atau *greenbank*, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat, untuk membiayai perlawanan terhadap Inggris (1776-1783). Dengan kata lain ORI pada saat itu menjadi alat perjuangan dan sebagai atribut kemerdekaan yang semakin mendorong semangat nasionalisme (Oei, 1991:69-72).

Untuk menyalurkan ORI diperlukan bank sirkulasi. Oleh sebab itu, pada 5 Juli 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI) yang bertujuan menjadi bank sirkulasi, dan dapat beroperasi sebagai bank umum. Peranan BNI sebagai bank sirkulasi berakhir, setelah De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral berdasarkan atas keputusan Konferensi Meja Bunda (KMB). Alasan utama penunjukkan De Javasche Bank adalah karena bank itu telah berpengalaman sebagai bank sirkulasi. Namun menurut Rahardjo, et, al (1995:53-54) ketentuan KMB itu hanyalah bersifat sementara, sehingga alasan yang sebenarnya bukanlah itu, melainkan untuk mengamankan piutang Pemerintah Belanda terhadap Indonesia sebesar x 4.418,5 juta.⁷

Untuk semakin mendorong peredaran ORI dan perkembangan monetisasi masyarakat, pada tahun 1946 itu juga, Pemerintah mendirikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan hasil nasionalisasi dari *Algemeene Volkscredietbank*. Pada saat bersamaan mulai berkembang bank-bank swasta juga mulai berkembang di berbagai daerah. Seperti berdirinya Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan, dan juga Bank Soerakarta yang didirikan di Solo. Dengan berdirinya bank-bank komersial baik milik pemerintah maupun swasta mempercepat proses

⁷ Sumitro Djojohadikusumo sangat menyayangkan keputusan ini, katanya “Saya menghendaki agar BNI menjadi bank sentral, inilah bank kita sendiri sebagai bank perjuangan. Seperti Simatupang menghendaki agar tentara republiklah yang menjadi TNI, dan pasti bukan KNIL. Simatupang berhasil, dan saya gagal!” (BIES, 1987).

perbaikan ekonomi paska kolonial (Sutter, 1959: 348-349).

Kebijakan industrialisasi itu akan berjalan dengan lancar, apabila didukung oleh sistem perbankan yang kokoh. Pemerintah segera membenahi sektor perbankan, dengan mendirikan bank sentral dan bank-bank pemerintah. De Javasche Bank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Indonesia pada tahun 1950, kemudian dikeluarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1953. Menurut undang-undang itu tugas Bank Indonesia adalah mengatur nilai satuan uang, mengelola kredit, dan mengawasi kredit. Selain itu, BI harus secara berangsur-angsur mengurangi fungsinya sebagai bank komersial, yang merupakan warisan dari De Javasche Bank, dan memfokuskan sebagai bank sentral dan sirkulasi. Untuk mengurus masalah bisnis komersialnya Bank Indonesia membentuk unit khusus yang dinamai sebagai unit perbankan (*banking departement*) (Arndt, 1971:361).⁸

Sementara itu, BNI ditetapkan menjadi bank umum melalui keluarnya Undang-undang Darurat No 2 tahun 1955. Menurut peraturan itu, BNI mempunyai tugas “membantu mempromosikan kekayaan masyarakat dan ekonomi nasional dalam bidang komersial pada umumnya dan ekspor impor perdagangan pada khususnya”. Dengan demikiraan BNI merupakan bank pribumi pertama yang bergerak perdagangan luar negeri dan valuta asing (*foreign exchange*). Sampai dengan tahun 1955 kontribusi Pemerintah di BNI sebesar Rp 340 juta, dengan kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp 660 juta (Anspach, 1969 139).

⁸ Pemikiran bahwa BI harus menjadi banker's bank tanpa menjalankan fungsi bank komersial, belum dapat dilaksanakan karena Indonesia masih lemah permodalan dan bank komersial yang ada masih belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masih perlu bimbingan BI (Sjafruddin, Laporan De Javasche Bank, 1950/1951)

Untuk mendukung proses industrialisasi itu, Pemerintah mendirikan sebuah bank khusus untuk yaitu Bank Industri Negara (BIN) pada tahun 1951. BIN mempunyai dua fungsi pokok, yakni sebagai bank pembangunan industri dan bank investasi jangka panjang di dalam penyediaan asistensi permodalan baik dalam bentuk saham ataupun pembiayaan jangka panjang. Bidang-bidang yang diprioritaskan untuk dibiayai adalah industri manufaktur, pertambangan dan pertanian (Anspach, 1969; 140). Pendirian bank ini dipengaruhi oleh keberadaan World Bank dan Asia Development Bank (ADB) yang masing-masing menjadi bank pembangunan internasional dan regional.⁹

Bank Pemerintah yang lain yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan hasil nasionalisasi dari the *Algemene Volkscredietbank* (AVB) yang sejak semula diprioritaskan untuk menyalurkan kredit kecil, dan pengusaha-pengusaha pedesaan. Pada tahun 1957 BRI telah mempunyai modal sebesar Rp 350 juta yang berasal dari Pemerintah, dan berhasil menyalurkan kredit sebesar sebesar Rp 797 juta. Sebesar 30 % dari total penyaluran itu diperuntukkan untuk usaha kecil, sedangkan pagu kredit untuk usaha kecil itu 50-60 % dialokasikan untuk industri kecil manufaktur, perdagangan dan usaha pertanian (Anspach, 1969: 141).

⁹ Sebagai bank pembangunan, BIN tidak menerima uang simpanan dari masyarakat dan tidak melayani transaksi keuangan untuk pihak ketiga. Selain dari pendanaan Pemerintah, untuk membiayai aktifitasnya BIN menerbitkan obligasi. Selama kurun waktu 1951-1958, BIN telah mengeluarkan lima kali obligasi. Bahkan menurut laporan surat kabar Abadi (1958), para pemegang obligasi Pemerintah banyak beralih ke obligasi BIN, dikarenakan suku bunganya relatif lebih tinggi. Anspach (1969: 140) mencatat selama kurun waktu itu, total investasi BIN sebesar Rp 435 miliar.

Sektor perbankan dan pembiayaan setelah kemerdekaan mengalami perkembangan pesat setelah kemerdekaan. Seperti telah disebutkan di muka, Bank swasta pertama setelah kemerdekaan lahir Surakarta. Pada 1 Nopember 1945 berdiri bank “Bank Soerakarta NAB” yang diinisiasi oleh Keraton Kasoenanan dan Mangkoenagaran dengan manajernya Notosoedirjo yang telah berpengalaman dalam bidang perbankan sejak jaman Belanda dan Jepang. Modal awal bank ini adalah sebesar Rp 2 juta yang dihimpun dari 1331 pemilik saham dari Pulau Jawa, Madura, Sumatera dan Kalimantan. Bank Soerakarta NAB membuka cabang-cabang di Yogyakarta, Klaren, Kudus, Malang, Tasikmalaya dan Cirebon (Sutter, 1959: 346). Bank Soerakarta NAB ini dapat dianggap sebagai representasi dari kalangan priyayi yang mengandalkan jaringan yang cukup luas.

Sementara itu, perkembangan bank-bank swasta juga mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini disebabkan sampai dengan tahun 1954, Pemerintah tidak mengatur pendirian bank swasta, sehingga pendirian bank swasta relatif bebas. Untuk meningkatkan komunikasi diantara bank-bank swasta, pada 25-27 Mei 1952 diadakan kongres di Yogyakarta, yang dihadiri oleh 12 bank-bank pribumi yaitu Indonesia Banking Corporation, Yogyakarta; Bank Surakarta MAI, Solo; Bank Antara, Solo; Bank Dagang Surabaya; Bank Perdagangan Indonesia, Surabaya; Bank Lingga Harta, Klaten; Bank Perniagaan Indonesia, Jakarta; Bank Dagang Nasional Indonesia, Medan; Bank Nasional, Bukit Tinggi; Bank Ekonomi Indonesia, Palembang; Kalimantan Banking & Trading Corp, Samarinda; Bank Dagang Indonesia, Banjarmasin. Kongres ini sepakat mendirikan Perhimpunan Bank-bank Nasional Indonesia (Perbana) (Simorangkir, 2000: 66).

Sementara dari kalangan pengusaha muslim Surakarta, juga tidak mau ketinggalan dalam meramaikan persaingan pada sektor perbankan. Dalam konferensi Sarekat Dagang Islam

Indonesia (SDII) di Surakarta pada 21 sampai 23 Desember 1946 disepakati untuk membentuk perusahaan perdagangan internasional yang bernama N.V. Sarekat Dagang Indonesia dengan modal awal sebesar Rp20 juta dengan cabang di seluruh Jawa dan Madura. Sementara itu untuk mendukung bisnis usaha kecil pribumi, SDII membentuk Bank Pembangoenan Oemat (Sutter, 1959: 440).

Sejalan dengan itu, Pemerintah daerah melalui Djawatan Perekonomian Balai Kota Surakarta, mendirikan bank yaitu bank pusat, bank pasar, dan bank kampung. Sampai akhir tahun 1952, jumlah bank pasar meningkat menjadi 19 buah. Jumlah pinjaman selama tahun 1951-1952 sebesar Rp. 5.081.450,- bagi 75.686 nasabah peminjam. Jumlah bank kampung meningkat menjadi 47 buah, dan selama tahun 1951-1952 jumlah pinjaman sebesar 4.697.514,- bagi 138.879 peminjam. Pada tahun 1951 didirikan pula Bank Pegawai Balai Kota. Selama kurun waktu 1951-1952 telah mengeluarkan pinjaman sebesar Rp. 277.240,- bagi 1.575 nasabah (Mulyadi, 1999: 61-62).

Tabel 2.2. Perkembangan Badan Perkreditan Rakyat di Solo 1950-1952

	1950			1952		
	Bank	Nasabah (orang)	Kredit (rupiah)	Bank	Nasabah (orang)	Kredit (rupiah)
Bank Pusat	1	-	-	1	159	131.950
Bank Pasar	18	28.489	1.156.325	19	75.686	5.081.450
Bank Kampung	42	33.442	720.409	47	138.879	4.697.514
Bank Pegawai Balai Kota	-	-	-	1	1573	277.240

Sumber: Mulyadi, et. al (1999:61-62)

2.2.4 Perkembangan Industrialisasi

Kalau pada periode 1945-1950, agenda ekonomi belum terarah dan sistematis, maka sejak tahun 1951 atau mulai masa demokrasi parlementer, paradigma pembangunan menjadi lebih jelas. Paradigma pembangunan Indonesia pada masa itu mencakup atas tiga isu utama. Pertama diperlukan model pembangunan yang dapat menghancurkan distorsi-distorsi kolonial. Model yang dimaksud adalah model “dorongan kuat” (*big push*), yakni strategi pembangunan yang mendorong semua sektor ekonomi untuk berkembang, melalui kebijakan intervensi pemerintah secara total (Kuntjoro-Jakti, 1981: 34).

Kedua, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah diprioritaskan pada sektor industri. Salah satu argumentasi terhadap pilihan industrialisasi adalah untuk memperbaiki struktur ekonomi yang “berat sebelah” atau cenderung pada sektor pertanian yang hampir 70 % penduduk Indonesia berada pada sektor itu. Padahal sektor pertanian memiliki nilai tambah kecil, dibandingkan sektor industri. Sehingga sudah pada galibnya kalau pemerintah harus mengambil peranan dalam pengembangan industrialisasi (Sumawinata, 1954:33-34). Di sinilah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sangat penting.

Ketiga, memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan kelompok usaha pribumi. Seperti ditunjukkan oleh sikap umum partai-partai yang berpengaruh seperti PNI, Masjumi, NU, PKI, dan PSI memiliki kecenderungan terhadap kebijakan pribumisme, nasionalisme dan anti terhadap pihak asing (Anspach, 1969: 120-121). Hal ini sebagian besar merupakan respons dari adanya adanya dualisme ekonomi dimana terdapat kesenjangan antara pengusaha asing yang kuat dan pribumi yang lemah (Boeke,1953:36).

Berdasarkan tiga paradigma pembangunan itu, Pemerintah menjalankan tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan industrialisasi yang diturunkan dalam Rancangan Urgensi Perekonomian (RUP) yang dijalankan pada 1951-1957. Kedua, intervensi pembangunan melalui berbagai BUMN yang meliputi dalam berbagai sektor baik dari sektor finansial, industri, pertanian, dan sektor-sektor yang lain. Ketiga, program-program populis yang cenderung mendukung pribumisme seperti program Benteng dan PP 10/1959 (Robison, 1986; Muhaimin, 1989).

Pemerintah mulai membangun sektor industri baik yang ringan maupun yang berat, antara tahun 1952-1955 yang didanai oleh BIN. Beberapa contoh industri ringan yang dibangun pada masa itu adalah assembling otomotif yang dilakukan oleh Indonesian Service Company Ltd (ISC), PT Pemintalan Kapas “Tjilatjap”, dan NV. Pabrik Karung “Rosella”. Pembangunan Semen Gresik adalah salah satu contoh industri berat, yang dibangun sejak tahun 1953 dan mulai beroperasi pada tahun 1957. Pemerintah juga melakukan industrialisasi di luar Jawa. Perusahaan pertama yang didirikan adalah Sukur Desiccated Coconut Factory (Sudesco) di Sukur, Minahasa. Selain itu, didirikan industri kertas di Takengon, Aceh yaitu PT. Perusahaan Kertas Takengon (Sutter, 1959:788-789). BNI juga berpartisipasi dalam mendirikan beberapa perusahaan negara seperti Central Trading Company (CTC), PD Putera, PT Jakarta Lloyd, Maskapai Asuransi Murni, PN Asuransi Jiwasraya Unit, II, dan Maskapai Asuransi Indonesia (Wijaya dan Hadiwigeno, 1991: 342).

Sementara itu, Pemerintah Pusat juga membangun dan mengembangkan induk industri di berbagai tempat termasuk salah satunya di Surakarta. Khusus untuk daerah Surakarta, ditempatkan induk perusahaan pembuatan payung di Juwiring, Klaten. Sementara yang lainnya adalah keramik (Purwakarta; Mayong, Malang); perkayuan (Klender); pertekstilan (Majalaya); besi

(Cisaat, Ciwidei, Batur, Barong, Madiun); penyamakan kulit (Pamekasan, Magelang dan Magetan); kayu (Pasuruan); payung (Sidoarjo); kuningan (Sukaraja) (Siahaan, 1996:210).

Untuk memperkuat eksistensi industri batik, maka pada 18 September 1948 di Yogyakarta didirikan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) yang berkantor pusat di Jakarta. Terdapat 21 koperasi primer yang bergabung dengan GKBI yakni Batari (Surakarta); Bakti (Ponorogo); BTA (Tulungagung); Gaperbi (Tegal); Gresik (Gresik); Kobain (Kudus); Kopindo (Wiradesa Pekalongan); KPBD (Jakarta); KPBI (Sidoardjo); Wonopringgo (Pekalongan); Mitra-Batik (Tasikmalaya); Perbaik (Purworejo); PPB (Pekajangan); PPBI (Yogyakarta); PPIP (Pekalongan); Perbain (Sukaraja); Rukun Batik/CPBB (Ciamis); Sakti (Kebumen); Setono (Batang); Trusmi (Cirebon) dan Buaran (Pekalongan). Tujuan didirikan GKBI salah satunya adalah mengatasi masalah akses bahan baku untuk koperasi-koperasi batik primer anggotanya Untuk itu pada tahun 1949, GKBI mengambil alih NV Batik Trading Company suatu perusahaan importir bahan baku batik yakni kain mori (LPEM, 1958: 264).

Dengan diberlakukannya Program Benteng, posisi GKBI menjadi semakin kuat. Sebelum tahun 1955, GKBI hanya merupakan distributor kain mori dan mendistribusikan kepada anggotanya, sedangkan yang mempunyai hak mengimpor adalah Jajasan Persediaan dan Perbekalan (JPP). Namun sejak tahun 1955, seiring dilikuidasinya JPP, hak monopoli mengimpor kain mori jatuh ke GKBI. Ini menyebabkan GKBI dan koperasi primer anggotanya mengalami peningkatan pendapatan (LPEM, 1958: 264). Sebagai contoh Koperasi Batari salah satu koperasi batik primer di Surakarta mengalami kenaikan omzet yang signifikan. Pada tahun 1954 omzetnya sebesar Rp. 94. 986.454,-; dan pada tahun 1957 meningkat menjadi Rp. 182.505.078. Namun situasi ini tidak berlangsung lama, karena adanya konflik internal pengurus

koperasi batik Batari di Surakarta menyebabkan penurunan omzet. Konflik dipicu karena sebagian besar pengusus Batari berafiliasi dengan Masyumi, dianggap tidak mengakomodir kepentingan anggota dari partai lain seperti NU, PNI dan PKI. Sehingga sebagian anggota yang tidak puas tersebut mendirikan Pamong Pengusaha Batik Surakarta (PPBS) di Laweyan yang anggota dan pengurusnya cenderung berafiliasi NU dan PNI (Mulyadi, et, al, 1999: 62-63).

2.2.5 Perkembangan Industrialisasi

Kalau pada periode 1945-1950, agenda ekonomi belum terarah dan sistematis, maka sejak tahun 1951 atau mulai masa demokrasi parlementer, paradigma pembangunan menjadi lebih jelas. Paradigma pembangunan Indonesia pada masa itu mencakup atas tiga isu utama. Pertama diperlukan model pembangunan yang dapat menghancurkan distorsi-distorsi kolonial. Model yang dimaksud adalah model “dorongan kuat” (*big push*), yakni strategi pembangunan yang mendorong semua sektor ekonomi untuk berkembang, melalui kebijakan intervensi pemerintah secara total (Kuntjoro-Jakti, 1981: 34).

Kedua, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah diprioritaskan pada sektor industri. Salah satu argumentasi terhadap pilihan industrialisasi adalah untuk memperbaiki struktur ekonomi yang “berat sebelah” atau cenderung pada sektor pertanian yang hampir 70 % penduduk Indonesia berada pada sektor itu. Padahal sektor pertanian memiliki nilai tambah kecil, dibandingkan sektor industri. Sehingga sudah pada galibnya kalau pemerintah harus mengambil peranan dalam pengembangan industrialisasi (Sumawinata, 1954:33-34). Di sinilah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sangat penting.

Ketiga, memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan kelompok usaha pribumi. Seperti ditunjukkan oleh sikap umum partai-partai yang berpengaruh seperti PNI, Masjumi, NU, PKI, dan PSI memiliki kecenderungan terhadap kebijakan pribumisme, nasionalisme dan anti terhadap pihak asing (Anspach, 1969: 120-121). Hal ini sebagian besar merupakan respons dari adanya adanya dualisme ekonomi dimana terdapat kesenjangan antara pengusaha asing yang kuat dan pribumi yang lemah (Boeke, 1953:36).

Berdasarkan tiga paradigma pembangunan itu, Pemerintah menjalankan tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan industrialisasi yang diturunkan dalam Rancangan Urgensi Perekonomian (RUP) yang dijalankan pada 1951-1957. Kedua, intervensi pembangunan melalui berbagai BUMN yang meliputi dalam berbagai sektor baik dari sektor finansial, industri, pertanian, dan sektor-sektor yang lain. Ketiga, program-program populis yang cenderung mendukung pribumisme seperti program Benteng dan PP 10/1959 (Robison, 1986; Muhaimin, 1989).

Pemerintah mulai membangun sektor industri baik yang ringan maupun yang berat, antara tahun 1952-1955 yang didanai oleh BIN. Beberapa contoh industri ringan yang dibangun pada masa itu adalah assembling otomotif yang dilakukan oleh Indonesian Service Company Ltd (ISC), PT Pemintalan Kapas “Tjilatjap”, dan NV. Pabrik Karung “Rosella”. Pembangunan Semen Gresik adalah salah satu contoh industri berat, yang dibangun sejak tahun 1953 dan mulai beroperasi pada tahun 1957. Pemerintah juga melakukan industrialisasi di luar Jawa. Perusahaan pertama yang didirikan adalah Sukur Desiccated Coconut Factory (Sudesco) di Sukur, Minahasa. Selain itu, didirikan industri kertas di Takengon, Aceh yaitu PT. Perusahaan Kertas Takengon (Sutter, 1959:788-789). BNI juga berpartisipasi dalam mendirikan beberapa perusahaan negara seperti Central

Trading Company (CTC), PD Putera, PT Jakarta Lloyd, Maskapai Asuransi Murni, PN Asuransi Jiwasraya Unit, II, dan Maskapai Asuransi Indonesia (Wijaya dan Hadiwigeno, 1991: 342).

Sementara itu, Pemerintah Pusat juga membangun dan mengembangkan induk industri di berbagai tempat termasuk salah satunya di Surakarta. Khusus untuk daerah Surakarta, ditempatkan induk perusahaan pembuatan payung di Juwiring, Klaten. Sementara yang lainnya adalah keramik (Purwakarta; Mayong, Malang); perkayuan (Klender); pertekstilan (Majalaya); besi (Cisaat, Ciwidei, Batur, Barong, Madiun); penyamakan kulit (Pamekasan, Magelang dan Magetan); kayu (Pasuruan); payung (Sidoarjo); kuningan (Sukaraja) (Siahaan, 1996:210).

BOKS 2.3: KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI SETELAH KEMERDEKAAN

Kebijakan industrialiasasi tertuang dalam Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang disusun oleh Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojohadikusumo dipublikasikan pada April 1951. RUP merancang “industri-industri kunci” yang akan didirikan, meliputi industri pertahanan, kimia dasar, semen, listrik, air minum dan transportasi. Pemerintah pada 31 Agustus 1951 mengeluarkan ketentuan yang lebih memperjelas program industrialisasi yaitu (1) Pemerintah menjadi penggerak pembangunan, tanpa mengesampingkan pihak swasta; (2) Tujuan dari industrialisasi adalah menyeimbangkan struktur ekonomi, mendayagunakan pertambahan penduduk, dan meningkatkan pendapatan nasional; (3) Bentuk dasar industrialisasi adalah bergerak dari industri kecil, menengah dan besar yang mendukung proses pembangunan perdesaan. (Sutter, 1959:774-778).

Selain itu, Pemerintah juga mempersilahkan investasi asing mendukung proses industrialisasi. Untuk mengelaborasi masuknya investasi asing, Pemerintah membagi jenis-jenis industri dalam empat kelompok (1) Industri yang dimiliki oleh Pemerintah dan partisipasi investasi asing dalam segala sektor kecuali pertahanan dan fasilitas umum; (2) Industri yang hanya diperuntukkan kepada pengusaha Indonesia, termasuk industri usaha kecil dan tradisional; (3) Industri-industri kunci (*basic or key industries*) dapat dimasuki oleh investor asing dengan catatan kontrol atas industri tersebut tetap ditangan modal domestik (lebih dari 51 %), dan jika tidak ada peminat dalam negeri maka Bank Industri Negara (BIN) yang menjadi partisipan dari pihak Indonesia; (4) Beberapa macam industri yang lain (*miscellaneous*) dimana modal asing dengan domestik dapat melakukan kerjasama tanpa pembatasan struktur permodalannya, tetapi harus untuk tempat melakukan pelatihan para pekerja Indonesia (Sutter, 1959:779).

Untuk memperkuat eksistensi industri batik, maka pada 18 September 1948 di Yogyakarta didirikan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) yang berkantor pusat di Jakarta. Terdapat 21 koperasi primer yang bergabung dengan GKBI yakni Batari (Surakarta); Bakti (Ponorogo); BTA (Tulungagung); Gaperbi (Tegal); Gresik (Gresik); Kobain (Kudus); Kopindo (Wiradesa Pekalongan); KPBD (Jakarta); KP BIS (Sidoardjo); Wonopringgo (Pekalongan); Mitra-Batik (Tasikmalaya); Perbaik (Purworejo); PPB (Pekajangan); PPBI (Yogyakarta); PPIP (Pekalongan); Perbain (Sukaraja); Rukun Batik/CPBB (Ciamis); Sakti (Kebumen); Setono (Batang); Trusmi (Cirebon) dan Buaran (Pekalongan). Tujuan didirikan GKBI salah satunya adalah mengatasi masalah akses bahan baku untuk koperasi-koperasi batik primer anggotanya Untuk itu pada tahun 1949, GKBI mengambil alih NV Batik Trading Company suatu perusahaan importir bahan baku batik yakni kain mori (LPEM, 1958: 264).

Tabel 2.3. Jumlah Perusahaan Koperasi di Jawa Tengah dan DIY Tahun 1958

No	Daerah	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pengusaha Asing
1.	Ponorogo	417	-
2.	Yogyakarta	648	7
3.	Pekalongan	3.078	37
4.	Surakarta	1.191	192

Sumber: LPEM UI, 1958:237

Dengan diberlakukannya Program Benteng, posisi GKBI menjadi semakin kuat. Sebelum tahun 1955, GKBI hanya merupakan distributor kain mori dan mendistribusikan kepada anggotanya, sedangkan yang mempunyai hak mengimpor adalah

Jajasan Persediaan dan Perbekalan (JPP). Namun sejak tahun 1955, seiring dilikuidasinya JPP, hak monopoli mengimpor kain mori jatuh ke GKBI. Ini menyebabkan GKBI dan koperasi primer anggotanya mengalami peningkatan pendapatan (LPEM, 1958: 264). Sebagai contoh Koperasi Batari salah satu koperasi batik primer di Surakarta mengalami kenaikan omzet yang signifikan. Pada tahun 1954 omzetnya sebesar Rp. 94. 986.454,-; dan pada tahun 1957 meningkat menjadi Rp. 182.505.078. Namun situasi ini tidak berlangsung lama, karena adanya konflik internal pengurus koperasi batik Batari di Surakarta menyebabkan penurunan omzet. Konflik dipicu karena sebagian besar pengusus Batari berafiliasi dengan Masyumi, dianggap tidak mengakomodir kepentingan anggota dari partai lain seperti NU, PNI dan PKI. Sehingga sebagian anggota yang tidak puas tersebut mendirikan Pamong Pengusaha Batik Surakarta (PPBS) di Laweyan yang anggota dan pengurusnya cenderung berafiliasi NU dan PNI (Mulyadi, et, al, 1999: 62-63).

2.2.6 Kondisi Eksisting Kota Surakarta Pada Awal Orde Baru

Gerakan Tiga Puluh Septemeber menjadi titik balik perubahan politik dan ekonomi Indonesia. Pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) ini bermuara terhadap instabilitas politik dan perekonomian Indonesia. Setelah proses penyerahan wewenang dari rezim orde lama kepada rezim baru, beberapa langkah strategis ditempuh oleh rezim baru. Salah satu langkah strategis tersebut adalah langkah-langkah stabilisasi ekonomi. Langkah-langkah stabilisasi ekonomi tersebut mencakup penyediaan kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif serta diarahkan pada aspek-aspek berikut ini (BIES, 1966):

- a. Penciptaan institusi yang kondusif untuk mengimplementasikan sistem ekonomi pasar.
- b. Pencapaian anggaran belanja yang seimbang.

- c. Inisiasi kebijakan kredit dalam suatu sistem perbankan yang terencana
- d. Pengembangan sistem hubungan ekonomi domestik dengan internasional melalui sistem nilai tukar yang tepat guna memberikan stimulan untuk membalikan kecenderungan neraca pembayaran yang negatif.

Implementasi aspek-aspek di atas ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang urgen seperti: pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pencukupan kebutuhan sandang (Rahardjo.dkk, 1995).

Kehadiran program stabilisasi ekonomi merupakan angin segar bagi masyarakat yang sejak tahun 1961 mengalami masa-masa sulit dalam tahapan hidupnya. Beberapa indikator makroekonomi menunjukkan betapa beratnya beban hidup yang harus dijalani oleh rakyat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sikap antisipatif Bank Indonesia terhadap defisit anggaran yang berpotensi menyebabkan inflasi akhirnya terjadi pada tahun-tahun terakhir demokrasi terpimpin.

Pembiayaan besar yang digunakan untuk program nasionalisasi pengusaha dan pembangunan infrastruktur di Indonesia mengakibatkan kenaikan defisit anggaran secara signifikan. Melalui konsep Bank Berdjombang defisit anggaran dibiayai oleh percetakan uang. Rata-rata kenaikan uang beredar sejak tahun 1950 mencapai 72,64 persen. Sementara defisit anggaran semakin tidak terkendali, pada tahun 1963-1965 defisit anggaran mencapai nilai 1300 juta. Ketidakseimbangan moneter yang terjadi di bidang fiskal dan neraca pembayaran berakibat langsung berdampak terhadap tingginya tingkat inflasi di Indonesia. Sejak peranan keraton berkurang dan arah perekonomian sangat ditentukan oleh kebijakan perekonomian nasional, seluruh perkembangan perekonomian di Jakarta

berpengaruh terhadap perekonomian di Eks-Surakarta. Inflasi yang tinggi di Jakarta juga dialami oleh perekonomian Surakarta pada saat itu.

Selain kondisi ekonomi yang memburuk, Surakarta harus menghadapi suatu bencana terbesar sepanjang sejarah Surakarta. Banjir besar melanda Surakarta pada tanggal 16 maret 1966. Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Wonogiri setelah hujan terjadi sehari-hari. Banjir tersebut telah menyebabkan sekitar 13.000 orang menjadi gelandangan karena kehilangan rumah (Harian Angkatan Bersenjata, 1 Mei 1966). Banjir juga mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian mengalami kerusakan yang cukup parah.

Berbagai kesulitan yang melanda Surakarta pada saat itu baik kesulitan yang disebabkan oleh instabilitas perekonomian nasional maupun bencana regional. Walaupun demikian perekonomian Surakarta sangat terbantu oleh kondisi eksisting Surakarta pada masa sebelum kemerdekaan dan orde lama. Basis kegiatan eksisting ekonomi di Surakarta adalah sektor perkebunan terutama tanaman tebu dan produk hasil olahannya yaitu gula. Selain tanaman perkebunan di atas terdapat beberapa kegiatan ekonomi eksisting lainnya di Surakarta yang mampu bertahan setelah krisis politik dan ekonomi tahun 1966. Dalam buku Runtuhnya Kekuasaan “Keraton Alit”, beberapa kegiatan ekonomi eksisting yang bertahan antara lain yaitu: Perusahaan Air Minum, Perusahaan Listrik Negara, Pegadaian, dan PN Lokananta. Struktur pengelolaan beberapa perusahaan tersebut berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kotamadya Surakarta. Selain sektor publik, beberapa perusahaan sektor swasta juga mampu bertahan di era krisis ekonomi dan bencana yang terjadi di surakarta saat itu. Meskipun beberapa perusahaan besar dan sedang mampu bertahan namun umumnya sektor swasta yang mampu bertahan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kecil. Dalam bagian

lain buku di atas tercatat beberapa fakta penting terkait dengan kondisi eksisting perekonomian Surakarta pada tahun 1968 yang ditunjukkan oleh data berikut ini:

Tabel 2.4. Kondis Eksisting Perekonomia Surakarta 1968

Industri	Jumlah Industri	Tenaga Kerja
Sandang		
- Perusahaan Batik Kecil	1809	1000
- Perusahaan Printing	31	1200
- ATBM	445	1000
- ATM	15	1050
- Konveksi	82	n.a.
- Perajutan	6	60
- Finishing	6	100
Kerajinan	398	2012
Makanan		
- 22 komoditi (roti, pengolahan daging dan Jamu)	350	2545
Percetakan	89	500
Rokok		
- Rokok Kretek	21	460
- Rokok Putih	1	126

Sumber: Mulyadi. Et.al, 1999

Krisis politik dan ekonomi pada tahun 1966 secara signifikan berpengaruh terhadap industri tekstil terutama batik di Surakarta. Sebelum krisis 1966 industri batik di eksSurakarta mampu menyerap 43.500 buruh (EKI, 1958). Setelah krisis ekonomi dan politik tahun 1966 peran industri batik menurun

drastis terhadap perekonomian Surakarta. Industri batik hanya menyerap 6422 buruh. Sebagian besar industri yang tersisa setelah krisis politik dan ekonomi 1966 adalah industri yang dibangun oleh program Benteng (Mulyadi, 1999). Meskipun demikian lebih banyak industri produk program Benteng yang mati akibat krisis ekonomi dan politik 1966. Sentra industri payung di Juwiring dan Batik Lurik di Pedan adalah beberapa industri yang sanggup bertahan setelah tahun 1966 yang dikembangkan oleh program selain program Benteng. Program yang digunakan sebagai pemicu guna mendukung industri ini adalah RUP (Rencana Urgensi Pertanian) atau yang dikenal juga dengan Sumitro Plan.

Selain industri sandang/tekstil industri lain yang penting adalah industri makanan/minuman dan rokok. Pada tahun 1968 tercatat 350 perusahaan yang bergerak di 22 jenis komoditi diantaranya yaitu: industri roti, abon daging sapi dan Jamu. Industri lain yang mampu bertahan setelah krisis politik dan ekonomi tahun 1966 di Eks-Surakarta adalah industri rokok. Meskipun industri rokok di Solo belum mampu bersaing secara optimal seperti industri rokok di Kudus dan Surabaya, industri ini merupakan industri yang cukup mengalami kuat dalam menghadapi badai krisis ekonomi dan politik tahun 1966. Dalam perkembangannya saat ini industri rokok adalah salah satu industri yang mengalami involusi setelah kalah bersaing dengan industri sejenis di Indonesia. Industri kerajinan adalah industri lain yang masih bertahan setelah krisis tahun 1966. Beberapa jenis industri tersebut antara lain yaitu industri sepatu, tali temali, karton, batu akik, kulit, batu akik dan industri payung. Kondisi eksisting di atas menjadi modal utama untuk lanjutan proses stabilisasi perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan sektor industri, sektor pertanian di Eks-Surakarta sudah lama diidentifikasi oleh Boeke (1953) berada dalam fase ekspansi statis. Karakteristik pertanian di Eks-Surakarta

adalah pertanian padat karya. Hal ini menyebabkan sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor primadona dalam perekonomian Surakarta. Magnit sektor pertanian menyebabkan kepadatan penduduk di Eks-Surakarta meningkat drastis dan mencapai 3000 orang per mil persegi. Fenomena ini menjadi faktor penyebab Boeke melihat potensi situasi malthusian berpotensi terjadi di dalam pertanian di Indonesia dan Eks-Surakarta pada khususnya. Meskipun demikian pola pikir subsisten petani tidak terjadi di Indonesia. Sehingga hipotesis Schultz (1964) tidak dapat dibuktikan di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya menurut Penny (1966) adalah 1) secara umum masih terdapat potensi lahan pertanian yang belum dieksploitasi secara maksimal; 2) masih terdapat kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas melalui perubahan pola-pola produksi pertanian. Aspek di atas menggambarkan potensi pengembangan pertanian berdasarkan kondisi eksistensinya. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan selama orde lama tidak menyentuh akar permasalahannya. Pemerintah secara konsisten mengurangi hasil produk pertanian relatif terhadap harga input pertanian. Sehingga secara umum, kondisi eksisting pertanian setelah orde lama berciri suatu pertanian yang rendah inovasi dan relatif rendahnya investasi di sektor pertanian. Kondisi ini sama dengan kondisi yang dialami oleh sektor perkebunan di Eks-Surakarta, terutama perkebunan tebu. Tidak terdapat inovasi yang signifikan serta investasi terhadap mesin-mesin hasil peninggalan Belanda karena tekanan terhadap harga gula relatif terhadap perlindungan harga input produksi.

Daya tarik masyarakat untuk bekerja di banyak sektor potensial di Eks Surakarta seperti sektor industri, pertanian, dan perkebunan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Surakarta secara signifikan. Kondisi tersebut mendorong politisi orde lama memposisikan Eks-Surakarta sebagai salah satu daerah

penting. Salah satu industri yang berkembang sebagai akibat meningkatnya pandangan politisi tersebut adalah industri percetakan koran. Industri inilah yang menjadi salah satu kekuatan industri lain selain beberapa industri di atas yang bertahan setelah krisis ekonomi dan politik 1966.

3

SURAKARTA PADA MASA ORDE BARU

Pada bab ini akan dibahas evolusi ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya pada masa Orde Baru. Pertama kali akan dibahas dinamika politik awal Orde Baru diantaranya adalah peristiwa Malari dan kerusuhan rasial di Surakarta. Kedua akan dibahas masalah dinamika ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta meliputi era awal Orde Baru, Bonanza Minyak hingga resesi ekonomi.

3.1 Dinamika Politik

3.1.1 Malari dan Kerusuhan Rasial 1980-an

Sebagaimana daerah lain, situasi politik di Surakarta juga sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di Jakarta. Beberapa peristiwa penting pada masa awal Orde Baru yang terjadi di Jakarta antara lain seperti Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) dan Gerakan Gempur Soeharto pada tahun 1978 juga terjadi di Surakarta. Peristiwa Malari adalah peristiwa anti modal asing di mana momentum aksinya dilakukan ketika kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Pada mulanya demonstrasi mahasiswa yang dipelopori oleh Dewan Mahasiswa UI berlangsung damai, namun berakhir dengan kerusuhan anti Jepang di jalan-jalan Jakarta. Dalam kerusuhan itu terdapat 1000 kendaraan dan 144 gedung rusak terbakar. Disinyalir gerakan mahasiswa yang murni

telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang mengrucut kepada pertarungan elit militer antara Jend. Ali Moertopo dan Jend. Soemitro (Bresnan, 1993: 137-138).¹⁰

Sementara, gerakan “Gempur Soeharto” pada tahun 1977/1978 yang dipelopori Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mengeluarkan buku putih yang mengevaluasi kinerja Presiden Soeharto. Gerakan ini ternyata mendapat sambutan hampir semua Dewan Mahasiswa Universitas se-Indonesia. Inti dari gerakan ini adalah aktivis mahasiswa tidak menyetujui kalau Presiden Soeharto menjadi Presiden kembali. Untuk itu Pemerintah melakukan penangkapan para aktivis Dema di kampus-kampus dan sebagian dimasukkan ke penjara. Selain itu, pemerintah juga membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan Badan Koordinasi Kegiatan (BKK), serta menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang bertujuan membatasi peran politik mahasiswa (Bresnan, 1993: 197-198).

Di luar kejadian skala nasional yang berpengaruh secara regional itu, di Surakarta sendiri juga terjadi konflik lokal yang cukup besar pada era 1980-an. Pada 19 Nopember 1980 terjadi kerusuhan besar di Surakarta dan menjalar ke berbagai kota di Jawa Tengah. Kerusuhan itu bermula dari masalah sepele yakni serempetan sepeda siswa-siswa Sekolah Guru Olahraga (SGO) sepulang sekolah seorang pejalan kaki di Jl. Jend. Oerip Sumohardjo, persoalannya kemudian bergeser menjadi kerususan rasial berupa pembakaran dan pengrusakan toko-toko Tionghoa. Pada 23 Nopember 1980, Pangdam Diponegoro Mayjen Soekotjo menghimbau agar masyarakat mengendalikannya diri ternyata tidak mempan. Terbukti dua hari kemudian, kerusuhan juga melanda

¹⁰ Pada Peristiwa Malari yang ditangkap adalah para tokoh mahasiswa seperti Hariman Siregar (UI), Sjahrir (UI), dan Aini Chalid (UGM), sedangkan tokoh yang dianggap terlibat dalam gerakan ini adalah Sarbini Sumawinata (Guru Besar FE UI) dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Dosen FE UI).

Semarang, Purwadadi, Kudus, dan Pati (Mulyadi, et. al, 1999: 306).

Di Kota Semarang kerusakan telah mengakibatkan kerugian yang besar. Tercatat sedikitnya 15 pabrik besar dan kecil rusak. Kerugian terbesar diderita oleh PT Arta Elektronik sekitar Rp1,2 milyar dan PT Standard Battery Rp600 juta. Di Kota Kudus, hampir semua pabrik tidak beroperasi selama 3 hari mulai 28 Nopember. Sementara Yogyakarta, selamat tidak tersentuh huru hara, namun di sana-sini banyak dijumpai poster bertuliskan “Revolusi Sosial”. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kejadian ini disebabkan oleh adanya gap antara kelompok pri dan non pri. Namun sebagian yang lain menolak pendapat ini yang menganggap bahwa ini tidak ada kaitannya dengan masalah rasial, namun kemungkinan adanya kesenjangan ekonomi secara umum (Mulyadi, et. al, 1999:306).

3.2 Dinamika Ekonomi

3.2.1 Paradigma Pembangunan Orde Baru

Setelah Gerakan 30 September (G30S) dan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) praktis kekuasaan beralih dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Sejak itu jargon-jargon ekonomi politik mengalami perubahan yang tajam, rezim baru ini menamakan dirinya sebagai Pemerintah Orde Baru, dan memberi nama kepada rezim terdahulu sebagai Orde Lama. Secara umum kebijakan pembangunan Orde Baru merupakan antitesis dari paradigma pembangunan pada masa Presiden Soekarno. Jika paradigma pembangunan Presiden Soekarno bertujuan menghancurkan distorsi-distorsi kolonial, maka paradigma pembangunan Orde Baru mengubah arah pembangunan ekonomi menjadi lebih pragmatis.

Kebijakan pragmatisme pada masa awal Orde Baru dapat dikelompokkan menjadi tiga hal (Sadli, 1997: 243). Pertama, adalah membuka diri terhadap adanya investasi asing. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya UU PMA dan PMDN pada tahun 1968. Kedua, menjalin kembali kerjasama dengan kekuatan barat dan lembaga keuangan multilateral yakni Bank Dunia dan IMF pada tahun 1967. Ketiga, mendorong lahirnya kebijakan stabilisasi dan rekonstruksi untuk pemulihan perekonomian dan pijakan awal bagi pembangunan berkelanjutan, yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berbasiskan kepada pembangunan sektor pertanian.

Alasan pertama dan kedua menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan kapital luar negeri. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pragmatis akan berjalan dengan baik jika didukung stabilitas politik. Kekuatan inti untuk mempertahankan stabilitas politik tersebut terletak kepada kelompok militer yang berhasil mengkonsolidasi kelompok teknokrat, birokrasi, dan pengusaha oligopoli. Keberhasilan dari konsolidasi itu mendorong lahirnya proses kebijakan yang teknokratik-birokratik, pemobilisasian massa, dan tindakan represif untuk mengendalikan oposisi. Selain itu, dalam operasionalnya Pemerintah Orde Baru menempatkan Sekretariat Negara sebagai pusat aktifitas yang mengkoordinir seluruh kebijakan pembangunan, bahkan sangat kuatnya lembaga ini dapat mengalahkan peranan departemen-departemen di dalam pemerintahan (Mohtar Mas'oed, 1989: 204-207).

Namun menurut William Liddle (1996:17) kelompok-kelompok yang ada seperti militer, sekretariat negara maupun Golkar sekalipun itu, bukanlah institusi sentral dalam sistem politik Indonesia, karena pemain utama Pemerintah Orde Baru hanya satu yakni Soeharto itu sendiri. Liddle berpendapat bahwa Presiden Soeharto selama dua dekade lebih berhasil mengelola interaksi

lembaga-lembaga yang ada. Presiden berhasil memegang kendali militer dan birokrasi secara sempurna. Golkar menjadi alat efektif sebagai mesin partai yang selalu berhasil memenangkan Pemilu. Pendeknya Presiden Soeharto dapat memainkan semua lembaga dan pelaku politik secara harmonis sesuai dengan kemauannya. Demikian halnya dalam bidang ekonomi, Presiden Soeharto juga berhasil menjaga keseimbangan diantara pelaku-pelaku yang berkepentingan seperti teknokrat, kelompok nasionalis, maupun konglomerat.

BOKS 3.1. PERANAN PARA TEKNOKRAT DALAM PEMBANGUNAN

Teknokrat adalah sekelompok intelektual yang mendasarkan atas ilmu dan teknologi dalam membentuk sistem ekonomi. Mereka berasal dari kalangan akademik atau professional, biasanya didikan dari luar negeri yang kemudian memegang posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan, uraian selengkapnya lihat Karen Beth Brooks (1997:1) Dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi sejak awal Orde Baru, Presiden Soeharto dibantu oleh sekelompok ekonom yang juga disebut teknokrat. Sebagian besar dari mereka adalah ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Di dalam tubuh teknokrat dapat dibagi dua kelompok. Pertama, adalah teknokrat generasi awal yang oleh Karen Beth Brooks (1997:69-71) disebut sebagai kelompok inti (*core group*) yang terdiri atas Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli dan Subroto. Dari lima orang itu, kecuali Sadli dan Subroto, adalah alumni University of California, Berkeley, maka tidak mengherankan jika kelompok tersebut oleh beberapa kalangan disebut sebagai “mafia Berkeley”. Sadli menjabat sebagai menteri sampai dengan periode 1973-1978, Wijoyo Nitisastro dan Subroto sampai dengan 1978-1983, sedangkan Ali Wardhana sampai dengan 1983-1988. Setelah itu, baik Widjojo Nitisastro maupun Ali Wardhana tetap menjadi penasehat utama Presiden Soeharto sampai tahun 1998.

Kedua, adalah teknokrat karir yang terdiri atas Radius Prawiro, Rachmat Saleh, JB Sumarlin, yang kemudian ditambah Arifin Siregar, Saleh Affif, Adrianus Mooy, Soedrajad Djiwandono, dan Mar’ie Mohammad. Mereka telah menduduki beberapa jabatan strategis seperti Menteri, Menteri Muda atau Gubernur Bank Indonesia. Sebelum menduduki berbagai jabatan itu mereka telah lama berkarir dalam birokrasi tersebut.

Gambaran di atas menggambarkan kondisi eksisting perekonomian Eks-Surakarta yang dapat digambarkan sebagai *initial condition* perekonomian Surakarta dalam berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi pada masa orde baru. Langkah-langkah strategis awal yang dilakukan oleh Kabinet Ampera belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Eks-Surakarta. Prioritas utama pemerintah adalah melakukan program stabilisasi untuk merenormalisasi situasi perekonomian Indonesia secara makro. Renormalisasi untuk mengembalikan sistem ekonomi pasar di Indonesia difokuskan melalui penguatan kelembagaan yang menyangkut aspek-aspek antara lain yaitu:

- a. pengaturan kelembagaan untuk membebaskan bisnis dari intervensi birokrasi, perusahaan negara diatur dalam sistem kompetisi bebas. Proses ini juga mencakup diakhirinya preferensi khusus terhadap perusahaan negara dalam memperoleh kredit dan alokasi nilai tukar.
- b. anggaran yang seimbang meminimalisasi defisit;
- c. kebijakan kredit melalui reformasi struktur perbankan;
- d. kebijakan luar negeri termasuk kebijakan nilai tukar, pengurangan terhadap lisensi impor serta dorongan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia.

Aspek-aspek komitmen tersebut dipaparkan secara komprehensif di depan sidang IGGI di Paris. Komprehensifitas aspek-aspek tersebut menjadi kredit poin tersendiri bagi pemerintah orde baru guna mendapatkan kepercayaan untuk mengelola pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Implementasi strategis konsep-konsep di atas adalah diberlakukannya UU tentang PMA pada agustus 1968 dan PMDN pada tahun 1967. BKPM sebagai badan yang ditunjuk untuk koordinasi penanaman modal mensyaratkan PMA dan PMDN yang bergerak di sektor prioritas seperti kehutanan, pertanian dan industri substitusi impor memiliki deposit 25 persen

dari nilai investasi total di perbankan nasional. Sementara industri lain yang sifatnya non-prioritas diharuskan memiliki deposit sebesar 50 persen dari nilai investasi total untuk jaminan terhadap pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk merevitalisasi sektor industri di Indonesia guna menciptakan kesejahteraan Indonesia baru yang lebih baik.

Secara teknis implementasi inisiatif kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan pada Pelita I. Pelita I diprioritaskan pada pembangunan industri substitusi impor dan industri yang memproduksi input di sektor pertanian seperti (pupuk, kimia dan semen) dan industri yang menghasilkan kebutuhan dasar konsumen seperti tekstil. Pengeluaran investasi pemerintah pada Pelita I dikonsentrasikan pada tiga sektor utama yaitu:

Tabel 3.1. Pengeluaran Investasi Pemerintah Pelita I

No	Sektor	Pengeluaran APBN	Keterangan
1	Pertanian	Rp305 Milyar	Digunakan untuk rehabilitasi sistem irigasi, pembiayaan pupuk dan Pestisida di bawah proyek Bimas
2	Pertambangan	Rp380 Milyar	Revitalisasi Pertamina
3	Komunikasi	Rp265 Milyar	Penyiapan infrastruktur telekomunikasi untuk mengefektifkan koordinasi dengan daerah mengingat wilayah kita yang luas
4	Kesejahteraan Rakyat	Rp172 Milyar	Pemulihan Kesejahteraan Rakyat
5	Listrik	Rp100 Milyar	-

Sumber: Robison, 1986

Kebijakan-kebijakan awal selama Pelita I berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Setelah mengalami depresi ekonomi pada tahun 1966, pada tahun 1967 perekonomian Indonesia tumbuh 140 persen. Namun, efek kejutan dari perubahan fundamental program stabilisasi belum optimal. Keberlanjutan proses *recovery* dari depresi ekonomi 1965 tidak terjaga dengan baik. Pada tahun 1968 dan 1969 kualitas pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan kondisi perekonomian pada tahun 1969 kembali negatif. Kondisi tersebut tersaji pada grafik 5.1.

Di Eks-Surakarta Pelita I juga dirasakan sebagai masa-masa rehabilitasi perekonomian. Revitalisasi perekonomian Eks-Surakarta sangat terbantu oleh program ini. Revitalisasi ini diharapkan memberikan angin segar setelah krisis ekonomi dan politik serta bencana banjir 1966. Dampak kebijakan-kebijakan pemerintah baru ini terhadap perkembangan sektor industri adalah proses rekapitulasi sektor industri di Surakarta. Sebagian besar perusahaan modern di Surakarta menikmati fasilitas ini. Hal tersebut disebabkan hanya sektor usaha yang memiliki surat izinlah yang boleh menerima kredit awal pemerintah dalam melakukan revitalisasi industri. Selain bantuan kredit, situasi krisis hanya menyisakan sedikit perusahaan dalam persaingan pasar. Permintaan yang tinggi di pasar domestik, serta insentif terhadap ekspor ke luar negeri menjadi benefit tersendiri bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Revitalisasi sektor usaha ini menghasilkan beberapa pengusaha-pengusaha generasi baru. Upaya stabilisasi ekonomi dan rekonsolidasi politik yang disertai oleh inisiasi dan upaya diplomasi internasional mulai menunjukkan hasil positif. Diplomasi yang bertujuan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap pengelolaan ekonomi yang lebih baik mulai menampakkan hasil. Beberapa komitmen bantuan yang berbentuk *government to government* maupun multilateral adalah bukti sambutan dan dukungan terhadap proses perbaikan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tren positif dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tren pertumbuhan positif, terjadinya *oil boom* atau bonanza minyak meningkatkan perekonomian Indonesia pada level yang lebih tinggi. Jika pada tahun 1972 PDB Indonesia mencapai 274 milyar rupiah, pada tahun 1973 PDB Indonesia meningkat menjadi 2.839 milyar rupiah. Momentum PDB yang tinggi tersebut mampu dipertahankan oleh Pemerintah Orde Baru yang secara politik didukung oleh proses Pemilu tahun 1971 sehingga pertumbuhan Indonesia tetap berada dalam tren yang positif. Sampai dengan tahun 1977 kondisi tersebut masih mampu dijaga keberlanjutannya.

Dalam konteks regional Eks-Surakarta, setelah inisiasi program dan kebijakan Pelita I pada tahun 1969 perekonomian regional hanya merupakan bagian pendukung perekonomian nasional. Proses pelaksanaan kebijakan nasional tersebut berpijak pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Trilogi Pembangunan. Trilogi pembangunan merupakan suatu arahan prioritas pembangunan yang menekankan pada stabilitas nasional (politik, ekonomi, keamanan, hukum, budaya dan pertahanan keamanan); pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan pemerataan pembangunan hasil-hasilnya. Trauma disintegrasi yang tersisa dari Gestapu digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan kebijakannya. Konsep-konsep nasional tersebut mulai mendeligitamasi peran *bottom-up* dalam kegiatan perekonomian melalui pemberlakuan UU No.5/1974.

Terdapat beberapa catatan penting mengenai pemberlakuan UU No.5/1974 ini. UU ini menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi mencakup transfer sejumlah kekuasaan kepada daerah dalam mengambil keputusan di wilayah kerjanya. Cakupan asas dekonsentrasi mencakup pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal kepada pejabat-pejabat di daerah. Asas ketiga dalam UU ini adalah asas tugas pembantuan

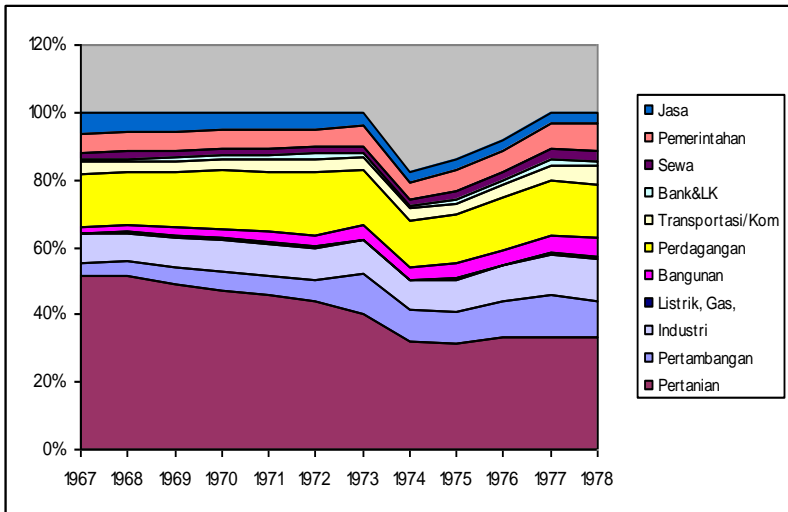
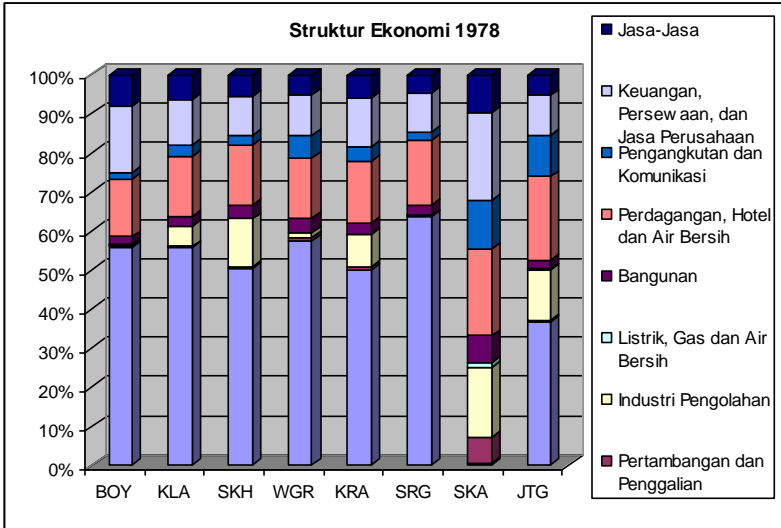
yaitu tugas pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Asas bantuan ini yang selanjutnya lebih kental dibandingkan dua asas di atas melalui kewajiban mempertanggungjawabkan segala program bantuan langsung pada pemerintah pusat.

Selain asas-asas di atas, UU ini tidak mengatur keistimewaan daerah selain melanjutkan UU No.1/1957. Dalam UU ini seluruh wilayah administratif yang dahulu berada dalam Karisedanan Surakarta berposisi sebagai daerah otonom Tingkat II. Jenis daerah otonom tingkat II di Eks-Surakarta adalah Kabupaten dan Kotamadya. Sehingga secara administratif daerah otonom di Eks-Surakarta selanjutnya dikenal dengan Kabupaten Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo. Sementara Surakarta berstatus sebagai Kotamadya.

Selama implementasi UU ini di era orde baru terdapat sruktur yang memberi ruang dalam melakukan koordinasi antar wilayah tingkat II di eks-Surakarta melalui jabatan pembantu gubernur. Koordinasi tersebut dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas sektoral yang melibatkan wilayah eks-Surakarta. Cakupan koordinasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

Meskipun terdapat koordinasi melalui pejabat pembantu gubernur, sejak diberlakukannya UU tersebut peran Surakarta dan/atau Eks-Surakarta pada umumnya adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dimana inisiatif yang diwadahi oleh asas desentralisasi relatif minim. UU ini juga berimplikasi terhadap kondisi perekonomiannya. Setelah masa ini pola perekonomian Surakarta merupakan miniatur dari pola-pola kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Struktur perekonomian Surakarta pada masa ini relatif identik dengan struktur perekonomian pemerintah pusat.

Grafik 3.1. Struktur Ekonomi 1967-1978



Grafik di atas menggambarkan struktur perekonomian yang relatif identik antara Indonesia, Propinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Eks-Surakarta pada awal Orde Baru. Secara umum sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten-kabupaten Eks-Surakarta adalah sektor pertanian. Namun kontribusi sektor pertanian kabupaten-kabupaten di Eks-Surakarta lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut di Propinsi Jawa Tengah dan nasional.

Khusus untuk Kota Surakarta, areal pertanian yang relatif sempit mengakibatkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian relatif kecil dibandingkan kontribusi sektor sekunder dan tersiernya. Berturut-turut sektor sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Surakarta adalah: Sektor Keuangan persewaan dan Jasa Perusahaan (22,33 persen); Perdagangan Hotel dan air bersih (22,28); serta industri pengolahan (17,81 persen).

3.2.2 Dari Bonanza Minyak sampai Resesi

Perkembangan sektor pertanian di Eks-Surakarta dipengaruhi oleh kebijakan rehabilitasi sektor pertanian di tingkat nasional. Sebagai suatu daerah otonom kebijakan ini juga dirasakan manfaatnya di Eks-Surakarta. Implementasi kebijakan tersebut di Eks-Surakarta antara lain berupa rehabilitasi infrastruktur pertanian dan subsidi input pertanian yang mencakup pupuk dan pestisida. Kebijakan ini bermaksud mengembangkan petani Indonesia menjadi petani modern. Perubahan petani tradisional menjadi petani modern dilakukan dengan mengubah pemikiran dari subsistence minded farmer menjadi “developmental minded farmer”. Meskipun demikian pengembangan sektor pertanian pada masa orde baru tetap tidak mengubah tujuan pertanian sebagai salah satu stabilisator negara. Fungsi-fungsi sebagai *welfare state* menyebabkan kurang terdorongnya

liberalisasi sektor pertanian. Fungsi *welfare state* diperjelas dengan pembentukan Bulog sebagai badan penyangga dan monopoli beras.

Dalam kondisi ini harga hasil produksi kembali berusaha ditekan pemerintah untuk menjamin keluasan aksesibilitas masyarakat terhadap beras. Hal yang membedakan dengan Orde Lama adalah dukungan terhadap subsidi input produksi pertanian yang lebih besar. Untuk meningkatkan efisiensi produksi teknologi baru dikenalkan pada petani. Teknologi pertanian baru meningkatkan produktivitas petani yang semula hanya mampu melakukan panen dua kali dalam setahun menjadi 5 kali dalam dua tahun. Pada masa orde baru petani di Eks-Surakarta adalah petani-petani yang menggunakan teknologi pertanian baru ini dalam proses produksinya. Pemerintah memfokuskan penerapan teknologi pertanian ini pada lahan pertanian petani Jawa dan Sunda yang telah memiliki pengalaman bertani yang baik.

Bagian penting dalam sejarah Eks-Surakarta adalah pembangunan beberapa waduk untuk mendukung sektor pertanian. Meskipun demikian pembangunan waduk memiliki implikasi besar terhadap perkembangan perekonomian Eks-Surakarta. Secara umum pembangunan irigasi menjadi kontributor utama eksistensi sektor pertanian dalam perekonomian Surakarta. Di sisi lain, pembangunan waduk khususnya waduk Gajah Mungkur mengenalkan konsep transmigrasi bedol desa dalam pola migrasi penduduk Indonesia.

Pembarlakuan UU No.5/1974 tentang pemerintahan daerah dengan pola dekonsentrasi dan desentralisasi terbatas membentuk suatu sistem pemerintahan daerah dengan wilayah administratif tertentu serta kewenangan yang terbatas. Proses ini merupakan salah satu titik balik utama delegitimasi Surakarta sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan daerah sekitarnya yang berada di bawah kharisma Keraton Kasunanan. Pemberlakuan UU ini juga

menempatkan peran pemerintahan daerah melalui legitimasi peran otoritas administratif masing-masing Kabupaten/Kotamadya di wilayah Eks-Surakarta untuk membangun daerahnya masing-masing. Konsep Surakarta sebagai “*the heart of Java*” semakin lama semakin berkurang. Dalam konsep UU No.5/1974, pemerintahan wilayah administratif kabupaten/kotamadya difokuskan pada terjalannya semangat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sampai ke otoritas administratif terkecil.

Setelah Pelita II peran pemerintahan Eks-Surakarta sebagaimana ditegaskan dalam UU di atas, adalah sebagai administrator pusat. Dalam kondisi ini seluruh program dan arahan pemerintah pusat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah pusat yang bermaksud sebagai antisipatif kondisi malthusian adalah program keluarga berencana. Di wilayah Eks-Surakarta rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 1978-1988 mencapai 1 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kabupaten Sukoharjo. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo mencapai 2 persen per tahun. Kota Surakarta meskipun memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif rendah (1 persen), daerah administratif ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata pada kurun 1978-1988 mencapai 10.953 orang per km².

Kebijakan-kebijakan pro pertumbuhan yang diprogramkan oleh pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian lokal sejak inisiasi undang-undang pemerintah daerah pada tahun 1974. Setelah mengalami bulan madu dengan harga minyak bumi yang tinggi, perekonomian Indonesia dihadapkan kembali pada suatu masalah dasar utama. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah Indonesia masih memerlukan penguatan fundamental perekonomian. Devaluasi yang terjadi berkali-kali pada kurun waktu ini menunjukkan bahwa

daya saing yang dimiliki oleh Indonesia masih sebatas daya saing absolut.

Sejak Pelita II Industri yang pada awalnya diarahkan pada industri substitusi impor didorong menjadi industri ekspor. Pada Pelita II ini, peningkatan devisa diharapkan tidak hanya datang dari ekspor migas namun juga dari ekspor non-migas. Namun, ekspor non-migas sejak tahun 1974 mengalami stagnasi (Hill, 1997). Oleh karena itu, pemerintah bereaksi dengan membantu meningkatkan keunggulan ekspor nonmigas melalui devaluasi mata uang.

Meskipun demikian, devaluasi ini bukan kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1974 untuk menghindari ancaman inflasi yang saat itu telah mencapai 40 persen pemerintah melakukan devaluasi terhadap mata uang. Dengan cara yang sama namun dengan tujuan yang berbeda, pemerintah melakukan devaluasi sampai dengan 50 persen pada akhir tahun 1978.

Harapan tersebut sirna ketika terjadi perang Iran dan Irak pada awal 1980-an. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan tingginya harga input produksi komoditas industri pada saat itu. Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekspor melalui kebijakan devaluasi pada tahun 1983. Neraca perdagangan Indonesia diharapkan membaik pada saat itu. Namun pasca turunnya harga minyak dunia pada tahun 1983 neraca perdagangan Indonesia kembali ke posisi semula. Hal tersebut yang mendorong pemerintah melakukan devaluasi kembali pada tahun 1986. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dua devaluasi terakhir didorong untuk meningkatkan kinerja industri dalam negeri dan neraca perdagangan Indonesia yang cenderung bias impor. Meskipun demikian, kondisi yang serupa terjadi pada tahun-tahun setelah devaluasi.

Situasi tersebut menggambarkan bahwa kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong sektor industri pada saat Pelita III kurang efektif. Usaha untuk meningkatkan daya saing industri seolah jalan di tempat. Dampak dari situasi ini adalah kontribusi sektor industri yang cenderung stagnan selama periode 1978-1988. Stagnasi sektor industri tidak hanya dialami oleh perekonomian Indonesia namun juga dialami oleh perekonomian Propinsi Jawa Tengah dan Eks-Surakarta dalam lingkup regional.

Perkembangan kontribusi sektor industri di Indonesia berjalan seiring dengan kebijakan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika devaluasi dilakukan kontribusi relatif sektor industri pengolahan terhadap PDB/PDRB di Indonesia, Jawa Tengah dan Eks-Surakarta menunjukkan pola yang serupa. Devaluasi yang dilakukan pada tahun 1983 menyebabkan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB dan PDRB meningkat. Kondisi ini juga terjadi setelah devaluasi yang dilakukan pada tahun 1986. Seiring dengan depresiasi rupiah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB dan PDRB juga meningkat. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya saing yang dimiliki oleh industri di Indonesia, Jawa Tengah, dan Surakarta adalah harga. Sebagian besar industri yang berkembang pada masa-masa ini adalah industri dengan nilai tambah yang tinggi.

Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dan PDRB di Indonesia, Jawa Tengah maupun Eks-Surakarta menunjukkan pola-pola yang identik dengan Propinsi Jawa Tengah dan pola perekonomian nasional. Secara umum sejalan dengan fokus dan prioritas Pelita yang diarahkan pada pengembangan sektor modern khususnya industri menyebabkan kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi penurunan tersebut ditunjukkan oleh grafik berikut ini.

Sebagian besar kontribusi sektoral terhadap PDRB di Eks-Surakarta maupun di Propinsi Jawa Tengah berada di sektor pertanian. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terbesar berada di Kabupaten Sragen dan terendah berada di Kota Surakarta. Khusus untuk rerata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Boyolali, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Sukoharjo mencapai mencapai 38 persen. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terbesar berada di Kabupaten Sragen yang mencapai 44 persen. Sementara kontribusi sektor pertanian di Propinsi Jawa Tengah mencapai 27,31 persen. Di lingkup nasional kontribusi sektor pertanian mencapai 26,17 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1988 meskipun sektor industri telah meningkat perannya dalam perekonomian Propinsi Jawa Tengah dan nasional, sektor pertanian di Eks Surakarta masih menjadi basis sektor perekonomian kecuali di Kota Surakarta.

Dalam konteks perekonomian regional di Eks-Surakarta di era liberalisasi ekonomi atau selama kurun waktu 1988-1997 terdapat beberapa fakta penting tentang perekonomian Eks-Surakarta. Fakta penting tersebut adalah terjadinya perubahan struktur perekonomian secara signifikan dalam perekonomian Kabupaten/Kota Eks-Surakarta selama periode liberalisasi. Perubahan struktur perekonomian dari struktur agraris ke struktur perekonomian industri tersebut linear dengan kondisi nasional. Perubahan struktural perekonomian hampir terjadi di seluruh Kabupaten di Eks-Surakarta kecuali Kabupaten Wonogiri. Sampai dengan tahun 1997 kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri dan Sragen yang masih mencapai 50 persen dan 41 persen. Hal tersebut berbeda dengan Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Klaten yang pada tahun 1988 kontribusi sektor pertanian masih mencapai 47,23 persen, namun pada tahun 1997 kontribusi tersebut menurun drastis hingga mencapai 27 persen. Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo bahkan mengalami

penurunan yang sangat signifikan, sehingga kontribusi sektor pertanian sampai dengan akhir tahun 1997 mencapai 25,90 persen di Sukoharjo dan 20,30 persen di Karanganyar.

4 SURAKARTA PADA MASA REFORMASI

Pada bab ini akan dibahas evolusi ekonomi sejak era liberalisasi hingga krisis ekonomi. Pembahasan akan dimulai dari aspek politik nasional dimana terjadi tarik menarik antara pembantu Presiden yakni Teknokrat ke Teknolog, sampai berakhir pada krisis ekonomi. Sementara itu, pembahasan tentang dinamika ekonomi akan dimulai dari era liberalisasi ekonomi yang dimulai sejak keluarnya Paket-paket kebijakan ekonomi antara lain seperti Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun 1983), Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988). Sejak itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam struktur ekonomi yang rapuh, sehingga menyebabkan mudah tertulari adanya krisis kawasan. Pada bab ini akan dibahas dinamika Kota Surakarta secara lebih khusus pada masa reformasi. Pembahasan akan di masalah politik terutama dampak dari keluarnya undang-undang paket otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang relatif besar kepada Pemerintahan Kota/DPRD untuk dapat mengatur secara lebih baik. Selanjutnya juga akan dibahas perkembangan ekonomi Kota Surakarta pada era otonomi daerah ini.

4.1 Dinamika Politik

4.1.1 Dari Teknokrat ke Teknolog

Kemenangan Golkar pada Pemilu 1987 dan terpilihnya kembali Presiden Soeharto pada tahun 1988 menyebabkan iklim politik menjadi lebih terkendali, sehingga para teknokrat pendukung kebijakan liberalisasi lebih mudah bergerak. Pertama mereka tetap menduduki posisi kementerian bidang ekonomi, seperti Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan dipercayakan kepada Radius Prawiro, Menteri Keuangan dijabat oleh JB Sumarlin, Gubernur Bank Indonesia dijabat oleh Adrianus Mooy. Sebelum menjadi Gubernur BI, Adrianus Mooy adalah Wakil Ketua Bappenas di bawah Sumarlin.

Kedua, mereka mengusulkan kepada Presiden untuk menerapkan liberalisasi lebih luas, baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Tampaknya untuk sektor riil, Presiden Soeharto agak berkeberatan, terbukti sejak ini tidak ada deregulasi pada sektor ini yang monumental,¹¹ sedangkan pada sektor keuangan diperkenankan untuk mengadakan liberalisasi lebih lanjut, seperti Paket Oktober 1988 (Pakto 88), dan Paket Desember 1989 (Pakdes 89).

Paket deregulasi perbankan terbesar dikeluarkan pada Oktober 1988 (Pakto 88). Paket ini dikeluarkan 7 bulan setelah Kabinet Pembangunan V dilantik pada Maret 1988. Menurut Sumarlin (1989:2-3), setelah dilantik sebagai menteri keuangan, berusaha untuk meyakinkan kembali Presiden tentang perlunya peningkatan mobilisasi dana untuk pembiayaan pembangunan, kali ini Presiden menyetujuinya. Terdapat tiga alasan mengapa paket

¹¹ Lihat Rizal Mallarangeng (2002:159-193) yang menyimpulkan bahwa setelah empat tahun berjalan sejak tahun 1983, liberalisasi belum menjangkau aspek-aspek penting seperti masih besarnya dominasi perusahaan negara dan semakin maraknya kroniisme.

kebijakan ini harus dikeluarkan. Pertama, semakin berkurangnya penerimaan dari pajak atas minyak dan gas bumi. Hal ini telah terjadi beberapa tahun sebelumnya, dan sudah mulai diganti dari penerimaan pajak non migas. Kedua, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri lebih besar dari pada penerimaan. Ketiga, besarnya pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap anggaran pengeluaran rutin, Kabinet Pembangunan V akan mengupayakan penurunan *debt service ratio* (DSR) dari sekitar 35 menjadi 25 % pada akhir Pelita V.

Menilik isinya, rangkaian kebijakan Pakto 1988, tampaknya juga dimaksudkan untuk menjawab kritik-kritik yang dilontarkan selama ini yakni pertama, meningkatkan pengalangan dana masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu dimudahkan pembukaan kantor bank, baik bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, bank koperasi maupun LKBB. Dalam rangka pengalangan dana masyarakat yang paling penting adalah kemudahan berdirinya bank swasta dengan syarat permodalan yang sangat rendah, yaitu sebesar Rp 10 milyar (Nilai kurs 1 US \$/ Rp 1688,5). Ketentuan ini menghilangkan *barrier to entry* perbankan nasional, termasuk juga kemudahan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di tingkat kecamatan, dengan syarat permodalan hanya sebesar Rp 50 juta. Selain itu, ketentuan lain adalah bank swasta diperbolehkan menerbitkan sertifikat deposito dan mengeluarkan program-program tabungan.

Kedua, meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan. BUMN dan BUMD bukan bank diperbolehkan menempatkan dananya pada semua bank umum dan LKBB. Untuk penempatan di luar bank pemerintah tidak boleh melebihi 50 %, dan untuk bank swasta tidak boleh melebihi 20 % dari jumlah dana yang ditempatkan. Selain itu, juga dikeluarkan aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau legal lending limit,

diantaranya BMPK untuk mengatur satu debitur dan satu debitur grup masing-masing sebesar 20 % dan 40 %.

Ketiga, meningkatkan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter melalui pengaturan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*) dan optimalisasi operasi pasar terbuka. Cadangan wajib minimum ditetapkan sebesar 2 % dari sebelumnya sebesar 15 %. Keempat, Pakto 1988 yang juga bertujuan mengembangkan pasar modal memberi ketentuan pengenaan pajak penghasilan 15 % terhadap bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sementara PPh atas penghasilan yang berasal dari bunga tabungan ditanggihkan. Sebaliknya, pengenaan pajak atas bunga deposito telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, namun karena pemerintah ingin mengerahkan dana masyarakat melalui tabungan, maka pengenaan pajak itu ditanggihkan melalui Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1983. Pengenaan pajak deposito tersebut tidak otomatis meningkatkan kegiatan pasar modal karena deposito merupakan sumber investasi tanpa risiko sedangkan saham yang diperjualbelikan di pasar modal adalah investasi dengan penuh risiko. Ketentuan pengenaan pajak 15% pada perkembangannya tidak menurunkan minat para deposan menyimpan dananya di bank.

Secara umum respons masyarakat terhadap kebijakan Pakto 88 ini sangatlah positif. Tampaknya tidak terdapat satu kelompok masyarakat baik dari kalangan akademisi maupun LSM yang bersifat kritis menolak kebijakan ini. Kelompok kiri yang diasosiasikan dengan penolakan terhadap ide-ide liberalisasi juga tidak bersuara. Salah satu pengamat “kiri”¹² yang terkemuka

¹² Pengertian “kiri” disini adalah kelompok yang menggunakan paradigma New Left atau teori dependensia dalam melihat pembangunan ekonomi. Beberapa

Sritua Arief (1990: 190) justru malah mendukung Pakto 88, terutama berkaitan dengan kemudahan mendirikan bank sebagai sarana perluasan jaringan organisasi keuangan, yang ia anggap sebagai kebijakan yang realistis dan perlu dikembangkan.

Golkar sebagai mesin politik Pemerintah Orde Baru kembali memenangkan Pemilu tahun 1992. Kemenangan ini memuluskan jalan Soeharto menjadi Presiden pada Sidang Umum MPR 1993. Pada masa ini nyaris tidak ada perlawanan dari kelompok manapun terhadap terpilihnya Presiden Soeharto. Bahkan kelompok yang sejak awal Orde Baru dicurigai menjadi kelompok penentang, terutama para intelektual Islam, telah dapat dikendalikan melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh BJ Habibie. Beberapa tokoh vokal yang kerap mengkritik Pemerintah seperti Adi Sasono, Dawam Rahardjo, dan Amien Rais bergabung dalam organisasi itu.

Dalam menyusun Kabinet Pembangunan VI, Presiden Soeharto lebih banyak menempatkan kelompok teknolog, yang menunjukkan besarnya pengaruh dari BJ Habibie dan Ginandjar Kartasasmita.¹³ BJ. Habibie sendiri masih tetap menjadi Menteri Riset dan Teknologi/Ketua BPPT, sedangkan Ginandjar Kartasasmita menjadi Ketua Bappenas. Dengan diangkatnya Ginandjar, Bappenas atau "bentengnya teknokrat" telah dikuasai oleh teknolog. Di luar Bappenas, para teknokrat masih memegang

tokoh yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah Sritua Arief, Adi Sasono, dan Arief Budiman.

¹³ Beberapa teknolog yang berasal dari BPPT adalah Menteri Perhubungan Haryanto Dhanuirta, Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro yang juga menjadi Sekretaris Umum ICMI. Beberapa menteri yang berasal dari Sekretariat Negara adalah Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Sanyoto Sastrowardjo, Menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional Soni Harsono.

kementerian bidang ekonomi seperti Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Shalef Afif, Menteri Keuangan Mar'i Mohammad, dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono. Dengan demikian, berakhirlah peranan Mafia Berkeley atau teknokrat inti dalam pemerintahan, sebaliknya digantikan dengan teknokrat karir. Meskipun demikian Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana tetap berfungsi sebagai penasehat ekonomi Presiden Soeharto, dan selalu berperan, terutama dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga donor.

Kecenderungan Presiden Soeharto untuk lebih memilih para teknolog dibandingkan kepada teknokrat merupakan salah satu puncak dari semakin melemahnya kebijakan liberalisasi. Karena sudah sejak awal kelompok teknolog tidak setuju dengan liberalisasi yang dianggap telah mengurangi gerak mereka. Selain teknolog, terdapat juga kelompok-kelompok pengusaha besar yang kurang begitu senang dengan liberalisasi, karena mereka tetap ingin selalu mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, terutama dalam proyek-proyek besar sebagai contoh, proyek pembangunan pabrik petrokimia terpadu Golden Key ataupun Chandra Asri, Badan Penyangga Perdagangan Cengkeh (BPPC). Hal ini yang dikatakan oleh Mohammad Sadli, sebagai suatu kondisi *good times make bad policies*, atau kondisi ekonomi yang baik menghasilkan kebijakan yang buruk (Mallarangeng, 2002: 217).

Menurut Mallarangeng (2002: 219-228) penjelasan di atas terlalu menyederhanakan masalah. Dia menawarkan penjelasan lain yaitu salah satu penyebab melemahnya liberalisasi pada mula awal 90-an adalah peranan gagasan liberalisasi telah mulai memudar, dan sebaliknya semakin menguatnya kelompok-kelompok anti liberalisasi. Selain terdapatnya kelompok anti liberalisasi baik dari kalangan teknolog dan birokrat-nasionalis, sejak awal 1990-an, komunitas epistemis yang dahulu konsisten

menyuarakan ide-ideal liberalisasi, mulai tidak kompak lagi, seperti munculnya kritik dari Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (1991) terhadap program swastanisasi yang dianggap akan hanya menguntungkan para konglomerat dan merugikan ekonomi rakyat.

Pada tingkat pengambilan keputusan persaingan kepentingan antara teknokrat dan teknolog dalam pemerintah sering muncul dan tidak jarang mengemuka di media massa. Salah satu kasus terbesar dalam benturan kepentingan itu adalah masalah pembelian kapal perang bekas Jerman Timur (1994) Kasus ini bermula dari perjanjian BJ Habibie dengan pemerintah Jerman untuk membeli belasan kapal perang bekas yang ternyata setelah dihitung dengan ditambah biaya perbaikan oleh Departemen Keuangan jatuhnya lebih mahal dari pada membeli kapal perang baru. Menteri Keuangan Mar'i Mohammad menolak tagihan itu, meskipun pada akhirnya menyetujuinya. Konflik itu sempat menyeruak ke permukaan, dan tiga media massa yaitu Tempo, Editor, dan Detik meliputnya secara besar-besaran. Opini yang tercipta di masyarakat dari peristiwa itu adalah telah terjadi konflik yang tajam antara BJ Habibie dan Mar'i Mohammad, oleh karena itu Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembreidelan terhadap tiga media massa tersebut (Robison, 1995: 69-71).

Perseteruan terbuka yang lain terjadi pada November 1996, ketika BJ Habibie melakukan kritik kepada kebijakan tingkat suku bunga tinggi. Dalam sebuah seminar pada November 1996, Habibie mengkritik penerapan suku bunga yang tinggi yang menyebabkan sektor riil kesulitan permodalan. Dia mencontohkan Jepang yang menerapkan suku bunga rendah dan ternyata berhasil mengendalikan inflasi. Reaksi keras diperlihatkan oleh pendapat kubu teknokrat, diantaranya yang diwakili oleh Sumitro Djojohadikusumo, yang mengatakan jika usulan Habibie diikuti maka negara akan bangkrut (McLeod, 1997: 8-9). Oleh

pendukungnya, kritikan Habibie terhadap kebijakan suku bunga tinggi ini dianggap sebagai aliran tersendiri yang populer dengan Habibienomics (Dawam Rahardjo, 1997).

Namun perdebatan antara elit negara itu, tidak mampu menyelamatkan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi 1997 dimana terjadi kemerosotan kapasitas pemerintah. Kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan telah merosot tajam, sehingga sumber-sumber ekonomi bangsa ini tidak dapat dikelola secara efektif. Penyebabnya, jika dilihat secara kasat mata, kemerosotan ini bermula dari keadaan yang tak terkait dengan persoalan domestik, tetapi disebabkan kebijakan moneter Thailand, yang pada tanggal 2 Juli 1997, mengambang nilai mata uangnya. Tindakan ini menimbulkan depresiasi luar biasa dan mengguncang sendi-sendi moneter 'negara gajah putih' itu.

Karena sebagian besar negara-negara Asia Timur, terutama di kawasan ASEAN, mempunyai struktur permasalahan ekonomi dan penerapan kebijakan yang serupa, maka akibat buruk depresiasi tersebut menular ke beberapa negara. Indonesia, yang sebelumnya telah dikategorikan sebagai salah satu *high-performing economies*, justru menderita pukulan paling berat dari efek penularan itu, dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pukulan berat inilah yang menimbulkan krisis ekonomi yang membahayakan pembangunan nasional. Padahal sesungguhnya keberhasilan pembangunan ekonomi masa Orde Baru adalah simbol yang membedakannya dengan Orde Lama, suatu landasan legitimasi yang lebih bersifat *material* daripada *immaterial*. Dalam arti bahwa kohesivitas bangunan kekuasaan pemerintah Orde Baru bukanlah di topan oleh penyatuan ideologi antara elite negara dan masyarakat, melainkan karena kemampuan menawarkan kemakmuran ekonomi. Karena itu, krisis ekonomi yang membahayakan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah krisis politik bagi Orde Baru, di mana legitimasinya sangat tergantung

pada keberhasilan pembangunan ekonomi. Kehancuran ekonomi, dengan demikian, telah merapuhkan bangunan politik. Kenyataan inilah yang menyebabkan Pemerintah Indonesia mengalami kemerosotan kapasitas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu.

Akan tetapi, sebelum memasuki pembicaraan tentang Indonesia kita perlu menengok beberapa pendapat spekulatif tentang faktor-faktor dasar yang menimbulkan tragedi ekonomi tingkat Asia Timur yang tak berpreseden ini. Secara umum, terdapat empat kelompok pendapat yang berusaha menjawab masalah tersebut. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa krisis itu adalah akibat logis dari perkembangan pasar finansial global yang tak terkendali. Kelemahan pokok jenis pasar finansial yang mengglobal ini mengandung penyakit *inherent volatility*, *self-fulfilling speculative attack* dan sebagai akibatnya, berpotensi untuk menular (*contagious effect*). Penganut pandangan ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya, sampai pertengahan 1990-an itu, fundamental ekonomi negara-negara tersebut sebelum krisis cukup sehat. Hanya saja, negara-negara yang terlanda krisis tersebut tidak siap mengontrol dampak globalisasi pasar finansial yang liberal. Menurut Takatoshi Ito (1999:111) meskipun terdapat beberapa faktor kelemahan fundamental yang menyebabkan krisis Asia, namun sebagai pemicunya (*trigger*) dari krisis itu adalah gerakan modal dan serangan para spekulan.

Kedua, adalah mereka yang berpendapat bahwa penyebab krisis itu justru berada dalam arena kebijakan domestik negara-negara bersangkutan. Dasar krisis tersebut, dalam argumentasi mereka, berpangkal pada *mismanagement* ekonomi makro, terutama kebijakan penetapan nilai tukar. Menurut Radelet dan Sachs (1997:46-47) negara-negara Asia yang terkena krisis melakukan pematokan nilai tukar (*pegged exchange rate*), yang mendorong sektor finansial melakukan kegiatan berisiko tinggi.

Ketiga, adalah mereka yang berpendapat hampir sama dengan golongan kedua, namun lebih menekankan pada kelemahan struktural dan regulasi pada tingkat domestik, terutama di sektor finansial. Deregulasi perbankan yang mengakibatkan instabilitas sektor finansial misalnya terjadi di Australia pada akhir 1980-an, Swedia pada 1990, Norwegia pada 1990-1991 dan Amerika Serikat pada 1990-an Davis (1995:261). Menurut Hal Hill (1999:113-114) Krisis ekonomi Indonesia disebabkan oleh liberalisasi perbankan 1988, yang sangat berani dan menyebabkan kerapuhan sektor perbankan.

Keempat, adalah kelompok yang melihat kebijakan-kebijakan ekonomi yang disarankan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Sifat dogmatik dan kurang-pengertian kedua lembaga keuangan dunia tersebut terhadap kompleksitas hubungan ekonomi, politik dan sosial-budaya pada masing-masing negara tersebut justru berperan penting dalam memperburuk krisis ekonomi di Asia Timur. Desakan kedua lembaga internasional ini kepada beberapa negara Asia Timur untuk menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, dan strategi penyesuaian struktural yang terlalu ambisius dianggap sesuatu yang fatal bagi kemunculan krisis (Haggard, 2000:4). Sachs dan Woo (2000:1-8), berpendapat bahwa IMF dan sistem moneter internasional perlu direformasi.

Walaupun masing-masing argumen ini cukup meyakinkan, akan tetapi semua itu mengidap kelemahan yang sama, yaitu lebih menekankan aspek ekonomi dan mengabaikan variabel politik yang menyebabkan terjadinya krisis itu. Keempat pendapat di atas lebih memandang persoalan-persoalan teknis dan pengelolaan kebijakan ekonomi makro sebagai sesuatu yang *given*, dan karena itu kekeliruan-kekeliruan yang mendorong terjadinya krisis finansial dan ekonomi tidaklah berkaitan dengan faktor-faktor “nonekonomi”. Kontroversi pendapat tentang kebijakan liberalisasi ekonomi pada tingkat domestik masing-masing negara sebelum

krisis, membuktikan bahwa arah kebijakan yang diambil lebih mewakili visi dan kepentingan golongan tertentu, yang belum tentu menjadi visi, kepentingan dan keuntungan golongan-golongan lainnya. Dalam arti kata lain, selalu ada *conflicting interests* dalam setiap keputusan publik, apa lagi keputusan kebijakan ekonomi nasional yang dinilai strategis oleh semua pihak. Karena absennya pertimbangan politik sebagai salah satu faktor terjadinya krisis tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian aspek politik mengenai salah satu dimensi dari persoalan besar itu, yaitu kebijakan liberalisasi perbankan. Kebijakan ini penting karena merupakan wujud evolusi responsif kebijakan ekonomi moneter pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang berkembang pada tingkat domestik maupun global, untuk tujuan politis mempertahankan kelangsungan pembangunan sebagai legitimasi pemerintah Orde Baru.

4.1.2 Pembangunan Daerah

Sejak awal Orde Baru hingga saat ini sudah terdapat tiga (3) produk undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yakni UU No 5/1974, UU No 22/1999 dan UU No 32/2004. Pada mulanya masyarakat berharap dengan keluarnya UU No 5/1974 akan lebih memberikan penguatan legislatif. Namun pada kenyataannya justru undang-undang ini lebih mendorong semangat sentralisasi yang pro eksekutif dari pada legislatif. Menurut undang-undang ini DPRD adalah bagian dari Pemerintahan Daerah yang sejajar dengan Kepala Daerah. Ini menunjukkan bahwa DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Jadi posisi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi kabur, karena masuk sebagai unsur Pemerintahan Daerah. Dalam posisi bagian Pemerintahan Daerah, DPRD tidak lain hanya sebagai “juru stempel” kebijakan Kepala Daerah (Marbun, 2005:401). Dengan peranan DPRD seperti ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Baru lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi daripada pembangunan politik. Pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas politik dari pusat sampai daerah, dengan jalan memandulkan partai politik dan parlemen.

Sementara itu, seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, keinginan untuk memperkuat peranan pemerintah baik melalui partai politik maupun parlemen menguat dari tingkat pusat sampai daerah. Tuntutan untuk memberdayakan DPRD terjawab oleh keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini posisi DPRD sangat tegas yakni sebagai “Badan Legislatif Daerah”, sementara Pemerintah Daerah menjadi “Badan Eksekutif Daerah”. Berdasarkan undang-undang ini kewenangan DPRD sangat luas antara lain adalah memilih, dan memberhentikan Kepala Daerah; menetapkan anggaran sendiri. Menurut beberapa pengamat dalam prakteknya kewenangan itu dianggap kabablasan, terutama dalam bidang penganggaran. Untuk mengurangi kemungkinan lebih buruk pemerintah mengeluarkan PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Dengan keluarnya PP itu, banyak pimpinan dan anggota DPRD diajukan ke meja hijau dengan tuduhan korupsi. Bahkan sampai dengan tahun 2006, ini sudah sebanyak 1.062 anggota DPRD dan 67 Kepala Daerah diperiksa dengan tuduhan korupsi. Kendatipun, PP 110/2000 ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 27 Desember 2002, namun tetap banyak digunakan oleh pengadilan memvonis anggota DPRD yang dianggap korupsi. Sebagai pengganti PP 110/2000, telah dikeluarkan PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR, yang kemudian disempurnakan dengan PP 37 Tahun 2005.

Sejak awal penerapan UU No 22/1999, sudah banyak nada pesimis dari berbagai kalangan terhadap penerapan undang-undang

itu. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak ikhlas untuk menyerahkan sebagian “kewenangannya” kepada Daerah. Berikut ini beberapa preseden dan fenomena yang mengarah kepada upaya untuk mengeliminasi undang-undang itu (Isra, 2003):

- ◁ Amandemen pasal 18 UUD 1945, pada tahun 2000, yang pada intinya adalah mensinkronkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
- ◁ Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi yang mendasar terhadap UU No 22/1999.
- ◁ Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) membubarkan Menteri Negara Otonomi Daerah, yang telah didirikan sejak era Presiden BJ Habibie. Selain itu, Presiden Abdurrahman Wahid melalui Kepres 10/2001 telah menarik kewenangan daerah dalam bidang pertanahan yang menurut UU No 22/1999 pasal 11 ayat (2) merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kab/Kota.
- ◁ Pemerintah pusat mengalami keraguan untuk menerbitkan semua peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh UU No 22/1999. Selain itu, pemerintah juga ragu-ragu mengoptimalkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang justru terjadi adalah fenomena Bupati/Walikota di beberapa daerah yang tidak mau dikoordinir oleh Gubernur, bahkan sebagian mereka enggan menghadiri rapat di Propinsi.
- ◁ Rencana pemilihan Kepala Daerah secara langsung mendorong untuk melakukan revisi terhadap UU 22/1999. Usulan ini salah satunya disebabkan disinyalir dengan model pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung melestarikan “politik uang”, maka diusulkan untuk melakukan pemilihan langsung.

Perubahan model pemilihan kepala daerah dari secara tidak langsung menjadi langsung dimulai dengan disepakatinya Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa pemilihan kepala daerah menggunakan pendekatan langsung atau pemilihan oleh rakyat. Model ini otomatis sudah memangkas tugas dan kewenangan DPRD. Maka, ide model pilihan langsung ini juga menjadi inti dari peranan DPRD dalam UU No 32/ 2004 yang menggantikan UU No 22/1999. Dengan UU No 32/2004 itu, posisi DPRD hanya sebagai “mitra” eksekutif. Seperti terlihat dalam rumusan pasal 3 ayat (1) UU No 32/2004 disebutkan “Pemerintahan Daerah adalah a) Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; b) Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dari DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pasal itu, jelas bahwa UU No 32/2004 ini tidak berbeda dengan UU No 5/1974 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)” (lihat tabel 4.1).

Tabel 4.1. Perbandingan UU No5/1974, UU No22/1999, UU No32/2004

No	Dimensi Perbandingan	UU No 5/1974	UU No 22/1999	UU No 32/2004
1.	Dasar Filosofi	Keseragaman	Keanekaragaman dalam Kesatuan	Keanekaragaman dalam Kesatuan
2.	Pembagian Satuan Pemerintahan	Pendekatan tingkatan seperti Dati I, Dati II (level approach)	Pendekatan besaran dan isi otonomi. Ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri. Ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada yang luas (size and content approach)	Pendekatan besaran dan isi otonomi. Dengan menekankan pada pembagian urusan yang berkesimbangan asas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi (size and content approach)
3.	Fungsi Utama Pemerintah Daerah	Promotor Pembangunan	Pemberi Pelayanan Masyarakat	Pemberi Pelayanan Masyarakat
4.	Penggunaan Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Seimbang Antara Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan pada Semua Tingkatan	<ul style="list-style-type: none"> ◁ Desentralisasi Terbatas pada Daerah Propinsi, Luas pada Daerah Kab/Kota ◁ Dekonsentrasi Terbatas kepada Daerah Kab/Kota, Luas pada Daerah Propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ◁ Desentralisasi seimbang antar Daerah Propinsi, dan Kab/Kota ◁ Dekonsentrasi Terbatas kepada Daerah Kab/Kota, Luas pada Daerah Propinsi ◁ Tugas pembantuan berimbang

No	Dimensi Perbandingan	UU No 5/1974	UU No 22/1999	UU No 32/2004
			< Tugas pembantuan berimbang pada semua tingkatan	pada semua tingkatan
5.	Pola Otonomi	Simetris	Asimetris	Asimetris
6.	Model Organisasi Pemerintah Daerah	Structural Efficiency Model (SEM)	Local Democratic Model (LDM)	Perpaduan antara SEM dan LDM
7.	Unsur Pemerintah Daerah	Kepala Daerah dan DPRD	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
8.	Mekanisme Transfer Kewenangan	Ada kewenangan utama yang diserahkan melalui UU, kewenangan tambahan yang diserahkan melalui PP (Ultravires Principle)	Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom terbatas dan luas untuk daerah Kab/Kota (General Competence Principle)	Tidak menggunakan pendekatan kewenangan melainkan pendekatan urusan, yang didalamnya mengandung aktivitas, hak, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab (General Competence Principle)
9.	Unsur Pemerintah Daerah Yang Memegang Peranan Dominan	Badan Eksekutif Daerah (Executive Heavy)	Badan Legislatif Daerah (Legislative Heavy)	Check and Balanced antara Pemda dan DPRD

No	Dimensi Perbandingan	UU No 5/1974	UU No 22/1999	UU No 32/2004
10.	Pola Pemberian Dana/Anggaran	Fungsi mengikuti uang (Function follow money)	Uang mengikuti fungsi (Money follow function)	Uang mengikuti fungsi (Money follow function)
11.	Sistem Kepegawaian	Sistem Terintegrasi (Integrated System/IS)	Sistem Terpisah (Separated System/SS)	Mixed System antara IS dan SS
12.	Sistem Pertanggung jawaban Pemerintahan	Ke Atas	Ke Samping DPRD	Ke Konstituen Pusat: laporan DPRD: keterangan
13.	Sistem Pengelolaan Keuangan Antar-Asas Pemerintahan	Dijadikan satu dalam APBD	Dikelola secara terpisah untuk masing-masing azas	Dikelola secara terpisah untuk masing-masing azas
14.	Kedudukan Kecamatan	Sebagai Administrasi Pemerintahan (menjalankan asas Desentralisasi)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
15.	Kedudukan Desa	Wilayah	Daerah	Relatif Mandiri
16.	Pertanggung jawaban Kepala Desa	Kepada Camat	Kepada Rakyat Melalui BPD	Tidak diatur secara khusus dalam UU.

Sumber: Wasistiono, 2005.

Lebih-lebih setelah paket undang-undang otonomi daerah itu diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) semakin lebih

memperkuat posisi eksekutif. Undang-undang SPPN ini merupakan tonggak bersejarah bagi perencanaan pembangunan di Indonesia. Jika pada sistem perencanaan sebelumnya hanya berdasarkan atas Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, maka dengan UU SPPN ini, sistem perencanaan pembangunan dipayungi oleh undang-undang. Ini menyebabkan posisi perencanaan pembangunan serta lembaga pelaksanaan menjadi semakin kuat. Apabila pada masa reformasi yang lalu, posisi lembaga perencanaan pembangunan Bappenas dan Bappeda sempat terabaikan, dengan UU SPPN menjadi semakin kokoh seperti halnya pada masa Orde Baru. Di sinilah peranan DPRD dalam perencanaan pembangunan menjadi terabaikan, sebaliknya pada era ini Pemerintah Kab/Kota menjadi sangat kuat dalam menjalankan program kerjanya.

Dalam konteks regulasi yang tengah berubah ini, kita dapat menganalisis pemerintahan di Kota Surakarta. Pada aras nasional kemenangan Poros Tengah yang mengusung KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden pada tahun 1999 berdampak buruk di Kota Surakarta. Simpatisan PDI-P bersama dengan masyarakat melakukan demonstrasi dan berujung pembakaran atas Balai Kota yang merupakan Gedung Pemerintah Kota Surakarta. Kekecewaan ini disebabkan para simpatisan PDIP berharap besar bahwa yang menjadi Presiden adalah Megawati Soekarnoputri, yang berbeda dengan realitas politik di Senayan, yang ternyata dimenangkan oleh kubu Poros Tengah yang mengusung KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.

Kendati pun demikian, di tingkat Kota Surakarta kemenangan PDIP di DPRD telah mengantarkan Slamet Suryanto menjadi Wali Kota untuk periode 1999-2004. Berdasarkan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah posisi DPRD menjadi sangat menentukan dalam menetapkan kepala daerah. Dominasi partai tertentu akan melapangkan jalan bagi calon dari partai

tersebut untuk memenangkan Pemilu. Sementara pada pemilihan Walikota pada periode 2005-2009 dengan mengaju UU No 32/2004 dengan menggunakan model pemilihan langsung. Pada pemilihan ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan FX Rudyatmo yang didukung oleh PDIP.

4.1.3 Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta

Krisis ekonomi 1997 telah menyebabkan adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dampak dari depresiasi rupiah yang tinggi telah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat semakin tinggi dan ada kekhawatiran terjadinya kelangkaan. Situasi ini mengundang aksi mahasiswa Surakarta dari organisasi intra dan ekstra kampus untuk melakukan demonstrasi. Momentum yang paling pas adalah menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR Maret 1998, di mana mahasiswa menolak Soeharto menjadi Presiden kembali. Mahasiswa semakin kecewa, manakala ternyata MPR tidak memperhatikan sebagian besar suara rakyat dan memilih untuk mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden pada 11 Maret 1998. Demonstrasi mahasiswa semakin menguat dengan tujuan satu supaya MPR menurunkan kembali Presiden Soeharto.

Di Surakarta pada 17 Maret 1998 terjadi insiden para demonstran mahasiswa dengan aparat yang menyebabkan 3 mahasiswa luka berat dan 30 lainnya luka ringan. Pada 25 Maret 1998, unjuk rasa mahasiswa di UNS mengakibatkan 35 mahasiswa luka-luka. Insiden serupa terjadi pada demonstrasi 15 April 1998 di UNS, 17 April 1998 di UNS, 7 Mei 1998 di UMS, dan 8 Mei 1998 di UNS. Aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa di Trisakti yang menelan 4 korban jiwa pada 12 Mei 1998. Oleh sebab itu, dilakukan demonstrasi mahasiswa besar-besaran dari kampus UMS di Pabelan. Pada mulanya demonstrasi hanya di depan kampus UMS, namun rupanya-rupanya banyak

masyarakat yang akan bergabung dihalang-halangi oleh aparat. Massa yang diblokir itu, berbalik memasuki Kota Surakarta melalui Jl Slamet Riyadi melakukan tindakan kerusuhan seperti melempar-lempar sampai membakar gedung dan pertokoan yang kebetulan sebagian besar dimiliki oleh pengusaha Tionghoa. Kerusuhan terjadi selama tiga hari berturut-turut mulai 14 Mei sampai 16 Mei menyebar ke seluruh wilayah Surakarta dan sekitarnya. Obyek-obyek yang dijarah dan dibakar meliputi gedung, bioskop, pusat perbelanjaan, toko strategis di perempatan jalan, bahkan rumah Ketua MPR Harmoko di kompleks perumahan mewah Solo Baru juga menjadi sasaran massa (Mulyadi, et. al, 1999:317-318).

4.2 Dinamika Ekonomi

4.2.1 Penduduk di Kota Surakarta

Keadaan penduduk di Kota Surakarta berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2004 tercatat sebesar 510.711 jiwa yang terdiri dari 249.278 penduduk laki-laki dan sebanyak 261.433 penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang besarnya 4.403 km², kepadatan penduduknya adalah sebesar 11.599 jiwa/km². Penduduk Kota Surakarta tersebar di 5 (lima) Kecamatan dan 51 Kelurahan. Sebagian besar penduduk bekerja di Sektor Perdagangan. Di samping itu, juga bekerja di Sektor Industri dan Sektor jasa.

*)

Tabel 4.2. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2004

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Serengan	3,19	48.112	7	15.082
2.	Laweyan	8,63	91.131	11	10.566
3.	Jebres	12,58	134.716	11	10.709
4.	Pasar	4,82	78.120	9	16.207
5.	Kliwon	14,81	158.632	13	10.711
	Banjarsari				
	Jumlah	44,04	510.711	51	11.599

Sumber: Bappeda-BPS Kota Surakarta. (2005). Surakarta Dalam Angka 2004.

Dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Kota Surakarta menempati urutan ketiga dalam hal luas wilayah dari yang terkecil, setelah Kota Magelang (12,12 km²), Kota Tegal (34,49 km²), dan baru Kota Surakarta (44,04 km²). Dengan jumlah penduduk di tahun 2003 sekitar 497.234 jiwa, maka tingkat kepadatannya sekitar 11.291 orang/km². Suatu angka yang melebihi ambang batas tingkat kepadatan menurut ukuran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang mematok tingkat kepadatan penduduk maksimal sebesar 10.000 orang/km². Di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 32.544,12 km dan jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 31.710.498 orang, mempunyai kepadatan penduduk sebesar 975 orang/km². Gambaran selengkapnya pada Tabel 7.2.

Tabel 4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2003

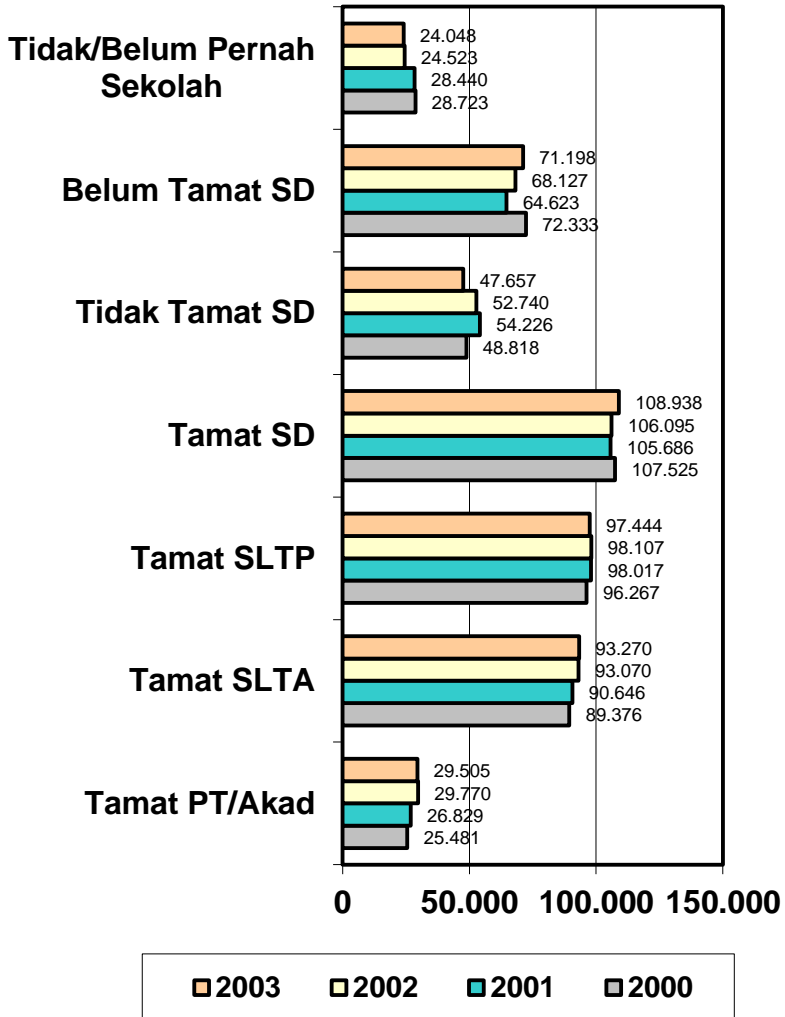
Wilayah	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Surakarta	12.408	12.570	11.087	11.291
Provinsi Jawa Tengah	946	955	973	975

Sumber: Diolah dari data Jawa Tengah Dalam Angka

Dari luas lahan sekitar 44,04 km² (4.404,06 ha); sekitar 61%-nya (sekitar 2.672,21 ha) digunakan untuk kepentingan Perumahan/ Pemukiman; sementara 18%-nya (sekitar 811,57 ha) digunakan untuk kepentingan sektor jasa, perusahaan dan industri. Artinya pengembangan Kota Solo ke depan yang terkait dengan masalah tempat/lahan sudah sangat terbatas; sehingga perlu terobosan baru agar tidak terjadi penggeseran dan penggusuran yang dapat menimbulkan konflik sosial yang hebat.

4.2.2 Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2003 di Kota Surakarta, sebanyak 227.212 orang. Dari jumlah ini yang bekerja sebanyak 208.894 orang (atau sebesar 91,94% dari Angkatan Kerja), sedang sisanya sekitar 18.318 orang (atau sebesar 8,06% dari Angkatan Kerja) yaitu Sedang Mencari Pekerjaan atau dalam istilah ekonomi dikatakan sebagai Pengangguran Terbuka, dengan rincian sebanyak 9.772 laki-laki dan sebanyak 8.546 wanita. Dari sisi tingkat pendidikannya yang ditamatkan, sebanyak 8.143 orang lulusan SMU/SLTA; sebanyak 3.662 orang lulusan SLTP; sebanyak 2.238 orang lulusan SMK; dan sebanyak 1.219 orang lulusan DIV/S1.

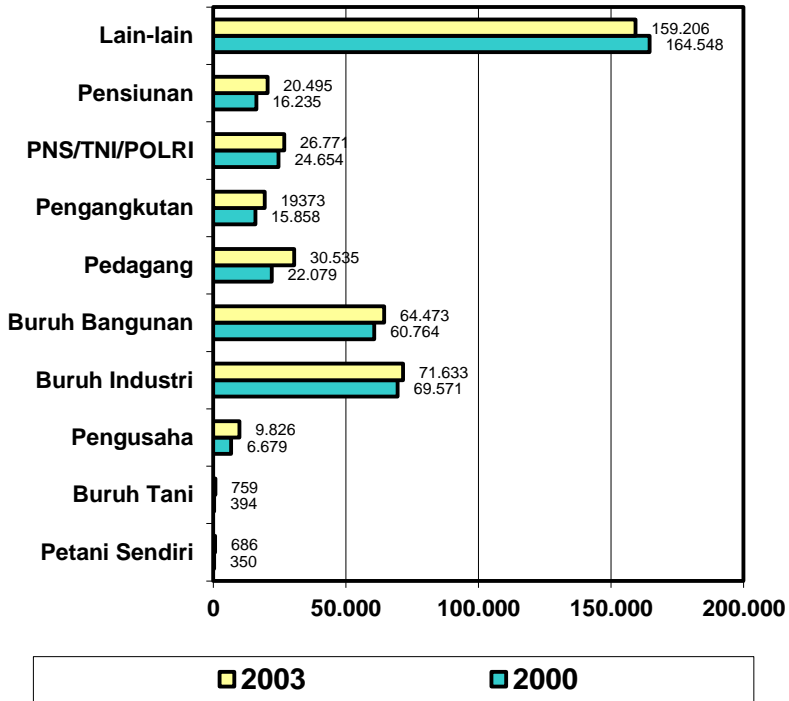


Gambar 4.1 Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Surakarta, Tahun 2000-2003

Catatan:

1. Tahun 2000, penduduk usia 5 tahun ke atas berjumlah 468.523 jiwa.
2. Tahun 2001, penduduk usia 5 tahun ke atas berjumlah 471.456 jiwa.
3. Tahun 2002, penduduk usia 5 tahun ke atas berjumlah 472.700 jiwa.
4. Tahun 2003, penduduk usia 5 tahun ke atas berjumlah 472.060 jiwa.

Sumber: BAPEDA dan BPS Kota Surakarta. (2004). Kota Surakarta Dalam Angka 2003, data diolah.



Gambar 4.2 Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta, Tahun 2000 dan 2003

Catatan:

1. Tahun 2000, penduduk usia 10 tahun ke atas berjumlah 381.132 jiwa.
2. Tahun 2003, penduduk usia 10 tahun ke atas berjumlah 403.757 jiwa.
3. Tahun 2004, penduduk pertengahan tahun di Kota Sola 505.153 jiwa.

Sumber: BAPEDA dan BPS Kota Surakarta. (2005). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Tahun 2004, data diolah.

Sektor Perdagangan menyerap TK sebanyak 82.771 orang; Sektor Jasa menyerap TK sekitar 52.080 orang; Sektor Industri menyerap TK sekitar 45.776 orang; serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menyerap TK sekitar 13.627 orang; Dari sisi penduduk usia 10 tahun ke atas, yang pada tahun 2003 berjumlah sekitar 403.757 orang; sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai berikut:

- Buruh Industri sebanyak 71.633 orang (sekitar 17,74%)
- Buruh Bangunan sebanyak 64.473 orang (sekitar 15,97%)
- Pedagang sebanyak 30.535 orang (sekitar 7,56%)
- PNS/TNI/POLRI sebanyak 26.771 orang (sekitar 6,63%)
- Pengangkutan sebanyak 19.371 orang (sekitar 4,80%)

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang menggambarkan keseluruhan aktivitas masyarakat, pada tahun 2003 berada pada posisi Rp 4,18 triliun (Rp 4.177.490,75 juta) atas dasar harga berlaku, dan sebesar Rp 1,52 triliun (Rp 1.518.008,05 juta) atas dasar harga konstan 1993. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Surakarta pada tahun 2000 telah mengalami pertumbuhan sebesar 16,5%. Tahun 2001 sampai 2004 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 12%

pada tahun 2001, menjadi sebesar 11,49% pada tahun 2002 dan meningkat lagi pada tahun 2004 menjadi sebesar 13,86%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 1993, perekonomian Kota Surakarta mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 1999, PDRB Kota Surakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu sebesar 1,14%. Tahun 2000 mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi sebesar 4,15%. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan lagi tetapi pertumbuhannya menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai sebesar 3,92%. Kota Surakarta, pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12%; dan meningkat menjadi sebesar 5,41% pada tahun 2005. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 1993 Kota Surakarta Tahun 1999-2005 (Dalam Jutaan Rupiah dan Persen)

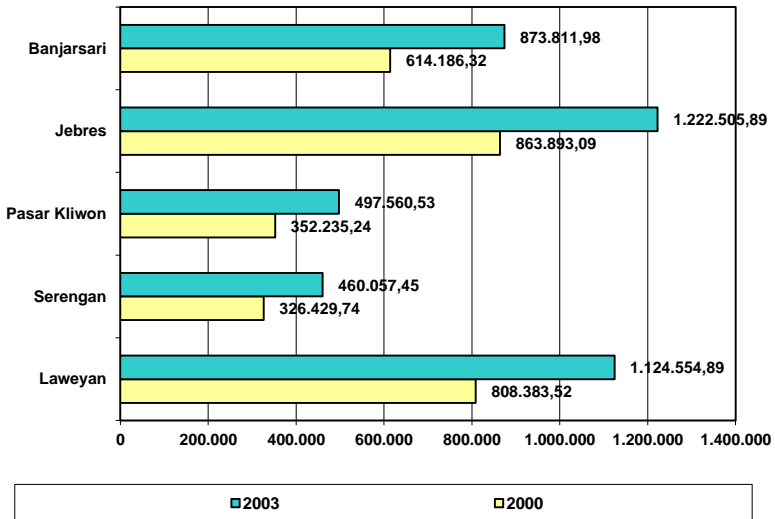
Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan 1993 dan 2000	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999	2.545.175,03	12,07	1.250.807,41	1,14
2000	2.965.128,91	16,50	1.302.715,92	4,15
2001	3.321.685,50	12,00	1.353.882,64	3,92
2002	3.703.510,33	11,49	1.423.201,43	5,12
2003	4.177.490,76	12,46	1.518.008,05	6,46
2004			1.584.328,42	4,37
	4.741.410,59	13,80		
2005			1.669.972,41	
	5.398.546,00	13,86		5,41

Sumber: - Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2005). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 1999-2004.

- Kantor Bank Indonesia SOLO (2006). PDRB Kabupaten / Kota di Wilayah Surakarta, khususnya untuk Tahun 2005 (Gabungan Semester 1, dan 2).

Dilihat dari sebaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harga berlaku pada tahun 2000 dan 2003, pada 5 (lima) kecamatan di Kota Surakarta, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Jebres mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta, baik pada tahun 2000 maupun pada tahun 2003. Gambaran selengkapnya dapat dilihat Gambar berikut.

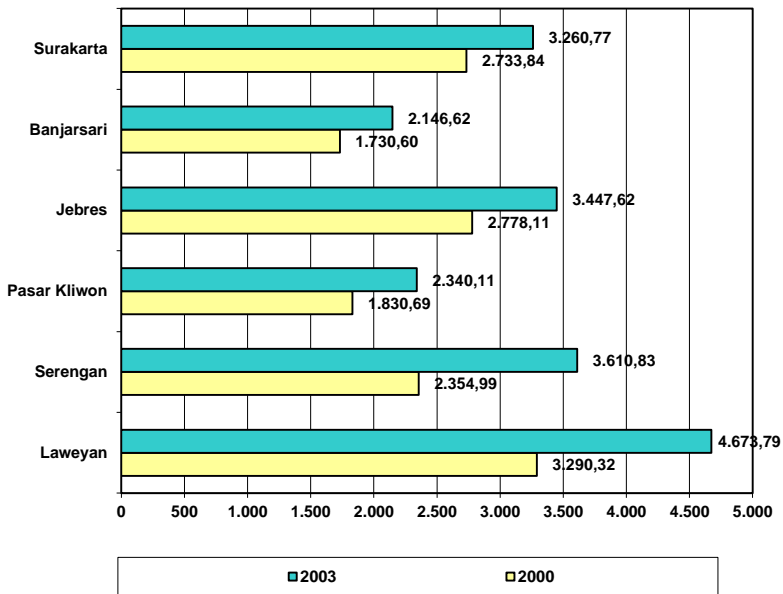
*)



Gambar 4.3 Sebaran PDRB Harga Berlaku Menurut Kecamatan di Kota Surakarta, Tahun 2000 dan 2003 (dalam juta rupiah)

Sumber: BAPEDA dan BPS Kota Surakarta. (2005). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Tahun 2004, data diolah.

PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 1993 sebagai salah satu indikator kemakmuran di Kota Surakarta yang berpenduduk sebanyak 555.395 jiwa pada tahun 2003 mencapai sebesar Rp 3.104.514,10; yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.903.775,98. Pertumbuhan PDRB Perkapita pada tahun 2003 adalah sebesar 6,9%. PDRB Perkapita Kota Surakarta pada tahun 2004 (atas dasar harga konstan tahun 2000) adalah sebesar Rp 7.263.885,30. Sementara itu, PDRB Perkapita Kota Surakarta pada tahun 2004 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 9.416.076,95.

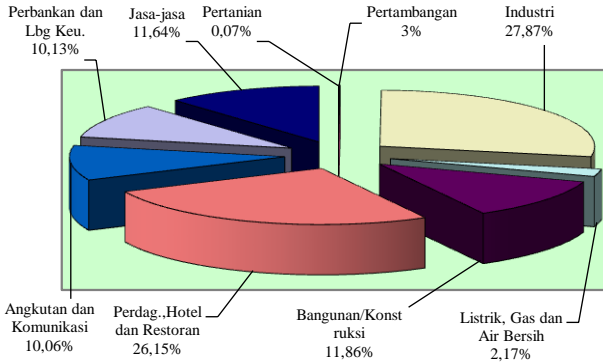


Gambar 4.4 PDRB Per-kapita Harga Konstan 1993 di Kota Surakarta, Tahun 2000 dan 2003 (dalam ribuan rupiah)

Sumber: BAPEDA dan BPS Kota Surakarta. (2005). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Tahun 2004, data diolah.

Pada tahun 2003, dari 9 (sembilan) sector pembentuk PDRB, Sektor Industri menyumbang sekitar 29,14% (Rp 1,22 triliun) dengan komponen terbesarnya dari kategori Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, sementara Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran atau Rumah Makan menyumbang sekitar 23,07% (Rp 0,96 triliun), dengan komponen penyumbang utamanya dari Perdagangan. Sedangkan Sumbangan dari sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB di Kota Surakarta atas dasar Harga Konstan 2000, yang tergolong dominan berturut-turut adalah: (i) Sektor Industri Pengolahan, menyumbang sebesar 27,87%; (ii) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, menyumbang sebesar 26,15; (iii) Sektor Kontruksi, menyumbang sebesar 11,86%; dan (iv) Sektor Jasa-jasa, menyumbang sebesar 11,64%. Gambaran selengkapnya adalah sebagai berikut.

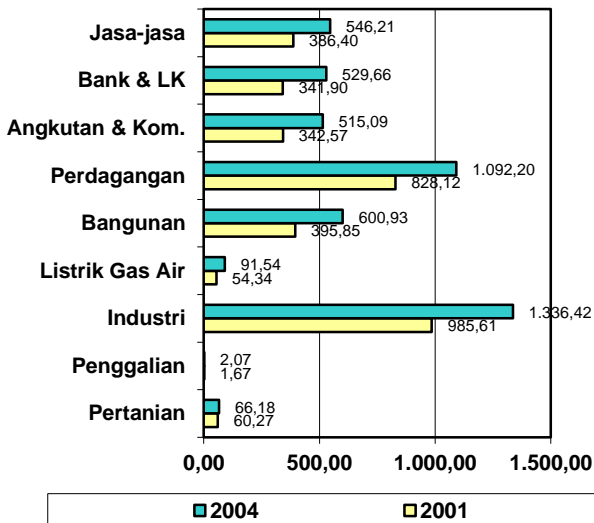
*)



Gambar 4.5 Distribusi PDRB Harga Konstan 2000 di Kota Surakarta, Semester-1 Tahun 2006 (dalam persen)

Sumber: Kantor Bank Indonesia SOLO (2006).

*)



Gambar 4.6 Kontribusi Sektor-sektor Pembentuk PDRB Harga Berlaku di Kota Surakarta, Tahun 2001 dan 2004 (dalam miliar rupiah)

Sumber: BAPEDA dan BPS Kota Surakarta. (2005). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Tahun 2004, data diolah.

BOKS 5:

BEBERAPA MAKANAN KHAS KOTA SURAKARTA

Cabuk Rambak

Cabuk rambak adalah makanan rakyat sederhana yang cocok untuk makan pagi. Ketupat lembut diiris tipis-tipis, ditaburi sambal wijen yang gurih dengan rajangan halus daun jeruk purut. Dimakan dengan karak atau krupuk gendar. Sajian ini mulai langka dan terancam punah.

Nasi Liwet

Nasi liwet adalah hidangan khas Solo yang sangat mirip dengan sego ayam (nasi ayam) di Semarang. Nasinya diliwet dengan sedikit santan dan bumbu, sehingga terasa gurih. Lauk utamanya adalah sambal goreng labu siam dengan banyak kuah. Topping-nya adalah suwiran ayam, jeroan ayam, dan telur pindang. Nikmat disantap dengan rambak(krupuk kulit). Nasi liwet yang terkenal di Solo dijajakan di sekitar Keprabon.

Tengkleng

Tengkleng adalah semacam gule encer dengan bagian kepala kambing sebagai isinya. Penjualnya banyak tersebar di berbagai penjuru Solo.

Timlo

Timlo adalah sajian khas Solo yang mirip sop. Isi Timlo biasanya bihun, telur, ceriping, ati ampela ayam, dan telur pindang. Versi aslinya memakai jamur kuping, batang sedap malam, wortel, dan soun.

Soto

Ada beberapa warung soto yang populer di Solo sebagian besar menggunakan daging sapi, sebagian kecil menggunakan ayam. Berbagai lauk yang dapat dipilih adalah tempe goreng (wajib! khas dan gurih), lidah sapi, paru, dan lain-lain.

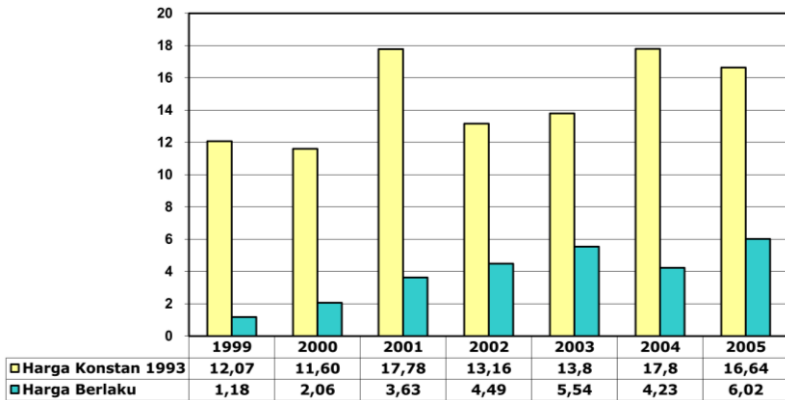
Wedangan (HIK)

Pada malam hari, di Solo banyak bermunculan warung-warung yang berjualan wedang (air panas) di berbagai penjuru kota. Istilah Solo untuk warung wedang seperti ini adalah hik. Tidak jelas asal-usul dan artinya, sekalipun ada juga yang memanjangkannya sebagai Hidangan Istimewa Keluarga.

Sumber: www.jalansutra.or.id

Sejak terjadinya peristiwa kerusakan di Kota Surakarta, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kota Surakarta tahun 2003 sebesar Rp 1.518.008,05 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 6,46% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.425.961,17 juta. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah sebesar 4,37%; yang mengalami penurunan dibanding tahun 2003.

*)



Gambar 4.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Berdasar Harga Brlaku dan Harga Kontan Tahun 1993, Tahun 1999-2005 (dalam persen)

Sumber: Data diolah dari Kantor Bank Indonesia SOLO (2006).
PDRB Kabupaten / Kota di Wilayah Surakarta

Investasi di Kota Surakarta tahun 2003 sebesar Rp 724,55 miliar (Rp 724.550.760.000), atau meningkat sebesar 24,35% disbanding tahun 2002 yang besarnya Rp 582,69 miliar (Rp 582.688.940.000). Keseluruhan investasi tersebut terdiri dari Investasi Sektor Industri, Perdagangan dan setoran modal BKK (Bank Kredit Kecamatan). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Investasi Sektor Industri sebesar Rp 279, 88 milyar,
- Investasi Sektor Perdagangan sebesar Rp 443,31 milyar,
- Investasi Sektor BKK sebesar Rp 1,36 milyar

Investasi di bidang industri ini didukung dengan program pengembangan Industri Rumah Tangga (Non Formal), Industri Kecil dan Menengah serta program peningkatan teknologi industri. Investasi di bidang perdagangan didukung dengan program pengembangan dan pembinaan usaha daerah, program pengembangan koperasi dan pengusaha kecil serta penyertaan modal BUMD. Program-program dimaksud merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah pada UKM dan koperasi dalam upaya pencapaian kemandirian ekonomi dan keuangan daerah yang bertumpu pada kemampuan daerah.

APBD Kota Surakarta pada tahun 2005 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 18,66 miliar. Dari data yang ada Pos Pendapatan mencapai Rp 357,51 miliar dan Pos Belanja total mencapai Rp 357,54 miliar. Munculnya defisit diakibatkan oleh besarnya pos pembiayaan, tepatnya pembiayaan untuk pengeluaran (termasuk untuk bayar pokok dan bunga pinjaman) sebesar Rp 20,06 miliar; sementara dari pos penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,40 miliar.

Besarnya defisit dalam APBD tahun 2005 tidak terlepas dari berbagai kegiatan pembangunan di Kota Surakarta yang dibiayai dengan utang/pinjaman. Sebagai misal Pembangunan

Pasar Singosaren, Pembangunan Gedung Balaikota, Pembangunan Gedung DPRD, Rehabilitas PJU (Peneranagan Jalan Umum). Semua kegiatan di atas dibiayai dengan pinjaman, yang pada tahun 2005 dianggarkan akan menghamburkan sekitar Rp 33,78 miliar jika semua kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, biaya komitmen, jasa bank, denda pokok dan denda bunga dilaksanakan hingga akhir tahun 2005.

e. Status Perekonomian Kota Surakarta

Dengan menganalisis data PDRB, PDRB Per Kapita dan juga tingkat pertumbuhan PDRB di Kota Surakarta; kemudian membandingkannya dengan data PDRB, Rerata PDRB, PDRB Per Kapita dan juga tingkat pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Tengah; dapat digambarkan letak atau posisi daerah dan juga posisi perekonomian Kota Surakarta terhadap Propinsi Jawa Tengah.

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa posisi daerah / kota Surakarta masuk dalam kategori maju dan cepat tumbuh, dimana baik PDRB Per Kapita maupun tingkat pertumbuhan PDRB di Kota Surakarta, jauh melebihi Propinsi Jawa Tengah. Sementara jika dilihat dari dimensi status perekonomiannya, masuk dalam kategori Prima, yaitu suatu kondisi dimana PDRB Kota Surakarta melebihi Rerata Jawa Tengah dan tingkat pertumbuhan PDRB Kota Surakarta juga melebihi Jawa Tengah. Namun demikian prestasi ini menyisakan PR (Pekerjaan Rumah) yang besar bagi para pemimpin di masa depan, karena seiring dengan kemajuan perekonomian di Kota Surakarta; terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Hal ini ditunjukkan oleh membesarnya Indeks Ketimpangan dari sebesar 0,2538 pada tahun 2000; meningkat menjadi sebesar 0,2904 pada tahun 2003. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Status Kota Surakarta terhadap Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2003

Wilayah	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Surakarta				
- PDRB (juta)	1.302.715,92	1.353.882,64	1.425.961,17	1.518.008,05
- PDRB Per Kap. (Rp)	2.656.527,49	2.763.696,98	2.913.775,97	3.104.514,10
- Pertumbuhan (%)	4,15	3,93	5,32	6,46
Prop. Jawa Tengah				
- PDRB (juta)	40.941.667,09	42.305.176,42	43.775.693,08	45.557.108,45
- Rerata PDRB (juta)	1.169.761,92	1.208.719,33	1.250.734,09	1.301.631,67
- PDRB Per Kap. (Rp)	1.323.937,72	1.356.627,15	1.392.082,57	1.436.656,99
- Pertumbuhan (%)	3,93	3,33	3,42	4,22
Status Kota Surakarta	Maju & Cepat	Maju & Cepat	Maju & Cepat	Maju & Cepat
- Daerah 1)	Tbh	Tbh	Tbh	Tbh
- Perekonomian 2)	Prima /	Prima /	Prima /	Prima /
- Indeks Ketimpangan 3)	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
	0,2538	0,6127	0,6678	0,2904

Catatan: 1) Status Daerah ada 4 (empat), yaitu: (1) Daerah Relatif Tertinggal; (2) Daerah Maju Tetapi Tertekan (PDRB Per Kap. Besar); (3) Daerah Berkembang Cepat (Pertumbuhan Besar); dan (4) Daerah Maju dan Cepat Tumbuh.

2) Status Perekonomian ada 4 (empat), yaitu: (1) Terbelakang; (2) Potensial (PDRB Besar); (3) Berkembang (Pertumbuhan Besar); dan (4) Prima/Unggul.

3) Indeks Ketimpangan diukur dengan menggunakan model 'Williaamson-Index' yang menunjukkan semakin besar angka indeksnya (mendekati 1) semakin besar tingkat ketimpangannya.

Sumber: Diolah dari data Surakarta Dalam Angka dan PDRB Kota Surakarta.

4.2.4 Kemiskinan

Dalam menghitung tingkat kemiskinan, masalah utama adalah data. Data kemiskinan nasional biasanya diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data Susenas menggunakan ukuran garis kemiskinan sementara data BKKBN menggunakan kesejahteraan keluarga. Data Susenas sangat terbatas yakni hanya sekitar 250.000 sampel untuk seluruh Indonesia, dan tidak bisa menjangkau seluruh desa dan kecamatana, maka yang biasanya dipergunakan adalah data BKKBN yang dapat menjangkau sampai tingkat desa. Data kemiskinan yang dipergunakan di sini adalah data BKKBN mengenai Keluarga Sejahtera. Kriteria keluarga miskin menurut BKKBN adalah penjumlahan dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Dalam kedua kriteria itu masih dibedakan lagi sebagai dampak faktor ekonomi dan non ekonomi.

Dengan menggunakan data KK Miskin karena sebab ekonomi dibandingkan dengan total KK pada tahun 1999 sebesar 29%. Sejak tahun 2000 semakin menunjukkan perubahan yang menggembirakan, seperti ditunjukkan dengan prosentase yang semakin menurun. Penurunan terjadi pada tahun 2000 hanya 27%, dan pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-masing menjaei 24%. Sementara itu, jika data KK miskin yang non ekonomi dimasukkan prosentasenya menjadi lebih besar, misalnya seperti pada tahun 1999 yang mencapai 36%. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2000 menjadi 34%, namun kemudian meningkat lagi pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-masing 37%, 38% dan 37%. Ini menandakan bahwa jika hanya menggunakan data ekonomi saja, terjadi penurunan KK Miskin, sebaliknya jika data non ekonomi dimasukkan jumlah KK Miskin justru meningkat. Namun pada tahun 2005, tingkat kemiskinan di Kota Surakarta ada kecenderungan menurun menjadi 33 % (tabel 3.7).

Tabel 4.6. Kelompok Keluarga Miskin Kota Surakarta Tahun 1999-2005

Tahun	KK Miskin (Ek)	KK Miskin (EK + Non Ek)	Total KK	Prosentase (2)/(4)	Prosentase (3)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1999	31615	39226	109935	29%	36%
2000	30828	38675	112325	27%	34%
2001	27545	42219	115009	24%	37%
2002	48485	74961	198102	24%	38%
2003	28372	42676	115982	24%	37%
2005	-	42974	130900	-	33%

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2003, Bapeda 2004, Podes 2005

Jika dilihat potret kemiskinan di Kota Surakarta terlihat bahwa Kec. Banjarsari merupakan daerah yang paling banyak keluarga miskin mencapai 34%. Berikutnya diikuti oleh Kec. Jebres dan Laweyan masing-masing mencapai 32%. Sementara yang relatif rendah tingkat kemiskinannya adalah Kec. Pasar Kliwon dan Serengan yakni masing-masing 32 dan 29%. (tabel. 3.8).

Tabel 4.7. Data Kepala Keluarga Miskin di Kota Surakarta, Tahun 2005

No	Kecamatan	KK Miskin	Jumlah KK	Persentase (%)
1.	Laweyan	7707	23306	33
2.	Serengan	3976	13514	29
3.	Pasar Kliwon	7265	22934	32
4.	Jebres	10693	32240	33
5.	Banjarsari	13333	38906	34
	Total	42974	130900	33

Sumber: Potensi Desa (Podes) 2005.

4.2.5 Pasar Tradisional

Kota Surakarta dikenal sebagai kota perdagangan, di sini terdapat 39 pasar tradisional. Yang dibagi menjadi enam kelas dari IA, IB, IIA, IIB, IIIA, dan IIIB. Pembagian kelas itu berdasarkan

tingkat keramaian dan pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian di Kota Surakarta. Berikut ini akan diuraikan beberapa pasar –pasar tersebut. Dalam kelompok kelas IA, terdapat Pasar Legi, Klewer dan Singosaren. Pasar Legi merupakan pusat pasar untuk bahan-bahan pokok seperti beras, gula, beras dan aneka macam sayuran. Pasar ini terletak pada tanah ukuran 16.640 M² dengan jumlah los 1545 di mana yang terisi adalah 1390 dan sisanya 155 los masih kosong, dan kios terisi semua sebanyak 207 kios. Pasar Klewer merupakan pusat batik dan konveksi yang menjadi ikon Kota Surakarta. Luas tanah Pasar Klewer adalah 12,950 M² dengan gedung bertingkat dua. Baik los sebanyak 136 maupun kios sejumlah 2069 di Pasar Klewer terisi semua, ini menunjukkan bahwa pasar ini sangat diminati oleh pedagang. Pembahasan tentang Pasar Klewer beserta dinamikanya akan dibahas pada sub bab khusus. Sementara itu, Pasar Singosaren yang dahulu adalah pasar tradisional sekarang sudah berubah menjadi pasar bergaya arsitektur moderen, saat ini pasar ini menjadi pusat seluler. Luas Pasar Singosaren adalah 4.900 M² dengan 255 kios yang terisi semua.¹⁴

Sementara untuk dalam kelompok pasar kelas IB terdapat Pasar Gede, Nusukan, Harjodaksino, Jongke dan Notohardjo. Luas Pasar Gede adalah 5.607 yang terdiri atas 634 los dimana 604 los terisi dan 0 los kosong, dan 134 kios terisi semua. Luas pasar nusukan yang baru selesai direnovasi pada tahun 2007 ini berdiri di atas tanah seluas 6.531 M² yang terdiri atas 666 los dimana yang terisi adalah 519 los dan yang masih kosong 147 los. Sementara itu, terdapat 222 kios pasar nusukan yang telah terisi adalah 87 kios

¹⁴ Namun rupa-rupanya setelah berubah menjadi pasar moderen, sebagian besar pedagang lama di Pasar Singosaren tidak berhasil menempati kiosnya kembali. Hanya ada satu pedagang lama yang tersisa paska renovasi pasar ini tahun 1980-an (Wawancara dengan Abdul Kadir, 11 Januari 2008).

dan sisanya sebanyak 121 kios masing kosong. Luas Pasar Harjodaksion adalah 8.997 di mana los yang telah terisi adalah 863 dan 46 masih kosong, serta 56 kios terisi, sedangkan 24 kios masih kosong. Luas Pasar Jongke adalah 12.254 M² dimana 747 los sudah terisis dan 121 los masih kosong, sedangkan 97 kios terisi dan 7 kios masih kosong. Pasar Notoharjo merupakan pasar terluas di Kota Surakarta yakni luasnya mencapai 17.276 M² dimana kios yang telah terisi mencapai 989 dan yang masih kosong hanya 29 kios. Saat ini, Pasar Notoharjo diisi oleh bekas pedagang kali lima (PKL) klitikan dari Banjarsari.

Wacana utama yang dikembangkan oleh Pemkot tentang pengelolaan pasar tradisional adalah melakukan renovasi fisik. Walikota Joko Widodo dalam peresmian Pasar Nusukan menyatakan bahwa setiap tahun Pemkot akan merenovasi 4-6 pasar. Tujuannya adalah memberdayakan para pedagang sehingga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar moderen yang kian merebak. Pembangunan Pasar Nusukan dilakukan oleh pihak swasta sebesar Rp18,630 miliar dimana Pemkot memberikan subsidi sebesar Rp10,494 miliar (APBD 2006). Persoalannya adalah konsep apa yang diterapkan oleh Pemkot agar pedagang lama tetap dapat menempati kios, setelah paska renovasi. Walikota Joko Widodo menegaskan bahwa untuk pedagang lama baik yang menempati los dan kios baik di lantai satu maupun dua digratiskan, sedangkan untuk pedagang baru wajib membeli. Solusi ini merupakan langkah bijak, karena mementahkan adegium bahwa pasar baru akan menggusur pedagang lama, seperti yang terjadi di berbagai pasar tradisional yang selesai direnovasi diberbagai tempat akhir-akhir ini. ¹⁵

¹⁵ “Tiap Tahun 4-6 Pasar Direnovasi”, *Suara Merdeka*, 27 Maret 2007.

Tabel 4.8. Pasar-Pasar Tradisional di Kota Surakarta

No	Pasar	Kelas	Luas Tanah	Los		Kios	
				Isi	Kosong	Isi	Kosong
1.	Legi	IA	16.640	1390	155	207	0
2.	Klewer	IA	12.950	136	0	2069	0
3.	Singosaren	IA	4.900	0	0	255	0
4.	Gede	IB	5.607	604	30	134	0
5.	Nusukan	IB	6.531	519	147	87	121
6.	Harjodaksino	IB	8.997	863	46	56	24
7.	Jongke	IB	12.254	747	121	97	7
8.	Notoharjo	IB	17.276	0	0	989	29
9.	Rejosari	IIA	2.477	140	20	24	0
10.	Turisari	IIA	2.750	241	13	36	0
11.	Purwosari	IIA	1.119	157	32	14	0
12.	Sidodadi	IIA	1.784	231	23	14	0
13.	Ledoksari	IIA	494	35	7	33	0
14.	Kadipolo	IIA	1.496	335	104	7	0
15.	Tanggul	IIB	2.400	99	43	9	0
16.	Depok	IIB	4.480	182	3	0	0
17.	Kabangan	IIB	1.833	64	79	47	0
18.	Penumping	IIB	1.200	85	27	2	0
19.	Ayam	IIB	11.220	179	141	0	0
20.	Kliwon	IIB	2.301	128	40	13	0
21.	Jebres	IIB	2.484	46	74	17	0
22.	Kembang	IIB	1.409	80	0	20	0
23.	Balapan	IIB	1.375	152	0	37	0
24.	Mebel	IIB	5.755	67	0	18	0
25.	Windujenar	IIB	2.384	195	0	0	0
26.	Ngemplak	IIIA	947	53	6	14	0
27.	Mojosongo	IIIA	1.190	176	0	0	0
28.	Bangunharjo	IIIA	1.116	15	26	5	0
29.	Sidomulyo	IIIA	840	58	0	0	0
30.	Gading	IIIA	2.283	195	0	33	0
31.	Sangkrah	IIIA	1.120	140	0	4	0
32.	Tunggulsari	IIIA	740	145	0	19	0
33.	Jurug	IIIA	540	0	0	36	0
34.	Dawung	IIIA	800	0	0	0	0
35.	Mojosongo Perumnas	IIIB	1.489	75	53	3	0
36.	Ngumbul	IIIB	482	10	36	11	0
37.	Bambu	IIIB	450	0	0	0	0
38.	Besi	IIIB	15.120	309	0	0	0
39.	Joglo	IIIB	1.005	68	2	29	0

Sumber: Kota Surakarta dalam Angka 2006.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa Pasar Klewer adalah ikon perdagangan di Kota Surakarta. Pasar ini pada mulanya adalah pasar pedagang kali lima pada dekade 1950-an, dimana para pedagang batik menyempirkan dagangannya atau dalam bahasa Jawa “klewer” berubah menjadi pasar konveksi terbesar di Jawa Tengah sejak awal Orde Baru. Selain sebagai pasar yang melayani eceran, Pasar Klewer juga dikenal sebagai pasar grosir yang melayani partai besar. Harga yang murah dan mutu barang yang berkualitas adalah andalan Pasar Klewer. Bahkan Pasar Klewer menjadi saluran distribusi bagi beberapa produk konveksi dari Jakarta, Pekalongan, Cirebon dan Kota-kota lain. Pedagang Pasar Klewer itu akan mendistribusikan produk-produk itu ke daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pendeknya, saat ini Pasar Klewer telah menjadi pusat perdagangan konveksi terbesar di Jawa Tengah. Pasar Klewer tidak ubahnya seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta.

Sejak Pasar Klewer direnovasi pada tahun 1970-an, hingga saat ini terdapat 2024 pedagang yang mempunyai kios dimana 70% adalah pengusaha pribumi, sedangkan sisanya atau 30% adalah pedagang non pribumi Tionghoa dan Arab. Kendati pun minoritas omset pedagang Tionghoa mencapai 70% lebih dari seluruh omset perdagangan di :Pasar Klewer. Diperkirakan omset sehari Pasar Klewer mencapai Rp 10 milyar lebih. Sementara, retribusi yang diterima oleh pemerintah setiap tahun rata-rata sekitar Rp2,5 milyar yang dihitung dari retribusi Rp100.000/bulan setiap kios. Sementara harga sebuah kios yang berukuran 2 x 2 M² di Pasar Klewer saat ini mencapai antara Rp 200-250 juta. Jika pada dekade 1970-an harga sebuah kios hanya Rp250 ribu, maka pada akhir 1980-an telah mencapai Rp65 juta, dan pada dekade 1990 sudah di atas Rp 200 juta. Namun ketika ada isu akan direnovasi pada masa Walikota Slamet Suryanto, harga kios pasar klewer sempat menurun, namun saat ini meningkat lagi.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Kusbani, Pengurus HPPK, 11 Januari 2008.

Seperti halnya Pasar Tanah Abang di Jakarta, wacana renovasi dan revitalisasi fisik telah menyebabkan keresahan para pedagang. Wacana renovasi Pasar Klewer telah digulirkan pada masa Walikota Slamet Suryanto dengan hadirnya calon investor dari Jakarta. Para pedagang Pasar Klewer yang bergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) menolak rencana renovasi itu.¹⁷ Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terbakarnya pasar -seperti yang sering terjadi jika para pedagang menolak direnovasi di berbagai pasar- sejak itu sampai sekarang, para pedagang melakukan ronda secara bergilir setiap malam. Hal itu yang menyebabkan para pedagang pasar klewer sangat sensitif dengan istilah renovasi bahkan revitalisasi fisik. Para pedagang berpendapat bahwa posisi Pasar Klewer yang sangat strategis telah menjadi incaran oleh berbagai pihak. Seperti telah disebutkan di muka, Pasar Klewer adalah ikon perdagangan Kota Surakarta. Posisinya sebanding dengan Pasar Tanah Abang di Jakarta, di mana setiap ada isu renovasi mempunyai muatan politik yang cukup luas. ¹⁸

Wacana tentang renovasi berasal dari persepsi umum yang berkembang dari masyarakat dan pemerintah tentang pasar tradisional yang cenderung kumuh dan semrawut. Persepsi seperti ini juga mengenai Pasar Klewer dimana terjadi kesemerawutan dan kekumuhan. Menurut HPPK kesemerwutan disebabkan pemerintah tidak tegas pemerintah menerapkan aturan. Pertama, pemerintah tidak tegas dalam mengatur PKL. PKL yang beroperasi di Pasar Klewer mencapai sekitar 2000 pedagang baik yang di dalam maupun di luar pasar. Bagi HPPK, PKL yang berada di dalam pasar tidak menjadi masalah, justru yang bermasalah adalah PKL

¹⁷ Pengurus HPPK dipilih dalam periode 4 tahun sekali, saat ini diketuai oleh Abdul Kadir.

¹⁸ Wawancara dengan Abdul Kadir, Ketua Pengurus HPPK, 11 Januari 2008.

yang berada di luar pasar yang justru membuat lalu lintas menjadi macet. Kedua, kesemerawutan juga disebabkan tempat parkir tidak berfungsi sebagai mestinya. Di tempat parkir justru dibiarkan menjadi tempat transaksi pedagang bermobil. Ini menyebabkan tempat parkir menjadi “pasar baru” yang juga beromset tinggi dan dikhawatirkan lambat laun menjadi pesaing Pasar Klewer itu sendiri. Ketiga, akses jalan menuju Pasar Klewer sengaja dibuat ruwet, sehingga para pengunjung agak kesulitan mengunjungi Pasar Klewer.¹⁹

Sementara untuk isu tentang kekumuhan, para pedagang juga punya argumentasi. Pertama, pihak pemerintah tidak pernah melakukan perbaikan pasar secara utuh. Padahal sebenarnya wujud pasar masih sangat bagus dan kuat, cuma terbatasnya fasilitas umum dan perwajahan yang pucat membuat Pasar Klewer terlihat kumuh. Kedua, Lurah Pasar Klewer tidak mendapat wewenang penuh untuk menata pasar secara baik. Sebagai contoh untuk mengganti lampu yang rusak saja, Lurah Pasar harus mengusulkan ke Pemkot yang membutuhkan waktu cukup lama.²⁰ Selain masalah keruwetan dan kekumuhan, para pedagang juga mempunyai argumen atas penolakan renovasi Pasar Klewer. Pertama, jika terjadi renovasi, maka untuk sementara para pedagang harus dialihkan ke suatu tempat, ini dapat menurunkan omset bahkan bisa menghabiskan modal pedagang. Kedua, tidak ada jaminan bahwa para pedagang lama dapat masuk kembali ke pasar yang baru. Karena dengan posisinya yang amat strategis, kios Pasar Klewer akan menjadi perebutan dari berbagai kepentingan. Kalau hal ini terjadi dapat dipastikan bahwa yang dapat membeli kios baru itu hanyalah kelompok pedagang pemodal kuat,

¹⁹ Wawancara dengan Abdul Kadir, Ketua Pengurus HPPK, 11 Januari 2008.

²⁰ Wawancara dengan Abdul Kadir, Ketua Pengurus HPPK, 11 Januari 2008.

sementara pedagang pribumi yang mempunyai modal kecil akan tersingkir.²¹

Berkaitan dengan hal itu, yang diperlukan oleh para pedagang Pasar Klewer adalah pertama membenahan manajemen pengelolaan pasar dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Lurah Pasar untuk merawat pasar. Kedua, penertiban PKL baik yang beroperasi di dalam maupun di luar pasar. Ketiga, mempermudah akses jalan bagi pengunjung ke Pasar Klewer. Keempat, memfungsikan tempat parkir sebagai mana mestinya dan melarang transaksi pedagang mobil diparkiran tersebut.

²¹ Wawancara dengan Abdul Kadir, Ketua Pengurus HPPK, 11 Januari 2008.

5

SURAKARTA SEBAGAI KOTA INKLUSIF: SEBUAH EPILOG

Dalam bab ini akan dibahas tentang epilog dari Buku Evolusi Ekonomi Kota Solo ini, terutama focus kepada pembahasan dua hal yakni persepsi dari LIPI tentang Solo sebagai Kota Inklusif. Di sini akan dibahas hasil penelitian Warsilah, dkk (2017) tentang Kota Solo yang dengan indikator tertentu dinyatakan sebagai Kota Inklusif. Kedua adalah Kota Solo sebagai Kota pelopor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang menginspirasi berbagai kab/kota untuk menerapkan TPID seperti studi yang telah dilakukan oleh Hakim, et al (2014):

5.1 Solo Kota Inklusif

Setelah lebih dari 15 (lima belas) tahun, studi ini menemukan beberapa hal yang penting tentang Evolusi Ekonomi Kota Solo adalah penobatan Kota Solo sebagai Kota inklusif. Studi khusus tentang Kota Solo sebagai Kota Inklusif telah dilakukan oleh LIPI pada tahun 2017. Beberapa pertimbangan mengapa Solo ditetapkan sebagai Kota Inklusif adalah sebagai berikut (Warsilah, 2017):

Pertama, pembangunan inklusif di Kota Solo bersifat substantif, terutama kebijakan Pembangunan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi-Rudi yang diteruskan juga pada periode kepemimpinan berikutnya. Beberapa kebijakan inklusif

yang dilakukan antara lain adalah (1) mengembangkan ekonomi kerakyatan, penataan PKL, revitalisasi pasar tradisional, (2) meningkatkan pelayanan prima dalam bidang perijinan, pendidikan, Kesehatan, (3) mendorong iklim usaha yang mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Kedua, pembangunan inklusif di Kota Solo juga bersifat integratif yakni mencakup seluruh aspek kehidupan Masyarakat terutama yang berada di lapis bawah. Beberapa program itu adalah (1) Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) untuk Pendidikan, (2) Revitalisasi pasar tradisional untuk bidang ekonomi, (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) untuk bidang Kesehatan, (4) penataan PKL, serta (5) Program penerbitan hunian illegal di Bantaran Sungai Bengawan Solo.

Ketiga, kebijakan inklusif di Kota Solo bersifat sistematis. Terutama karena terkait dengan menciptakan struktur yang komprehensif. Cara pertama adalah mengembangkan struktur sosial yang membuka kesempatan kepada Masyarakat lapisan bawahnya untuk meningkat ke lapisan atasnya. Sementara itu, cara kedua adalah membuka ruang partisipasi kepada Masyarakat agar bisa terlibat dalam proses pembangunan. Pelibatan Masyarakat ini tidak hanya bersifat formalistic seperti hadir dalam forum-forum konsultasi public, seperti musrenbang, public hearing, melainkan adanya bentuk hubungan kemitraan antar stakeholder dan bentuk partisipasi lain seperti delegated power dan citizen control.

Keempat, kebijakan inklusif telah memberikan hasil yang positif. Baik yang terkait dengan terpenuhi rasa keadilan Masyarakat maupun yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Program-program yang dijalankan telah mampu meningkatkan berbagai indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga ada pendapaian agenda umum reformasi

local, pemenuhan kebutuhan pokok (basic need), peningkatan pelayanan prima yakni yang mudah, cepat, murah, transparan, berkeadilan dan pengembangan di aras local serta perwujudan good governance.

Kelima, pentingnya kepemimpinan lokal seperti ditunjukkan pasangan Jokowi-Rudi yang kemudian diteruskan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Mereka memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin sehingga dapat menghasilkan program-program yang bersifat pro poor. Sebagai kasus adanya keterbatasan anggaran dalam menjalankan program-program yang bersifat pro poor, maka tidak segan-segan pemerintah membuat diskresi dengan jalan mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran dengan menekan serendah mungkin praktek-praktek markup, mengurangi potensi kebocoran anggaran dengan menerapkan pelaksanaan e-procurement di lingkup Pemkot Solo.

5.2 Pelopor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Indonesia pernah mengalami situasi hiperinflasi yang berat baik yang disebabkan oleh faktor permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*). Pengalaman hiperinflasi pertama sebagai akibat faktor permintaan (*demand side inflation*) di mulai pada masa Kabinet Hatta (20 Desember 1949-6 September 1950) yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar. Untuk mengatasi inflasi itu, pada tanggal 19 Maret 1950, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan kebijakan “pengguntingan uang” yang juga dikenal sebagai “gunting Sjafruddin”, terhadap uang NICA. Untuk mencegah efek negatif dari tindakan ini, maka separuh mata uang dipakai sebagai alat pembayaran, dan separuh lainnya ditukar dengan surat obligasi pemerintah yang dibayar kembali secara berangsur-angsur (Prawiranegara, 1987).

Tentu saja, mengingat tingkat inflasi dan tingginya peredaran uang, tindakan ini secara ekonomis bisa dibenarkan, dan pada waktu yang bersamaan, pengguntingan uang ini juga bernapaskan semangat nasionalisme. Setidak-tidaknya, kenyataan ini tercermin dari pernyataan Sjafruddin Prawiranegara (1987:102): “We had to get a uniform currency for the whole of Indonesia”. Pemilikan mata uang nasional yang tersendiri adalah syarat-syarat moneter dan ekonomis paling elementer bagi sebuah negara. Namun dalam pengertian politis, sebagaimana juga telah disebutkan di atas, pengaruh kepemilikan mata uang nasional ini bergerak lebih jauh dari sekedar batas-batas ekonomi yakni sebuah usaha mewujudkan perlawanan ekonomi terhadap dominasi kolonial. Penafsiran bahwa penghapusan “uang NICA” tersebut lebih merupakan tindakan politik, sebab apa yang dihasilkan secara ekonomis tidaklah signifikan: kendatipun pada awalnya peredaran uang berhasil diturunkan sampai sekitar 40% dan laju inflasi relatif tertekan, namun setelah beberapa pekan, jumlah uang beredar dan inflasi kembali meningkat (Oey, 1991:327).

Demikian terjadi lagi inflasi dari sudut permintaan (*demand side inflation*) ada akhir masa Demokrasi Terpimpin ini sebagai akibat pencetakan uang menyusul pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat pesat. Pengeluaran itu terutama diperuntukkan membiayai nasionalisasi perusahaan Belanda, dan peperangan, baik dalam rangka menumpas pemberontakan-pemberontakan maupun untuk merebut Irian Barat, serta konfrontasi dengan Malaysia. Keadaan ini menyebabkan defisit anggaran membengkak. Jika pada 1955, defisit anggaran hanya sebesar 14% dari total penerimaan pemerintah, maka pada 1965 telah meningkat menjadi 174% (Mas’oed, 1989:47). Untuk mengatasi defisit anggaran yang semakin besar, pemerintah mengambil jalan pintas melalui pencetakan uang. Pencetakan uang merupakan salah satu penyebab lahirnya inflasi, karena dalam

ekonomi makro terdapat keyakinan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan menaikkan inflasi. Maka, dapat dipastikan bahwa pencetakan uang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hiperinflasi pada tahun 1960-an.

Sementara, pada masa ini juga terjadi inflasi sisi penawaran (*supply side inflation*) karena adanya pasokan. Sebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah merosotnya pasokan komoditi pokok: beras. Pada tahun 1965, harga beras telah mencapai Rp726,04/kg, padahal pada tahun sebelumnya masih Rp202,08/kg. Selain karena disebabkan kegagalan panen, kelangkaan beras juga diakibatkan melesetnya realisasi impor. Pada tahun 1965 direncanakan akan mengimpor 1.010 ribu ton, namun realisasinya hanya 203 ribu ton (Mears dan Moeljono, 1990: 32). Begitu pasokan beras di pasar mengalami penurunan, maka harga beras melambung tinggi yang diikuti kenaikan komoditi lain yang mendorong hiperinflasi.

Perpaduan pencetakan uang yang berlebihan dan kelangkaan beras merupakan penyebab utama lahirnya hiperinflasi. Jika tingkat inflasi pada tahun 1960 dan 1961, masing-masing mencapai hanya 20% dan 95%, maka pada tahun 1965 menembus angka 605%. Untuk mengatasi hiper inflasi itu, lagi-lagi pemerintah melakukan kebijakan pemotongan nilai uang. Melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang dari Rp1000 menjadi Rp1. Kebijakan ini jelas merugikan masyarakat luas, karena kekayaan masyarakat menurun 1000%.

Kebijakan dan tindakan menurunkan tingkat inflasi dengan menurunkan JUB ini menampakkan hasil yang nyata. Jika pada tahun 1966, pertumbuhan jumlah uang beredar (JUB) sebesar 763% dan karena itu memicu terjadinya hiperinflasi sebesar 636%, maka mulai tahun 1967 JUB hanya tumbuh sekitar 132% dan tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 171%. Pada tahun

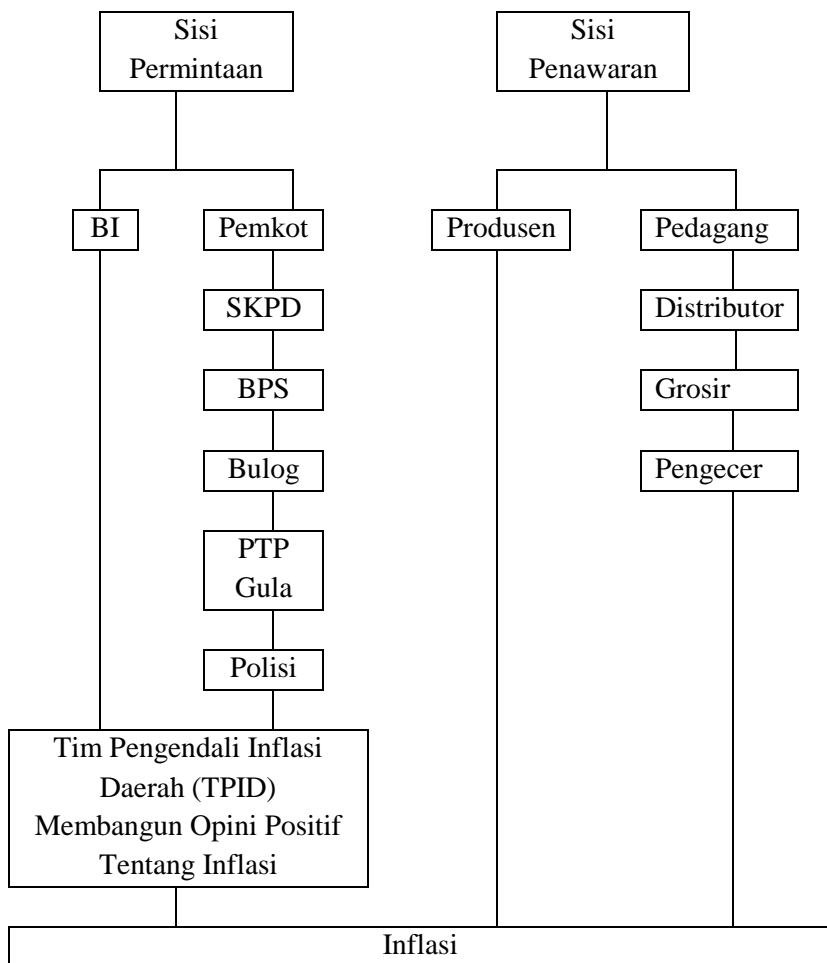
1969 pertumbuhan JUB semakin menurun menjadi 61% dan tingkat inflasi menurun secara lebih drastis hingga mencapai 17%. Penurunan tingkat inflasi terendah di bawah dua digit terjadi pada tahun 1971, hanya sekitar 3%, dengan pertumbuhan JUB sebesar 28%. Hal ini adalah prestasi paling gemilang dari program stabilisasi pada awal Orde Baru.

Kecukupan logistik, terutama komoditi beras menjadi program utama jangka pendek yang harus disukseskan pemerintah transisi pada masa awal Orde Baru. Kegagalan penyediaan beras pada masa Orde Lama telah menjadi “momok” yang paling menakutkan regim baru pimpinan Jenderal Soeharto ini. Pada 23 April 1969 dibentuklah Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang bertugas untuk mengendalikan pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok, terutama beras. Untuk tahap awal, fungsi lembaga ini adalah untuk mencukupi kebutuhan beras pegawai negeri dan militer. Karena sangat pentingnya lembaga ini, maka langsung dikomandani Jenderal Soeharto, sedangkan Kepala Stafnya adalah Achmad Tirtosudiro. Dalam usaha meningkatkan kinerja Kolognas, maka pada 10 Mei 1967, lembaga itu dirubah menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog). Kepala Staf Kolognas Letjen. Achmad Tirtosudiro ditunjuk sebagai Kabulog. Tugas Bulog adalah berfungsi sebagai badan tunggal pengendalian kebutuhan pangan nasional (Booth & McCawley, 1981)

Dengan adanya Bulog ini, pemerintah dapat mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan beras dan bahan makananan pokok lainnya. Hal ini merupakan prestasi paling gemilang dari program stabilisasi pada awal Orde Baru. Penurunan hiperinflasi secara drastis menurut Hill (1996) ini merupakan prestasi terbesar dari Pemerintah Orde Baru. Bahkan tidak hanya itu, kebijakan yang konsisten dan ditunjang lembaga yang kredibel seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) telah sanggup

mengendalikan inflasi sepanjang 32 tahun Pemerintah Orde Baru berkuasa.

Namun setelah reformasi ketika tatanan ekonomi berubah, pola pengendalian inflasi juga mengalami perubahan yang drastis. Jika pada masa Orde Baru peranan Bulog sangat dominan, maka pada era reformasi peranan Bulog dibatasi. Bahkan setelah keluarnya undang-undang paket desentralisasi daerah pada tahun 1999, posisi dan peranan Bulog menjadi sangat terbatas. Agar tetap dapat membantu menyediakan kebutuhan pokok secara nasional, terutama beras, Bulog berubah badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dalam posisi ini Bulog hanya sebagai penunjang stabilitas harga komoditi beras, sedangkan yang bertanggungjawab secara langsung adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian jika dahulu, Bulog bisa langsung dapat melakukan operasi pasar jika terdapat kelangkaan kebutuhan pokok, saat ini tidak lagi. Kewenangan itu melakukan operasi pasar adalah di tangan Pemkab/kota.



Gambar 5.1 Jalur Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Pangan

Solo merupakan pelopor berdirinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 589.05/20/1/2010 tertanggal 1 Maret 2010 ditetapkan berdirinya TPID. Yang ditandatangani oleh Walikota Joko Widodo. Dalam SK tersebut, Ketua pengarah adalah Walikota Surakarta, sedangkan Pimpinan BI Solo sebagai sekretaris. Terbentuknya TPID Kora Solo adalah terinspirasi adanya Tim Pengendali Inflasi Nasional yang dibentuk oleh Bank Indonesia di Jakarta. Tugas utamanya adalah mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) di pasar.

TPID menggantikan sistem yang lama dimana terdapat lembaga tunggal yakni Bulog. Maka, dalam TPID pengendali inflasi tidak dimonopoli oleh satu lembaga saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua *stakeholders* di daerah yang meliputi antara lain Pemkab/kota, Bank Indonesia, BPS, Kepolisian, dan Bulog. TPID pada prinsipnya adalah memantau inflasi, sekaligus mengurangi adanya distorsi harga sebagai akibat adanya informasi yang tidak simetris tentang perkembangan harga. Dengan informasi yang relatif simetris akan dapat mereduksi etimasi masyarakat yang berlebihan tentang kemungkinan adanya kekurangan pasok sebuah komoditi yang dapat memicu adanya inflasi yang tinggi. Dengan demikian dengan adanya TPID membantu masyarakat agar meyakini adanya kepastian pasokan dan harga komoditi barang-barang kebutuhan pokok. Konsep pengendalian inflasi di daerah dapat dilihat dalam Model TPID Solo ini telah menginspirasi di berbagai Pemprov dan Pemkab/kota untuk menerapkannya hingga saat ini.

6 KESIMPULAN

Kesimpulan umum dari studi adalah bahwa yang terjadi di Kota Surakarta dan wilayah sekitarnya adalah evolusi dalam pengertian yang sesungguhnya bahkan dalam beberapa hal mengalami involusi. Beberapa Kesimpulan utama dari buku adalah:

1. Karakteristik Kota Solo tidak berubah sejak era Kerajaan sampai sekarang yakni sebagai kota perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil produksi dari wilayah kabupaten di sekitarnya seperti Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten.
2. Sejak era Kerajaan sampai saat ini telah terjadi perubahan mode transportasi dari sungai menjadi kereta api, jalan raya dan udara. Kendatipun jalur dan rel kereta api tidak bertambah dari sejak jaman Belanda, namun ada pertambahan jalur ganda dan kereta api listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. Transformasi jalan raya semakin masif ketika sudah terbangun jalan tol trans Jawa.
3. Dari sudut pola industri besar di Kota Surakarta juga relatif terdapat perubahan. Perkebunan gula yang pada zaman kolonial yang dimiliki oleh kalangan Keraton Mangkunegaran dan pengusaha-pengusaha Belanda, justru

pada masa kemerdekaan mengalami kemerosotan dan sebagian diambil alih oleh pemerintah. Berarti dari sudut industri gula dan perkebunan tebu yang pada masa kolonial merupakan salah satu komoditi primadona di Jawa Tengah telah mengalami kemunduran drastis. Meminjam istilah Howard Dick (1995), Indonesia kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan teknologi, setelah industri gula yang terbesar di Asia pada masa kolonial itu ternyata tidak menyumbangkan apa-apa bagi perkembangan industrialisasi di Indonesia. Demikian halnya dalam industri batik, tekstil, percetakan/penerbitan, rokok yang sudah ada sejak zaman kolonial industri, dan masih berkembang hingga sekarang.

4. Pasar grosir sandang merupakan daya tarik tersendiri dalam perkembangan Kota Surakarta. Keberadaan Pasar Klewer, Pasar Gede dan pasar-pasar grosir yang lain merupakan penggerak ekonomi di Surakarta. Pasar-pasar ini telah ada sebelum masa kemerdekaan. Ini menandakan bahwa selama 60 tahun kita merdeka pasar-pasar tradisional itu tetap bertahan dan belum ada pengembangan yang berarti. Memang telah mulai pemerintah membangun pasar serupa yang relatif baru seperti di PGS, namun memang masih perlu dikembangkan lebih lanjut.
5. Liberalisasi ekonomi telah begitu banyak mempengaruhi kondisi perekonomian di Surakarta baik dalam bidang industri maupun jasa. Dalam bidang industri, sejak dekade 1990-an, beberapa industri besar seperti batik telah telah mencoba menjajagi pasar ekspor. Selain itu pada era ini, juga berkembang cukup pesat industri kerajinan seperti mebel/furniture, ukir kaca yang menjadi komoditi unggulan dengan pasar di mancanegara. Pola ini menandakan bahwa inovasi menjadi kunci utama bagi perkembangan industri di Surakarta dan sekitarnya. Sementara pada bidang jasa

keuangan dan perbankan mengalami perkembangan yang pesat di Surakarta terutama sejak Pakto 1988, sektor keuangan telah cukup mendorong pertumbuhan sektor riil hingga dewasa ini.

6. Transformasi struktural yang terjadi pada awal 1990-an tidak *sustainable* dalam perkembangan perekonomian Surakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sentralistis yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah tidak memiliki kesinambungan yang optimal. Hampir di seluruh kabupaten di Eks-Surakarta kualitas keunggulan kompetitif sektor industri pengolahan mengalami penurunan hingga mencapai 40 persen dari kondisi pada saat transformasi struktural ke sektor industri terjadi.
7. Revitalisasi pasar tradisional di tengah-tengah pasar-pasar moderen harus dilakukan secara komprehensif termasuk pembinaan pelaku yang mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan usahanya. Ini merupakan cara untuk menjamin kesinambungan pasar tradisional dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam.
8. Dalam perkembangan Solo telah menjadi Kota inklusif dan menjadi percontohan bagi kab/kota yang lain. Beberapa kebijakan inklusif dan inspiratif antara lain adalah (a) mengembangkan ekonomi kerakyatan, penataan PKL, revitalisasi pasar tradisional, (b) meningkatkan pelayanan prima dalam bidang perijinan, pendidikan, kesehatan, (c) mendorong iklim usaha yang mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih luas (d) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang menjadi pelopor.

REFERENSI

- Anspach, Ralph, 1969. "Indonesia", dalam Frank. H. Golay, Ralph Anspach, M. Ruth Pfanner, Eliezer B. (ed), *Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anwar, M Arsjad. 1985. "Tranformasi Struktur Produksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan." Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI.
- Arndt, H.W., 1971. "Banking in Hyperinflation and Stabilization", dalam Bruce Glassburner (ed), *The Economy of Indonesia: Selected Readings*. Ithaca : Cornell University Press.
- Boeke. JH. 1983. *Prakapitalisme Di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Booth, Anne dan Peter McCawley (ed), 1981. *The Indonesian Economy During the Soeharto Era*, Oxford University Press, Kuala Lumpur.
- Brackman, A 1963. *Indonesian Communism: A History*, Frederick Praeger Publisher, USA.
- Burger, DH. 1984. *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chenery, Hollis dan Moshe Syrquin. 1975. *Patterns of Development 1950-1970*. London: Oxford University Press.
- Colombijn, Freek. 2006. *Paco-paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.

- Dick, Howard, James F. Fox, Jamie Mackie. 1997. *Pembangunan yang Berimbang di Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Dick, HW. 2000. "Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan Yang Hilang?" dalam J. Thomas Lindblad (ed). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 2000. "Pendekatan Seorang Ekonom Terhadap Perspektif Historis: Beberapa Pengamatan Acak." dalam J. Thomas Lindblad (ed). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Glassburner, Bruce, 1971. *The Economy of Indonesia: Selected Reading*. Ithaca: Cornell University Press.
- Golay Frank. H, Ralph Anspach, M. Ruth Pfanner, Eliezer B. Ayal. 1969. *Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hakim, L Trinugraha, YM, Mulyanto Sulisty, H, Nugraha, B Suryono. 2014. *Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan Daerah: Penatalaksanaan Dan Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan*, QE Journal | Vol.03 - No.02 June 2014 – 68-84
- Hill, Hal. 1989. *Unity and Diversity Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*. Singapore: Oxford University Press.
- Hill, Hal. 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif (terj)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kartodirdjo, Soejatno. 2002. "Transformasi Sosial Dua Kota Tradisional di Jawa". Dalam Sumijati AS, Suhartono, Marsono dan I Dewa Putu Wijana (ed). *Integrasi, Moral Bangsa dan Perubahan*. Yogyakarta: FIB UGM.

- Kennedy, Paul, 1989. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. London: Fontana Paperbacks.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun, 1981. "The Political-Economy of Development: The Case of Indonesia Under The New Order Government: 1966-1978", *disertasi*, tidak dipublikasikan, University of California, Berkeley.
- Kuntjoro-Jati, Dorodjatun. 2000. "Kata Pengantar." dalam J. Thomas Lindblad (ed). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Liem Thian Joe. 2004. *Riwayat Semarang*. Jakarta: Hasta Wahana.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid 2: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia.
- Malaka, Tan. 2000. *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok.
- Malaka., Tan. 2007. *Menuju Negara Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Mas'ood, Mohtar, 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta.
- Moedjanto. 1994. *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawaen Antara 1755-1992*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Oey Beng To. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia: 1945-1958*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Panglaykim, J. dan I. Palmer. 1970. *Entrepreneurship and Commercial Risk: The Case of a Schumpeterian Business in Indonesia*. Singapore: Institute of Business Studies Nanyang University.
- Prawiranegara, Sjafruddin, 1987. "Recollections of my Career", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 23 No. 3, Desember
- Prasetyo Soepono. 1993. "Analisis Shift-Share: Perkembangan dan Penerapan" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. VIII, No.1, September, hal. 43-54.

- Rahardjo, M. Dawam, Aswab Mahasin, Didik J Rachbini, Masmiar Mangiang, Eko Budi Supriyanto dan Paulus Widiyanto, 1995. *Bank Indonesia : Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, LP3ES, Jakarta.
- Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Robison, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin
- Sariyatun, 2005. "Kerajinan Batik Cina Surakarta: Sebuah Minoritas di Tengah Mayoritas Batik Laweyan." Leo Agung dan Hermanu Joebagio (ed). *Kajian Sejarah Mikro Sebagai Muatan Lokal*. Surakarta: UNS Press.
- Semaoen. 1999. *Berbareng Bergerak*. Yogyakarta: Insist Press.
- Siahaan, Bisuk. 1996. *Industri di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan dan Sampai Banting Setir*. Jakarta:Pustaka Data.
- Simorangkir, OP, 2000. *Kenapa Perbankan Nasional Tak Kunjung Sehat? Tim Studi Pembudayaan Pancasila*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
- Siswokartono, WE Soetomo. 2005. "Sri Mangkunegara IV sebagai Negarawan, Usahawan dan Budayawan." Leo Agung dan Hermanu Joebagio (ed). *Kajian Sejarah Mikro Sebagai Muatan Lokal*. Surakarta: UNS Press.
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat" *Prisma*, No.3, Tahun XXVI, Maret, hal. 27-38.
- Soeroto, Soeri. 1983. "Sejarah Kerajinan di Indonesia." *Prisma*, No.8 Vol XII.
- Subianto, Benny. 2005. "The Politics of Chinese-Indonesians after the Downfall of Soeharto's New Order." dalam AB. Lopian, Muhamad Hisyam, Susanto Zuhdi, Yekni Maunati, I. Ketut Ardhana dan Sukri Abdurrahman (editor). *Sejarah & Dialog Peradaban: Persembahan 70 Tahun Taufik Abdullah*. Jakarta: LIPI Press.

- Suhartono. 1991a. "Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900." *Prisma*, No.4 Tahun XX, April.
- Suhartono. 1991b. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sullivan, Arthur O. 2003. *Urban Economics*. Boston: McGraw-Hill dan Irwin.
- Sumawinata, Sarbini. 1954. "Garis-garis Besar Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Ekonomi Keuangan Indonesia*, No.1, hlm. 27-38.
- Surjomohardjo, Abdurrachman.1988. "Penempatan Kamp Konsentrasi Digul dalam Penulisan Sejarah Indonesia." *Prisma*, XVII(7), hlm. 14-24.
- Sutirto, Tundjung W. 2000. *Perwujudan Kesukubangsaan Kelompok Etnik Pendatang*. Surakarta: Cakra.
- Sutter, John O., 1959. "Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955", Data Paper No 36-4, Cornell University Press, Ithaca.
- Syrquin, Moshe. 1988. "Patterns of Structural Change." dalam Hollis Chenery dan TN Srinivasan. *Handbook of Development Economics*. North Holland: Elsevier.
- Thirwall, AP. 1994. *Growth and Development: With Special Reference to Developing Economies*. Hampshire: The Macmillan Press Ltd.
- Van Laannen, Jan TM. 1986. "Diantara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial." Dalam Anne Booth, William J.O'Malley dan Anna Weudemann. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Warsilah, Henny. 2017. *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota Solo Jawa Tengah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Wihana Kirana. 1998. *Analisis Potensi Keuangan Daerah: Pendekatan Makro*, Modul Manajemen Madya (Penataran Manajemen Sektor Strategis). Yogyakarta: Penerbit Pusat

Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

- Wijaya M, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno. 1991. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Winarti, Sri. 2004. *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta*. Sukoharjo: Cendrawasih.
- Wisesa, E. Dwi Arya. 1988. “Menghayati Sejarah Revolusi Kemerdekaan.” *Prisma* XVII(7), hlm. 59-69.
- Yergin, Daniel dan Joseph Stanislaw, 1999. *The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace that is Remaking the Modern World*. New York: Touchstone.
- Kan Po No. 1. Tahun I Agustus 1942.
- Rijksblad Mangkunegaran No. 9, 1929

BIO DATA TIM PENULIS

1. Lukman Hakim, adalah dosen FEB UNS, menyelesaikan S1 dan S2 dari UGM Yogyakarta, dan S3 dari Universiti Utara Malaysia
2. Hery Sulistyio JNS, adalah dosen FEB UNS menyelesaikan S1 dari UGM, S2 UI dan saat ini tengah menempun S3 di IPB
3. Mulyanto adalah dosen FEB UNS menyelesaikan S1 dari UNS, S2 UI dan dan S3 dari Universitas Diponegoro
4. Soejatno Kartodirjo dosen FKIP UNS menyelesaikan S1 dari UGM, dan S3 dari Australia National University (ANU)
5. Akhmad Daerobi dosen FEB UNS menyelesaikan S1 dari UNS, S2 Unpad dan S3 dari Universitas Diponegoro
6. Bambang Sarosa dosen FEB UNS menyelesaikan S1 dari S2 dari UGM
7. Bhimo Rizky Samudro dosen FEB UNS menyelesaikan S1 dari UNS, S2 UI dan S3 dari Curtin University Australia
8. BRM Bambang Irawan dosen FEB UNS menyelesaikan S1 dari UNS, S2 UI dan saat ini tengah menempun S3 di UNS
9. Nunung Srimulyani menyelesaikan S1 dan S2 dari UNS